

KATA PENGANTAR

Universitas Sam Ratulangi, sebagai salah satu pilar institusi pendidikan tinggi di Sulawesi Utara, memandang perlu konsep geopolitik dan geostrategik provinsi Sulawesi Utara di Kawasan Pasifik. GSSJ Sam Ratulangi telah mengemukakan sintesis: pandangan dan ramalan melalui buku terjemahan “Indonesia di Pasifik”. Salah satu pemikiran Sam Ratulangi bahwa Indonesia bagi Asia Pasifik dan bagi ekonomi dunia pada umumnya mengandung tiga hal yang bersifat pasif yaitu sebagai negeri konsumen, sebagai negeri sumber bahan mentah dan sebagai negeri tempat penanam modal.

Disinilah maksud penulisan buku ini, agar para mahasiswa dapat memahami sekaligus menganalisis bagaimana pemikiran Sam Ratulangi dimaksud menjadi motivasi mereka untuk menciptakan sesuatu inovasi strategi bersaing dan kejasama ekonomi khususnya pangan dan pertanian dikawasan pasifik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Rektor Universitas Sam Ratulangi beserta para Wakil Rektor, yang telah memfasilitasi dana untuk penyusunan buku ini.
2. Ketua LP3 Universitas Sam Ratulangi, yang telah melakukan hibah penulisan bahan ajar serta memfasilitasi penyusunan buku ini.
3. Dekan Fakultas Peternakan beserta pada Wakil Dekan yang telah memberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dalam mata kuliah wajib Universitas.
4. Rekan-rekan dosen Jurusan yang telah mendorong penyusunan hingga penyelesaian buku ini serta,
5. Semua pihak yang telah memotivasi agar penyusunan buku ini selesai

Penulis menyadari akan keterbatasan personal, oleh sebab itu dengan segala hormat, kiranya adanya masukan ataupun kritikan untuk penyempurnaan buku ini. Akhirnya penulis berharap buku ini dapat dipergunakan, terutama kepada mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi, tempat penulis mengajar. Terima kasih

BAB I

LATAR BELAKANG KONSEP PENYATUAN PASIFIK, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Materi pada Bab I ini mencakup latar belakang penyatuan pasifik, pembangunan ekonomi kepasifikan dengan instrument pada Amerika yang memiliki multi budaya, kawasan pertumbuhan terbesar di dunia serta pertarungannya pada kepemimpinan Asia / Pasifik Barat.

Dalam mempelajari bab I ini, nantinya mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi secara internasional dan khususnya di Kawasan Pasifik, untuk itu sebaiknya mahasiswa sudah mempelajari ekonomi mikro dan makro agar mudah mempelajari materi pada bab ini. Selain itu dengan mempelajari bab I ini akan lebih mudah anda untuk mempelajari bab-bab selanjutnya. Jadi bab ini merupakan pra syarat untuk mempelajari bab-bab selanjutnya dalam mata kuliah kepasifikan.

Pada akhir perkuliahan materi Kepasifikan ini diharapkan anda dapat mengaplikasikan kepasifikan dalam pembangunan ekonomi peternakan. Dan pada akhir perkuliahan materi Bab I ini diharapkan anda dapat menjelaskan pengertian dan penyatuan pasifik dan pembangunan ekonomi di Kawasan Pasifik.

Lingkaran Pasifik atau Pasifik Rim atau Pasific Basin, menunjuk pada semua negara di kawasan Asia Pasifik, yakni antara lain Amerika Serikat, Kanada Australia, Selandia Baru, Jepang, Cina, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini begitu menarik, sehingga banyak ahli berpendapat bahwa jika abad ke-20 adalah Abad Atlantik, abad ke 21 adalah Abad Pasifik.

1.1. Konsep Penyatuan Pasifik

Selama dua dekade telah dicoba melakukan usaha-usaha inisiatif untuk kepentingan ekonomi Pacific Basin (Kawasan Curuk Pasifik) dalam rangka menyatukan ekonomi di Kawasan Pasifik. Mulanya telah diajukan proposal untuk kerjasama Kepasifikan (*Pacific*) yang datang dari Jepang pada tahun 1965, ketika Kiyoshi Kojima seorang ahli ekonomi dari Hitotsubashi University dan Hiroshi Kurimoto dari Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Timur Jauh (United Nations

Economic Commission for Asia and the Far East) mengajukan usulan pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Pasifik (Pacific Free Trade Area, PAFTA) desain setelah Masyarakat Ekonomi Eropah (European Economic Community, EEC) terbentuk. Daerah Perdagangan Pasifik ini mempunyai hubungan erat dengan EEC = MEE (Masyarakat Ekonomi Eropah). Organisasi ini terdiri dari lima negara-negara maju yaitu Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia dan New Zealand sebagai anggota tetap penuh dan negara-negara sedang berkembang sebagai anggota tambahan. Hal ini mengakibatkan diskriminasi dalam hal kebijakan tarif dan perdagangan bagi negara yang bukan anggota. Ide ini menjadi hasil keputusan dari Pemerintah Jepang dan menjadi inspirasi dasar dari Konferensi Pembangunan dan Perdagangan Kawasan Pasifik (Regionally Based Pacific Trade and Development, PAFTAD Conferences).

Pada tahun 1967, kelompok pengusaha PBEC (Pacific Basin Economic Council, Dewan Ekonomi Pasifik Basin) terbentuk. ASEAN melakukan komitmen kerjasama regional, ekonomi, kebudayaan dan pembangunan. Pada September 1980 suatu seminar Masyarakat Pasifik dilakukan di Canberra, Australia.

Dua konferensi dilakukan yaitu di Bangkok, Thailand pada bulan Juni 1982 dan di Bali, Indonesia pada bulan November 1983 dan mempunyai sponsor pengorganisasian pelaksanaan kegiatan di Canberra untuk Konferensi Kerjasama Kepasifikan (Pacific Economic Cooperation Conference, PECC). Kerjasama Kepasifikan termasuk 15 negara-negara di Pasifik termasuk Republik Rakyat China (Peoples Republic of China, PRQ dan Taiwan.

Kegiatan-kegiatan Kerjasama Kepasifikan tahunan telah dilaksanakan sejak tahun 1982, dan sebelumnya mereka, membuat Singapura sebagai sekretariat tetap. Selanjutnya swasta dengan bisnis utamanya dan akademisi dari Kerjasama Kepasifikan mengadakan pertemuan-pertemuan penting untuk pertukaran ide diantara pemimpin-pemimpin Kawasan Pasifik. Setiap individu percaya bahwa Kerjasama Kepasifikan membuat perubahan kerjalan suatu Pasifik OECD yang dilakukan atas kekuatan partisipasi pemerintah.

Selanjutnya diantara Dewan Ekonomi Pasifik Basin atau Konferensi Kerjasama Kepasifikan bisa mengurangi ataupun mereduksi kemungkinan-kemungkinan bahaya dan

memberikan dorongan pemecahannya terutama negara-negara ASEAN terhadap dominasi negaranegara ekonomi industri maju.

Organisasi Pembangunan dan Perdagangan Kawasan Pasifik (Pacific Trade and Development, OPTAD), modelnya ada setelah OECD mengajukan proposainya tahun tujuh puluhan. Visualisasinya dilakukan antar organisasi pemerintah. dari lima negara-negara maju yaitu Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia dan New Zealand serta lima negara-negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Pilipina, Singapura, Thailand serta diikuti oleh Korea Selatan.

Papua Nugini dan negara-negara di Pasifik Barat Daya membuat kelompok sebanyak 12 anggota kelompok utama. Taiwan dan Hong Kong dengan keadaan mereka, maka statusnya sebagai peninjau. Kriteria yang menjadi dasar keanggotaan adalah komitmen terhadap ekonomi pasar.

Jepang telah mulai memberikan pertimbangan yang serius terhadap kerjasama Kepasifikan sebagai bagian dari kebijakan nasional mereka. Pada bulan Maret 1979 Kelompok Studi Kerjasama Kawasan Pasifik Basin (Pacific basin Cooperation Study Group terbentuk di Jepang dibawah wewenang otoritas Perdana Menteri Masayoshi Ohira. Kepalanya (ketua kelompok studi) adalah Saburo Okita bekas Menteri Luar Negeri, kelompok ini menghasilkan pekerjaan yang luas dan agenda yang terinci untuk kerjasama Kepasifikan.

Politik kekuasaan terus mengumumkan negara-negara yang tidak liberal. Datangnya industrialisasi dan nasionalisme ke dalam Dunia Ketiga yang relatif lambat akan mengakibatkan suatu perbedaan yang lebih besar antara tingkah laku kebanyakan negara Dunia Ketiga dan negara demokrasi industri. Untuk masa depan yang dapat diperkirakan, dunia akan terbagi menjadi: negara pascasejarah dan negara yang masih melekat kepada sejarah.

Dalam dunia pasca sejarah, sebab utama interaksi antar negara adalah ekonomi, dan aturan-aturan yang sudah lama dari politik kekuasaan yang memiliki peningkatan yang berhubungan, yaitu sesuatu yang sudah dapat membayangkan Eropa demokratis yang bersifat multipolar dan didominasi oleh kekuatan ekonomi Jerman, meskipun di dalamnya negaranegara tetangga merasa terancam secara militer dan tidak melakukan usaha khusus untuk mengembangkan tingkat persiapan militer. Hal itu akan

menjadi sangat ekonomis dengan sedikit persaingan militer. Dunia pascasejarah akan tetap terbagi dalam negara-negara bangsa, tetapi mensahkan nasionalisme yang akan menciptakan perdamaian melalui liberalisme dan akan menunjukkan pertumbuhan mereka dalam ruang kehidupan pribadi. Rasionalitas ekonomi dalam hal itu, akan banyak mengikis cerita-cerita mengenai kedaulatan tradisional sebagaimana kedaulatan untuk penyatuan pasar dan produksi.

Di sisi lain, dunia sejarah akan tetap tersebar luas dengan suatu keragaman agama, bangsa dan konflik-konflik ideologi yang tergantung pada tingkat perkembangan dari perhatian negara-negara tertentu, yang dalam kebiasaan lama politik kekuasaan tetap diterapkan. Negara-negara seperti Irak dan Libya akan terus menguasai tetangga mereka dan berjuang dalam pertempuran yang berdarah. Dalam dunia sejarah, negara-negara bangsa akan tetap menjadi tempat utama dari identifikasi secara politis.

Batas antara dunia sejarah dan pascasejarah berubah dengan cepat, oleh karena itu sulit untuk digambarkan. Uni Soviet sedang melakukan suatu transisi dari suatu tempat menuju. tempat yang lain: dan perpecahan mereka akan berakibat pada negara-negara pengganti yang berhasil melakukan transisi menuju demokrasi liberal, dan yang lain tidak akan berhasil. Cina setelah tragedi lapangan Tiananmen, jauh dari dorongan menuju demokrasi, tetapi sejauh dimulainya reformasi ekonomi, kebijakan luar negeri juga mengalami perubahan, sehingga dikatakan sebagai pertumbuhan. Sekarang ini, kepemimpinan Cina tampaknya memahami bahwa Cina akan kembali terbuka untuk ekonomi internasional. Hal ini telah mengecilkan hati beberapa hasil politik luar negeri seorang pengikut Mao, meskipun berusaha untuk menghidupkan kembali aspek-aspek lokal dari Maoisme. Negara-negara yang lebih besar dari Amerika Latin - Meksiko, Brazil, dan Argentina telah melewati dunia sejarah menuju pascasejarah pada generasi yang lalu, dan telah memikirkan kembali pekerjaan masa lalu yang tercela yang mungkin mereka lakukan, sekarang mereka berbatasan secara ketat dengan demokrasi industri: melalui kebebasan ekonomi.

Dalam beberapa hal, dunia sejarah dan pascasejarah akan mempertahankan persamaan tapi memisahkan keberadaannya, dengan interaksi yang relatif kecil antara mereka. Hal ini akan terjadi, oleh karena itu, beberapa bagian sepanjang dunia-dunia itu, akan terjadi benturan. Pertama, adalah minyak yang melatarbelakangi krisis yang

disebabkan oleh invasi Irak ke Kuwait. Produksi minyak terkonsentrasi dalam dunia sejarah dan menjadi sangat penting untuk ekonomi pasca sejarah, meskipun dinyatakan bahwa pertumbuhan global saling tergantung dalam suatu bentuk komoditas pada krisis minyak tahun 1970-an, yang mengembalikan minyak hanya pada satu produksi yang terpusat untuk mencukupi pasar yang dapat dimanipulasi atau diganggu oleh alasan-alasan politik, dan gangguan itu dapat menghancurkan semua konsekuensi ekonomi dalam dunia pasca sejarah.

Bagian ke dua dari interaksi ini tidak begitu terlihat seperti minyak, tetapi dalam jangka panjang mungkin lebih menyusahkan: yaitu imigrasi. Pada saat itu arus tetap orang-orang dari negara miskin menuju negara kaya dan terjamin, yang pada akhirnya mempengaruhi semua negara di dunia berkembang. Arus ini secara tetap tumbuh pada tahun-tahun terakhir, yang secara tiba-tiba dapat dipercepat dengan dunia sejarah. Peristiwa seperti perpecahan Uni Soviet atau perpecahan etnis di Eropa Timur dengan kekerasan, maupun pengambilalihan Hongkong oleh Cina, semua itu akan menjadi alasan bagi penduduk untuk berpindah dari dunia sejarah menuju dunia paskasejarah atau karena para imigran baru itu telah memasuki sistem politik dan sekarang mendorong gelombang besar yang baru saja mereka dapatkan melalui keterlibatan yang lebih besar.

Hal itu telah terbukti bagi dunia paskasejarah dan sangat sulit untuk menghalangi imigrasi dengan dua alasan. Pertama, mereka tahu sulitnya mengeluarkan orang-orang asing yang tidak tampak sebagai pengikut rasisme atau nasionalisme, oleh karena itu. melanggar prinsip-prinsip hak asasi universal yang mereka nyatakan sebagai demokrasi liberal. Semua demokrasi yang sudah berkembang telah menentukan batas-batas tentang imigrasi pada waktu tertentu, tapi hal ini biasanya sedang dilakukan, sehingga disebut sebagai suatu maksud yang buruk.

Alasan ke dua untuk meningkatkan imigrasi adalah ekonomi, sejak semula setiap negara berkembang kurang berpengalaman dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu, yang tidak ahli atau semi ahli yang merupakan cadangan tenaga kerja yang tidak akan habis di dunia ketiga. Tidak semua pegawai dengan gaji rendah dapat bekerja ke luar negeri. Persaingan ekonomi dalam suatu pasar tunggal yang global, seperti awal kapitalisme telah membantu negara-negara bangsa dengan mobilitas buruh internal yang tinggi.

Pembagian interaksi terakhir antara dua bagian itu akan menjadi akhir permasalahan tertentu dari "aturan dunia", yaitu melalui yang sudah disebutkan di atas khususnya ancaman negara-negara tertentu terhadap negara tetangga mereka, kebanyakan warga negara paskasejarah akan membentuk suatu kepentingan abstrak untuk mencegah penyebaran teknologi tertentu bagi dunia sejarah, dengan dasar bahwa dunia akan menjadi lebih mudah menuju konflik dan kekerasan.

Dalam waktu yang tidak lama, teknologi-teknologi itu termasuk nuklir, rudal balistik, senjata kimia, biologi, dan sejenisnya. Namun, di masa depan, isu-isu yang mengatur dunia dapat diperluas untuk tipe-tipe tertentu mulai dari kepentingan lingkungan yang terancam oleh perkembangan teknologi yang tidak teratur. Sebagai postulat di sini, bila dunia paskasejarah berbuat lain dengan dunia sejarah: kemudian demokrasi paskasejarah akan menjadi daya tarik awam dalam melindungi diri mereka sendiri dari ancaman-ancaman luar, dan dalam memberitakan sebab demokrasi dalam suatu negara di mana demokrasi itu tidak eksis.

Sebagai suatu doktrin yang perspektif, pandangan seorang realis mengenai hubungan internasional selanjutnya menjadi sangat relevan meskipun demokrasi itu baru diperoleh antara tahun 1970 sampai 1980. Setengah dari dunia sejarah berjalan dalam prinsip-prinsip kaum realis, dan sebagian dari dunia paskasejarah harus menggunakan metode-metode kaum realis, ketika berurusan dengan bagian yang masih berada dalam sejarah. Hubungan antara demokrasi dan nondemokrasi akan tetap bercirikan pada rasa takut dan tidak percaya secara bersamaan, dan meskipun suatu tingkat pertumbuhan ekonomi saling bergantung, kekuatan itu akan terus dijadikan *ultima-rasio* (alasan mutlak) dalam hubungan mereka.

Di sisi lain, sebagai suatu metode deskriptif mengenai dunia kerja, realisme meninggalkan suatu hal besar yang diinginkan. Ketidakamanan dan tingkah laku memaksimalkan kekuatan yang menghubungkan kaum realis dengan negara-negara dalam setiap waktu dalam sejarah umat manusia terbongkar di bawah pemeriksaan yang ketat. Proses sejarah manusia telah menimbulkan serangkaian konsep legitimasi keturunan, agama, nasionalisme dan ideologi yang berakibat pada banyaknya kemungkinan imperialisme dan perang.

Tiap-tiap bentuk kebanggaan terhadap pengakuan menuju liberalisme modern berdasarkan pada bentuk hubungan tuan dan budak, sehingga imperialisme berada dalam suatu pengertian yang diatur oleh sistem sosial. Hanya saja sebagai konsep pengakuan yang telah berubah melalui sejarah, sehingga memiliki hubungan internasional, sementara perang dan imperialisme mungkin tampak tetap melalui sejarah, peperangan telah dilakukan untuk tujuan yang sangat berbeda dalam setiap zaman. Tidak ada "tujuan" kepentingan nasional yang memberi ancaman umum untuk tingkah laku negara-negara dalam waktu dan tempat yang berbeda, tetapi suatu keragaman dari kepentingan-kepentingan nasional yang dinyatakan dalam prinsip perdamaian dan setiap individu yang menafsirkannya.

Hal itu akan tampak alami bahwa demokrasi liberal, yang berusaha untuk menghapuskan perbedaan antara tuan dan budak dengan menjadikan manusia sebagai tuan bagi dirinya sendiri, seharusnya membedakan tujuantujuan kebijakan luar negeri secara bersamaan. Apa yang menghasilkan perdamaian dalam dunia paskasejarah tidak akan menjadi kenyataan bahwa negara-negara tertentu membagi suatu prinsip pengakuan umum. Peristiwa dari negara itu telah muncul pada masa lalu, misalnya ketika semua bangsa di Eropa berbentuk monarki atau kerajaan. Perdamaian akan muncul ke luar sebagai pengganti keadaan yang khusus terhadap legitimasi yang demokratis dan kemampuan mereka untuk melepaskan kehidupan manusia dalam mencapai pengakuan.

1.2. Pembangunan Ekonomi

Amerika Yang memiliki multibudaya Pada tahun 2020 dunia akan bergerak lebih jauh dari akar Anglo-Saxon yang berkulit putih. Selama dua puluh lima tahun mendatang AS akan menjadi satu-satunya negara maju di dunia yang akan terus memperbolehkan imigrasi dengan skala besar-besaran dengan kemungkinan perkecualian Australia. Selama tahun 1980-an kawasan ini menerima lebih banyak imigran dibandingkan dengan dalam dasawarsa sebelumnya dalam sejarah dan kira-kira sebanyak 90 persen imigran dari negara-negara kurang maju ke negara maju pergi ke AS. AS belum lagi akan menjadi sebuah negara tempat orang kulit putih nyaris menjadi minoritas, seperti yang diramalkan untuk tahun 2050 oleh Biro Sensus Departemen Perdagangan AS, tetapi negara ini sudah jauh menempuh perjalanan menuju masyarakat yang benar-benar

multibudaya yang akan terbentuk pada paruh kedua abad mendatang. Sebagai akibatnya Amerika bukan hanya akan merasa sangat berbeda dengan AS sekarang; negara ini juga akan berbeda sekali dengan kawasan industri matang lainnya di dunia, yang tidak akan mengalami keuntungan atau biaya imigrasi seperti itu.

AS akan merasa besar dan bergairah, tetapi tidak akan, dengan Standar Eropa atau Jepang, merasa kaya sekali. Banyak warga negaranya yang sama sekali tidak merasa kaya menurut standar orang di tempat lainnya di dunia maju, sebab ekonomi Amerika akan memperlihatkan banyak sifat negara-negara sedang berkembang. Dengan satu cara, Amerika akan menjadi bayangan cermin dari apa yang ketika itu akan menjadi ekonomi besar lainnya di dunia, Cina. Sebagian besar Cina akan tetap merupakan ekonomi yang kurang maju, tetapi akan ada kawasan luas yang telah mencapai status industri penuh, sementara sebagian besar AS akan menjadi ekonomi yang sangat maju seperti sekarang, dan bagian-bagiannya akan terus menjadi kawasan paling kaya di seluruh dunia, namun akan ada kantung-kantung besar tempat standar kehidupan, tingkat pendidikan, pengangguran dan kesehatan rakyat lebih mirip dengan apa yang ada di negara sedang berkembang dan bukannya yang ada di negara industri.

Amerika juga akan beroperasi dalam dunia yang sangat berbeda. Akhir imperium Soviet dan perubahan sebagian besar Cina ke sistem ekonomi pasar telah membuat perbedaan antara Dunia Pertama, negaranegara industri 'barat,' dan Dunia Kedua, negaranegara komunis, terasa anak minoritas. Perkembangan masyarakat multibudaya, dan yang lebih penting, ekonomi multibudaya di Amerika. Utara, bersama-sama dengan Perubahan yang terjadi di Cina, akan berarti bahwa pembagian antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga akan menjadi jauh lebih kabur.

Apa yang membuat AS secara radikal berbeda adalah bahwa negara ini akan menjadi satu-satunya masyarakat yang benar-benar multibudaya di dunia industri sekali lagi, dengan kemungkinan Perkecualian Australia. Sebagian besar dari penduduk imigrannya akan memungkinkan ekonomi secara keseluruhan bisa terus; tumbuh agak lebih cepat daripada di Eropa atau Jepang, tetapi arus masuk pekerja yang relatif berpendidikan rendah dan relatif tidak ahli akan terus mengisi kelompok orang miskin.

Kenyataan bahwa AS akan sangat berbeda secara kultural dengan dunia 'kaya' lainnya menimbulkan pertanyaan Yang sangat penting dan tidak menyenangkan: apakah

masyarakat multibudaya secara interen kurang efisien dibandingkan dengan masyarakat budaya tunggal? Paling sedikit ada tiga alasan untuk menduga. bahwa tidak demikian halnya. Pertama, dan yang paling jelas, terdapat banyak masyarakat budaya tunggal yang menjalankan ekonomi yang sangat tidak efisien. Kedua, banyak imigran yang akan membawa energi, keahlian dan ambisi, dan dengan sifatnya, ini akan merupakan daya untuk menghidupkan kembali kawasan itu. Ketiga, sementara keunggulan komparatif dalam mengekspor bergeser dari pabrikan ke jasa dan gagasan, mungkin sekali sifat unik- warga. AS itu sendiri akan menjadi aset yang lebih besar daripada sekarang. Bilamana pelebur Amerika menjadikannya generator besar gagasan baru, dan gagasan adalah bahan mentah yang akan digunakan oleh industri jasa untuk membuat produk barunya.

Bagaimanapun juga, sifat multibudaya. AS mungkin juga akan menjadikannya masyarakat yang mahal pengelolaannya. Memastikan permainan jujur antara kelompok-kelompok rasial dan kultural dan memastikan hak-hak minoritas adalah sifat yang semestinya, perlu dan dikagumi dalam masyarakat AS, tetapi itu menambahkan biaya. Biaya ini terbukti dalam sistem medis dan hukum, yang bukan hanya lebih menghambat dan lebih mahal daripada di negara-negara industri lainnya, tetapi harus mengatasi beban tambahan, terutama dari imigran baru salah satu contohnya yang menyedihkan adalah masalah tuberkulosis yang makin meningkat di New York. Di dunia yang ideal, pengeluaran seperti itu seharusnya membuat masyarakat yang lebih efisien, tetapi pada prakteknya sumber daya ini tidak selalu digunakan dengan baik. Pertanyaan Yang sulit adalah apakah massa banyak yang terdiri dari orang kelas menengah biasa siap memiliki standar kehidupan rendah supaya bisa. membayar untuk kehidupan dalam masyarakat yang sesuai dengan sifatnya menuntut banyak biaya untuk pengelolaannya.

Sementara itu, banyak anggota generasi muda orang miskin yang agaknya terjebak dalam daur tempat mereka. tidak punya keahlian maupun sikap untuk bekerja yang membuat mereka secara ekonomi bermanfaat dalam ekonomi pascaindustri maju. Sulit sekali melihat bagaimana daur ini diputus. AS, dengan sumber daya manusianya yang besar sekali dan komitmennya kepada persamaan kesempatan, akan berusaha mengangkat tingkat keahlian orang-orang ini. Penting sekali untuk tidak mengacaukan masalah orang miskin yang sudah ada dengan masyarakat imigran. Besarnya semangat

banyak imigran baru akan memberikan kelenturan dan dorongan ke pertumbuhan ekonomi Yang tidak dimiliki oleh kawasan dunia maju lainnya, tetapi dalam jangka pendek arus imigrasi Yang terus datang dengan suatu cara akan menghambat unjuk kerja ekonomi.

Akan banyak efek positif dari imigrasi yang terus berlanjut, yang paling penting, persediaan siap pakai tenaga kerja muda yang murah akan memungkinkan AS bisa mempertahankan landasan pemabrikaan di bidang-bidang tempat biaya tenaga kerja tinggi akan memberatkan sebagian besar Eropa barat dan Jepang. Walaupun demikian akan cukup banyak kawasan di AS, terutama di dalam kota, tempat rintangan budaya bagi ekonomi sekarang akan terus berlanjut. tingkat kejahatan tinggi disebutkan dalam penelitian di tahun 1989 sebagai alasan utama mengapa bisnis kecil New York menceritakan pekerjaan baru hanya sepertiganya. takaran di bagian AS lainnya.

Sulit sekali untuk melihat daya apa yang mungkin mengubah proses ini yang membuat kejahatan merupakan satu- satunya cara bagi orang muda untuk memperoleh apa yang mereka rasakan sebagai upah yang bisa diterima. Bagian-bagian AS ini akan merosot, sehingga kalau tidak ada arus masuk dana dari pembayar pajak, standar kehidupan hanya akan sedikit lebih tinggi daripada apa yang sekarang dianggap sebagai sebuah kota di Dunia Ketiga.

Tentu saja. ada bagian-bagian kota di Eropa tempat situasi yang sama ada, tempat hanya sedikit atau tidak ada sama sekali arus kegiatan ekonomi - bahkan juga tidak ada toko tetapi skala masalah di AS jauh lebih besar dan akibatnya daur akan lebih sulit dibalikkan.

Pembagian budaya (bukan ras, walaupun keduanya mungkin sulit dibedakan) akan menjadi jauh lebih kentara daripada keadaannya sekarang. Sudah ada kawasan-kawasan luas yang secara Predominan berbicara dalam bahasa Spanyol. Di tahun 2020 bukan hanya kawasan-kawasan ini secara fisik lebih besar, tetapi Spanyol akan menjadi bahasa standar orang biasa di bagian selatan California, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa kaum elite.

Perbatasan dengan Meksiko masih ada sebagai sebuah fakta politik, tetapi tidak lagi penting bagi tujuan ekonomi. Amerika Utara akan menjadi kawasan ekonomi

terpadu. Ini akan terjadi bahkan tanpa adanya Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang ditandatangani pada akhir tahun 1993.

1.3. Kawasan Pertumbuhan Terbesar di Dunia

Kawasan pertumbuhan terbesar di Asia Timur, kawasan yang disebut orang Inggris sebagai Timur Jauh, dan yang kalau dikaitkan dengan Australia dan Selandia Baru, telah diberi julukan kawasan Asia/Pasifik. Negara-negara di dalamnya terletak di sepanjang lengkungan besar yang terentang dari Pulau Sakhalin Rusia, melalui Jepang dan kedua Korea ke Taiwan, Hong Kong dan kawasan pantai daratan Cina. Kawasan ini terbentang ke bawah melalui semenanjung Vietnam, ke Malaysia dan Singapura, dan melintas ke negara raksasa Indonesia. Kawasan ini akan mencakup, kalau orang memasukkan seluruh Cina, lebih dari dua milyar penduduk, walaupun kawasan yang bakal menjadi dinamisme ekonomi selama generasi berikutnya agak lebih kecil: kira-kira hanya mencakup setengah milyar jiwa.

Bab ini tidak mencakup Asia Selatan, anak benua India. Memang ini dilewatkan dengan sengaja, bukan karena negara-negara ini tidak penting atau kurang memiliki potensi ekonomi - India tentu saja hanya nomor dua sesudah Cina dalam hal jumlah penduduknya, dan ada kantong-kantong lepas landas ekonomi di kawasan itu, tempat industri teknologi tinggi makmur - melainkan karena kawasan ini bukan bagian yang berintegrasi dengan ekonomi Asia Timur. Kawasan ini rupanya secara kualitatif berbeda dalam cara pendekatannya kepada kegiatan perdagangan dan industri. Bagianbagian dari kawasan itu mungkin memberikan sumbangan yang lebih besar kepada kemakmuran dunia dalam tiga dasawarsa mendatang, tetapi kecil sekali ukurannya kalau dibandingkan dengan potensi Asia Timur.

Bukan hanya pertumbuhan ekonomi Asia Timur yang mengesankan, walaupun pertumbuhan itu luar biasa. Ini lebih banyak dalam pengertian tatanan dan tekad Yang menimbulkan pertumbuhan tersebut: komitmen Timur. Ekonomi Amerika Utara akan tetap sangat kuat, walaupun mungkin terhadap pendidikan, tingkat simpanan Yang tinggi, perhatian kepada per dalam pengertian relatif akan sedikit merosot. Eropa, Yang sekarang ini berbagai tipe kegiatan ekonomi Yang berbeda, bukti tentang adanya merupakan kawasan dengan keluaran total Paling besar, mau tidak mau juga disiplin dan

kecerdikan Yang dimiliki oleh orang-orang di kawasan itu punya beban yang berat sekali, apa pun kesulitannya. Mungkin akan dihadapinya. Tetapi keseimbangan secara keseluruhan tergantung pada menangkap tema umum dari kawasan itu merupakan hal yang vital untuk memahaminya, sebab ini kawasan yang jauh kurang kohesif dibandingkan dengan Amerika Utara, atau bahkan dengan Eropa. Kawasan ini beragam secara rasial dan kultural, dan mencakup lingkup sistem politik yang berlainan, dari apa yang sangat mirip dengan demokrasi parlementer barat sampai kediktatoran komunis garis keras. Dan kawasan ini bukan hanya mencakup salah satu negara paling kaya di dunia, Jepang, tetapi juga beberapa negara paling miskin.

Sebagaimana, Yang akan dibahas dalam bab ini, perkembangan ekonomi, yang sekarang ini tidak merata, tidak akan mencakup seluruh kawasan. Tetapi sebagai keseluruhan kawasan ini akan memetik keuntungan dari tiga sumber daya di dalam batas-batasnya:

- Bisa diperolehnya tenaga kerja murah, terutama dari pedalaman Cina.
- Sumber daya alam yang besar sekali dari Siberia, terutama minyak, gas dan bahan tambang strategis
- Sumberdaya alam dan keahlian manusia dua masyarakat'Anglo Pasifik timur, Australia dan Selandia Baru.

Walaupun mudah sekali kita disilaukan oleh Asia Timur, penting sekali untuk tidak demikian. Apa yang telah terjadi memang benar-benar luar biasa: seluruh kelompok negara melakukan dalam satu atau dua generasi apa yang mengharuskan Eropa atau Amerika (atau, dalam hal ini Australia dan Selandia Baru) mengambil waktu tiga atau empat generasi. Tetapi ledakan pertumbuhan ekonomi ini punya landasan yang tipis sekali. Hal itu terjadi berkat rangkaian keadaan menguntungkan yang mungkin akan bertahan selama satu generasi lagi, tetapi yang mungkin juga tidak demikian. Asia Timur lebih rawan terhadap kemunduran daripada Eropa atau Amerika Utara karena punya sumber daya alam yang lebih sedikit, infrastruktur yang kurang berkembang, lingkup produk yang lebih sempit, lembaga politik yang kurang kuat, dan terlalu tergantung pada teknologi barat untuk produknya, serta pasar barat untuk eksportnya. Tambahan

pula, bagian-bagian besar dari kawasan itu. tergantung pada perlindungan militer AS untuk keamanannya.

Keseimbangan ekonomi dunia dalam paruh pertama abad mendatang akan ditentukan, melebihi apa pun lainnya, oleh apa Yang terjadi di Asia Timur. Ekonomi Amerika Utara akan tetap sangat kuat, walaupun mungkin dalam pengertian relatif akan sedikit merosot.

Pada awal tahu 1990-an, keluaran kawasan Asia/Pasifik, walaupun ada ledakan pertumbuhan tahun 1980-an, dan mencakup 1,2 milyar jiwa penduduk Cina, kurang lebih masih lebih kecil daripada Amerika Utara atau Eropa. Kalau pertumbuhan bisa dipertahankan selama satu generasi lagi, keluaran Asia Timur hampir bisa. dipastikan akan melampaui kedua kawasan tersebut. Karena kawasan ini menuntut sifatnya lebih beragam, ini tidak mungkin menjadi sama pentingnya sebagai entitas politik bahkan sama sekali tidak akan menjadi satu. entitas politik. tunggal tetapi kalau perimbangan kekuatan ekonomi terus bergeser ke Pasifik, maka ini akan punya konsekuensi politik Yang besar sekali bagi mitra dagangnya dan barat.

Pertumbuhan Asia Timur Yang eksplosif berdasarkan pengambilan barang yang dikembangkan oleh barat dan membuatnya mula-mula lebih murah dan akhirnya dengan mutu Yang lebih tinggi. Pada tahun 1950-an orang biasa bergurau tentang Imitasi, Jepang Yang murah - barang-barang yang dibuat di Jepang merupakan tiruan tepat Produk barat. Jepang sudah lama tidak lagi perlu meniru dengan cara begitu gampang tetapi di tempat lainnya proses itu masih berlanjut. Pergilah ke pusat pertokoan di kota seperti Bangkok atau Seoul, dan akan ditemukan di mana-mana cabikan-cabikan nama merek barat: akan ada jam Rolex palsu, korek api Dunhill palsu, tas tangan Cartier palsu, bahkan Kamus Inggris Oxford palsu. SiaPa saja Yang dibesarkan di barat dengan pandangan bahwa menyontek dalam ujian itu salah akan memandang hal ini dengan campuran antara kekesalan dan kebencian. Tetapi kemampuan meniru tidak jauh berbeda dengan kemampuan belajar dari orang lain. Pada kenyataannya, itu lebih banyak merupakan kekuatan daripada kelemahan - sudah pasti bagi negara Yang berusaha mengejar pesaingnya di barat. Rekayasa pembalikan, membongkar sesuatu sampai menjadi kepingan-kepingan dan membuat tiruannya, memungkinkan Taiwan bisa menjadi penghasil papan sistem untuk komputer pribadi Yang terbesar di dunia. Di Jepang

kenyataan bahwa produk baru apa pun seketika dibongkar menjadi kepingan-kepingan oleh pesaing membangkitkan persaingan intern Yang sengit dalam pengembangan produk. Ini pada gilirannya mendorong perusahaan-perusahaan untuk mempersingkat waktu pengembangan, untuk mendengarkan dengan cermat keinginan pelanggan, dan mengembangkan teknik pemabrikan Yang cukup lentur untuk memenuhi ini.

Maka kemampuan untuk membuat imitasi benar-benar lebih dari sekedar peniruan sederhana produk seseorang lainnya: ini menuju proses pemabrikan yang itu saja sudah memudahkan pengembangan produk. Tambahkan sistem pendidikan, atau lebih tepatnya sikap terhadap pendidikan, Yang menekankan pada ketepatan dan perhatian kepada perincian; tambahkan, dalam tahap awal perkembangan sebuah negara, upah Yang rendah; tambahkan tingkat simpanan tinggi secara universal, Yang membuat modal untuk perluasan siap diperoleh, dan tidak sulit melihat mengapa dalam pengertian umum Asia Timur merupakan pesaing Yang begitu efektif bagi barat. Tetapi jauh lebih sedikit mengidentifikasi apa Yang spesifik. Lebih mudah mengatakan bahwa performa pendidikan lebih baik dibandingkan dengan di barat daripada menjelaskan mengapa demikian keadaannya. Jepang tidak melewatkan waktu lebih banyak daripada Inggris dalam pendidikan umum, namun rupanya mencapai standar Yang lebih tinggi; Penabung Jepang tidak mendapat imbalan Yang lebih baik daripada penabung Inggris (sesungguhnya selama bertahun-tahun mereka mendapat imbalan Yang lebih buruk tetapi mereka menyimpan jauh lebih banyak).

RANGKUMAN

1. Daerah perdagangan pasifik ini mempunyai hubungan erat dengan EEC = MEE (Masyarakat Ekonomi Eropah). Organisasi ini terdiri dari 5 negaranegara maju yaitu : Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, dan New Nealand sebagai anggota tetap penuh dan negara-negara sedang berkembang sebagai anggota tambahan. Hal ini mengakibatkan diskriminasi dalam hal kebijakan tarif dan perdagangan bagi negaranegara yang bukan anggota. Ide ini menjadi hasil putusan dari pemerintah Jepang dan menjadi inspirasi dasar dari konferensi pembangunan dan perdagangan kawasan pasifik (Regional Based Pasific Trade and Development, PAFTAD Conperence).
2. Kerjasama Kepasifikan tekanan telah dilaksanakan sejak tahun 1982, dan sebelumnya mereka membuat singapura sebagai sekretariat tetap. Setiap individu percaya bahwa kerja sama kepasifikan membuat perubahanperubahan ke dalam suatu pasifik yang dilakukan atas kekuatan partisipasi pemerintah. Dewan Ekonomi Pasifik bisa mengurangi ataupun mereduksi kemungkinan-kemungkinan bahaya dan memberikan dorongan pemecahan terutama negara-negara ASEAN terhadap dominasi negaranegara ekonomi industri maju.

PENUTUP

Tes Formatif

Jawablah soal-soal di bawah ini !

1. Jelaskan tiga alasan mengapa Amerika Serikat secara Kultural berbeda dengan negara kaya lainnya karena memiliki multi budaya dapat menjalankan ekonominya yang memiliki budaya tunggal. Bobot nilai 50.
2. Jelas 5 sifat umum yang dimiliki kawasan Asia Timur yang menyebabkan sukses dalam bidang ekonomi dalam keragaman politik dan budaya.

UMPAN BALIK

Setelah menjawab soal-soal di atas, cocokkanlah dengan kunci jawaban tes formatif yang ada di bagian akhir. Hitunglah jumlah jawaban yang benar kemudian gunakan rumus tingkat penguasaan, sebagai berikut :

Arti tingkat penguasaan yang dicapai adalah :

(Jumlah jawaban yang benar)

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{—————}}{2} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan yang dicapai adalah :

80 % - 100 % = Baik sekali

70 % - 79 % = Baik

60 % - 69 % = Cukup

< 60 % = Kurang

TINDAK LANJUT

Bila belum mencapai penguasaan 80 %, maka harus mempelajari kembali kegiatan belajar terutama bagian yang belum dikuasai, agar dapat menyelesaikan soal di atas. Jika telah dapat mencapai 80 % penguasaan, maka dapat melanjutkan ke pokok bahasan yang berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

Crawford, J., and G. Seow, 1981. Pacific Economic Co-Operation Suggestion For Action. Heinemann Asia For The Pacific Community Seminar. London, Edinburgh, Melbourne, Aekland, Lasuka, Johannesburg, New Delhi, Nairobi, Ibedaan, Spain. Hal 77-122.

BAB II.

HUBUNGAN INTERNASIONAL ASIA-PASIFIK

Materi pada Bab II ini mencakup Hubungan Internasional Asia-Pasifik. Dalam mempelajari bab II ini, nantinya mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti letak strategis Asia Pasifik yang meliputi wilayah yang mencakup pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara dan Australia di dekat Laut Pasifik, ditambah negara-negara di laut Pasifik (Oseania). Juga berkaitan dengan system pemerintahan dan pengenalan berbagai organisasi kerjasama dunia dari masing-masing negara itu.

2.1. Perspektif Asia Pasifik

Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat luas, kaya perbedaan dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, dinamika politik dan keamanan yang tinggi. Dihuni negara-negara ekonomi kuat, negara industri maju, industri baru, dan rumah dari 40 % penduduk dunia. Kawasan ini merepresentasikan 54 % GDP dunia, 44 % aktivitas perdagangan dunia, dan memiliki rute-rute perdagangan penting.

Asia Pasifik adalah wilayah yang mencakup pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara dan Australia di dekat Laut Pasifik, ditambah negara-negara di laut Pasifik (*Oseania*). Walaupun deskripsi geografis kurang tepat, istilah Asia Pasifik menjadi dikenal pada sekitar tahun 1980-an sewaktu pertumbuhan ekonomi pada wilayah heterogen ini dalam hal perdagangan saham, perdagangan umum dan bentuk lain dari interaksi ekonomi dan politik menjadi topik pembicaraan.

Dimasukkannya negara-negara dikawasan Oseania seperti Australia dan Selandia Baru adalah berdasarkan relasi ekonomi diantara negara-negara tersebut dan mitra dagang mereka di wilayah Asia Timur hingga ke utara. Dalam beberapa konteks, wilayah ini dianggap pula mencakup negara-negara utama di kawasan Asia yang terletak disekeliling lingkaran luar Pasifik (*Pacific-rim*) yang membujur dari Oseania, hingga ke Rusia, dan turun kebawah sepanjang pantai barat Amerika. Contohnya Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik memasukkan Kanada,

Chili, Rusia, Mexico, Peru, dan Amerika, dan kini sedang dipertimbangkan untuk memasukkan India.

Komponen wilayah Asia-Pasifik adalah meliputi negara-negara : Australia, Brunei, Kamboja, Republik Rakyat Cina (termasuk Hong Kong dan Makao), Taiwan (Republik Cina), Fiji , Guam (Teritori Amerika), Indonesia, Jepang, Kiribati, Korea Utara , Korea Selatan , Laos , Malaysia, Selandia Baru, Marianas Utara (teritori Amerika), Palau, Papua New Guinea, Filipina, Samoa , Singapura , Thailand , Timor-Leste , Tonga , Tuvalu , Vanuatu , Vietnam

Untuk Kawasan Asia Timur adalah salah sebuah sub-wilayah Asia. Luasnya sekitar 6.640.000 km², atau 15 persen dari benua tersebut, dimana Negara-Negara ini meliputi ; Republik Rakyat Cina, kecuali untuk provinsi Qinghai dan daerah otonomi Xinjiang serta Tibet, Jepang, Korea Utara , Korea Selatan, Taiwan, Mongolia dan Hong Kong. Namun ada juga Negara-Negara yang kadang dianggap sebagai bagian dari Asia Timur (tergantung sudut pandang politik) yaitu; Sisa bagian RRC: Xinjiang, Qinghai, Tibet (bisa Asia Timur maupun Asia Tengah), Mongolia (bisa Asia Timur maupun Asia Tengah) dan Vietnam (bisa Asia Timur maupun Asia Tenggara), dimana lebih dari 1.500 juta jiwa, atau sekitar 40 persen seluruh penduduk Asia dan seperempat penduduk dunia tinggal di Asia Timur. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah terpadat di dunia. Kepadatan penduduk Asia Timur, 230 per km², adalah lima kali rata-rata dunia.

Selanjutnya untuk Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Samudera Pasifik di timur, Samudera Hindia di selatan, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat.

Asia Tenggara biasa dipilah dalam dua kelompok: Asia Tenggara Daratan (ATD) dan Asia Tenggara Maritim (ATM). Negara-Negara yang termasuk ke dalam ATD adalah; Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Sedangkan Negara-Negara yang termasuk ATM adalah; Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Timor Leste.

Malaysia, meskipun ada bagian yang tersambung ke benua Asia, biasa dimasukkan ke dalam ATM karena alasan budaya. Semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN, kecuali Timor Leste. Yang terakhir ini berstatus sebagai pengamat. Namun oleh beberapa pihak, atas alasan politis, negara ini dimasukkan ke kawasan Pasifik.

Secara geografis bahkan juga secara historis, sebenarnya Taiwan dan pulau Hainan juga termasuk Asia Tenggara, sehingga diikutkan pula. Namun demikian, karena alasan politik Taiwan dan pulau Hainan lebih sering dimasukkan ke kawasan Asia Timur. Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas, yang terletak di selatan Jawa, oleh beberapa pihak dimasukkan sebagai Asia Tenggara meskipun secara politik berada di bawah administrasi Australia. Sebaliknya, Pulau Papua dimasukkan sebagai Asia Tenggara secara politik meskipun secara geologi sudah tidak termasuk benua Asia.

Geografi Asia Tenggara dapat dikategorikan menjadi dua bagian, daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan termasuk Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan termasuk Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Negara Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia) atau dikenal sebagai Australia saja, adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudera Hindia selatan dan Samudera Pasifik. Negara tetangga Australia disebelah utara termasuk Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Disebelah timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru (secara administratif milik Perancis), sementara di tenggara bertetangga dengan Selandia Baru .

Australia, walaupun terletak di dekat Asia, lebih sering disebut sebagai bagian dari dunia Barat karena kehidupannya yang mirip Eropa Barat dan Amerika Serikat. Penduduknya pun sebagian besar kulit putih.

Benua Australia selama 40.000 tahun telah didiami oleh penduduk asli Australia, namun pada abad ke-17 setelah kunjungan-kunjungan sporadis dari para nelayan di utara dan penjelajah Eropa serta para pedagang, separuh wilayah timur Australia kemudian diakui sebagai wilayah Inggris di tahun 1770 dan secara resmi dijadikan pemukiman koloni terhukum (penjahat) di New South Wales pada 26 Januari 1788. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan perambahan wilayah-wilayah baru, maka lima wilayah besar yang mengelola sendiri "jajahan yang diperintah oleh Pusat" (Crown Colony) didirikan satu demi satu sepanjang abad ke-19.

Pada 1 Januari 1901, ke enam federasi koloni ini dan Persemakmuran Australia dibentuk. Semenjak berdirinya federasi, Australia telah berhasil mempertahankan sistem politik liberal demokratis yang stabil dan tetap tunduk dalam Wadah Persemakmuran. Jumlah penduduk

terakhir yang tercatat adalah 20,4 juta jiwa dan umumnya terpusat di kota-kota sepanjang garis pantai seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide dan Perth (dan menjadi kota-kota besar di Australia). Ibu kotanya terletak di Canberra, sementara di daerah gurunnya yang luas, jumlah penduduk sangat sedikit.

Persemakmuran Australia adalah sebuah monarki konstitusional dan mempunyai sistem pemerintahan parlementer. Ratu Elizabeth II adalah Ratu Australia, namun tugasnya sebagai Ratu berbeda dari tugasnya di Britania Raya. Sang Ratu diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal Australia, yang hanya menggunakan kekuatan eksekutifnya melalui nasehat dari Perdana Menteri.

Terdapat tiga cabang pemerintahan:

1. Legislatif: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan.
2. Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; sang Gubernur Jenderal dinasehati para penasihat eksekutif, yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri. Biasanya Gubernur Jenderal tidak akan menolak nasehat-nasehat tersebut.
3. Kejaksaan: Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya.

Australia mempunyai parlemen yang bikameral, terdiri dari Senat yang berisi 76 senator, dan sebuah Dewan Perwakilan yang mempunyai 150 anggota. Anggota Dewan dipilih dari wilayah-wilayah pemilihan beranggotakan tunggal yang umumnya disebut electorate atau seat (kursi). Negara bagian yang lebih besar populasinya akan mempunyai lebih banyak perwakilan; setiap negara bagian minimal mempunyai lima perwakilan.

Dalam Senat, setiap negara bagian diwakili 12 senator tanpa mempedulikan jumlah penduduknya. Pemilihan anggota parlemen diadakan setiap tiga tahun sekali, namun biasanya hanya setengah dari kursi-kursi Senat yang diperebutkan, karena para Senator mempunyai masa jabatan enam tahun yang saling bertindih. Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam Dewan adalah sang Perdana Menteri.

Ada tiga partai politik besar: Buruh, Liberal, dan Nasional. Koalisi Liberal/ Nasional telah berkuasa sejak pemilu 1996 dan Koalisi berhasil merebut kekuasaan terhadap Senat dalam pemilu 2004, namun Koalisi kemudian kalah dari Buruh pada pemilu 2007. Partai Buruh hingga

saat ini masih berkuasa di setiap negara bagian dan territory; seluruh pemimpin wilayah-wilayah tersebut berasal dari Partai Buruh.

Oseania adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri atas sejumlah kepulauan yang berada di Samudera Pasifik dan sekitarnya. Oseania merupakan benua dengan luas area daratan terkecil dan jumlah populasi terkecil kedua setelah Antartika.

Dalam artian sempit yang pertama kali didefinisikan penjelajah asal Perancis bernama Jules Dumont d'Urville pada tahun 1831, Oseania meliputi Polinesia (termasuk Selandia Baru), Melanesia (termasuk Nugini) dan Mikronesia. Sedangkan dalam artian luas maka Oseania juga meliputi Australia dan Indonesia bagian timur; namun jarang memasukkan Jepang dan Kepulauan Aleut dalam kelompok Oseania.

Sebagian besar dari Oseania terdiri dari negara-negara pulau yang kecil. Australia adalah satu-satunya negara kontinental, sedangkan Papua Nugini dan Timor Timur adalah negara yang memiliki perbatasan darat, kedua-duanya dengan Indonesia.

Negara-Negara di Oseania mempunyai kemerdekaan dalam jumlah yang beragam dari penguasa-penguasa kolonial mereka dan telah mendapatkan pengaturan konstitusional yang bervariasi sesuai dengan keadaan mereka. Australia misalnya, adalah negara yang tergabung dalam Persemakmuran, sehingga mengakui Ratu Elizabeth II dari Britania Raya sebagai Ratu, sementara Polinesia Perancis adalah sebuah pays d'outre-mer (negara luar negeri) Perancis.

Secara ekologi, Oseania merupakan satu di antara delapan zona ekologi terestrial dunia. Zona ekologi Oseania meliputi Mikronesia, Fiji dan Polinesia kecuali Selandia Baru, Nugini, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon dan Vanuatu termasuk zona ekologi Australasia.

Ada berbagai organisasi Kerjasama diantaranya; APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Dengan kata lain APEC adalah forum utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.

APEC adalah satu-satunya pemerintahan antar kelompok di dunia yang beroperasi atas dasar komitmen yang tidak mengikat, dialog terbuka dan sama menghormati pandangan dari semua peserta. Tidak seperti WTO atau badan-badan perdagangan multilateral lainnya, APEC tidak memiliki kewajiban perjanjian yang diperlukan dari peserta. Keputusan yang dibuat dalam

APEC yang dicapai dengan konsensus dan komitmen yang dilakukan secara sukarela. APEC memiliki 21 anggota (disebut sebagai “Member Ekonomi”) yang menyumbang sekitar 40,5% dari populasi dunia, sekitar 54,2% dari GDP dunia dan sekitar 43,7% dari perdagangan dunia.

APEC didirikan pada tahun 1989 dengan maksud dan tujuan untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran untuk wilayah dan untuk memperkuat komunitas Asia Pasifik, dimana sejak awal, APEC telah bekerja untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain di wilayah Asia Pasifik, menciptakan ekonomi domestik yang efisien dan secara dramatis meningkatkan ekspor.

Kunci untuk mencapai visi APEC adalah apa yang disebut sebagai “Tujuan Bogor” yang bebas dan terbuka perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2010 untuk ekonomi industri hingga 2020 untuk mengembangkan ekonomi. Tujuan ini diadopsi tahun 1994 oleh para pemimpin negara di pertemuan di Bogor, Indonesia.

Bebas dan terbuka membantu perdagangan dan investasi ekonomi untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk perdagangan internasional dan investasi. Sebaliknya, proteksi harga tetap tinggi dan mendorong inefisiensi dalam industri-industri tertentu. Perdagangan bebas dan terbuka membantu menurunkan biaya produksi dan dengan demikian mengurangi harga barang dan jasa, manfaat langsung bagi semua.

APEC juga bekerja untuk menciptakan lingkungan yang aman dan efisien pergerakan barang, jasa dan orang di seluruh di wilayah perbatasan melalui kebijakan ekonomi dan kesejajaran dan kerjasama teknis.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989. APEC menghasilkan “Deklarasi Bogor” pada KTT 1994 di

Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cukai hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik, untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020. Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan di Vancouver, Kanada.

Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica (gas air mata) untuk meredakan aksi para pengunjung rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Indonesia pada saat itu, dimana pada tahun 2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah, Riduan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melaksanakan serangan itu. Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC. KTT APEC kemudian terus berlanjut hingga kini.

Dilihat dari Latar Belakang Pembentukan APEC, Konferensi negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dilaksanakan atas prakarsa Australia pada bulan November 1989 di Canberra merupakan forum antar pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama “Asia Pacific Economic Cooperation” atau disingkat APEC.

Latar belakang berdirinya APEC ditandai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan, dan adanya perubahan berbagai situasi politik dan ekonomi dunia sejak pertengahan tahun 1980-an

Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi semakin mendorong percepatan perdagangan global yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat pada pasar uang, arus modal, dan meningkatnya kompetisi untuk memperoleh modal, tenaga kerja terampil, bahan baku, maupun pasar secara global. Globalisasi perdagangan ini mendorong meningkatnya kerja sama ekonomi di antara negara-negara sekawasan seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang menerapkan sistem pasar tunggal untuk Eropa; North American Free Trade Area (NAFTA) di kawasan Amerika Utara; ASEAN Free Trade Area (AFTA) di kawasan Asia Tenggara; dan Closer Economic Relations (CER) yang merupakan kerja sama ekonomi antara Australia dan Selandia Baru.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada dekade 80-an juga ditandai oleh berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan diikuti dengan berkurangnya persaingan persenjataan. Forum-forum internasional yang seringkali didominasi dengan pembahasan masalah pertahanan dan keamanan, mulai digantikan dengan pembahasan masalah-

masalah ekonomi dan perdagangan. Sejalan dengan perubahan tersebut, timbul pemikiran untuk mengalihkan dana yang semula digunakan untuk perlombaan senjata ke arah kegiatan yang dapat menunjang kerja sama ekonomi antar negara.

Kerja sama APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks dan di antaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif, sehingga diperlukan konsultasi dan kerja sama intra-regional. Anggota ekonomi APEC memiliki keragaman wilayah, kekayaan alam serta tingkat pembangunan ekonomi, sehingga pada tahun-tahun pertama, kegiatan APEC difokuskan secara luas pada pertukaran pandangan (exchange of views) dan pelaksanaan proyek-proyek yang didasarkan pada inisiatif-inisiatif dan kesepakatan para anggotanya.

Pada Konperensi Tingkat Menteri (KTM) I APEC di Canberra tahun 1989, telah disepakati bahwa APEC merupakan forum konsultasi yang longgar tanpa memberikan “Mandatory Consequences” kepada para anggotanya. Dari kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa APEC memiliki dua tujuan utama:

1. Mengupayakan terciptanya liberalisasi perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan multilateral yang sesuai dengan kerangka GATT dalam rangka memajukan proses kerja sama ekonomi Asia Pasifik dan perampungan yang positif atas perundingan Putaran Uruguay.
2. Membangun kerja sama praktis dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi, liberalisasi perdagangan, investasi, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerja sama perdagangan dan ekonomi. Pada pertemuan informal yang pertama para pemimpin APEC di Blake Island, Seattle, Amerika Serikat tahun 1993, ditetapkan suatu visi mengenai masyarakat ekonomi Asia Pasifik yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan; usaha kerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari perubahan-perubahan; pertukaran barang, jasa, investasi

secara bebas; pertumbuhan ekonomi dan standar hidup serta pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sekretariat APEC dibentuk pada tahun 1993. Para pegawai Sekretariat APEC terdiri atas 21 pejabat dari seluruh negara anggota ekonomi dan beberapa orang staf lokal. Sekretariat APEC dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan masa tugas satu tahun dan berasal dari negara anggota ekonomi yang sedang menjadi ketua APEC.

Indonesia menempatkan wakilnya di Sekretariat APEC dan mendapat tugas sebagai Direktur Bidang Gender dan Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME) sejak tahun 1998. Sekretariat APEC yang berdomisili di Singapura, dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam beberapa bidang yakni, Sekretariat APEC di bidang Committee on Trade and Investment (CTI), bidang Services, Tariff and Non Tariff Measures (NTMs), bidang Standards and Conformance (SCSC), bidang Customs Procedures (SCCP), bidang Intellectual Property Right (IPEG), Competition Policy, Government Procurement (GPEG), Deregulation, Rules of Origin, Dispute Mediation, Mobility of Business People, Implementation of Uruguay Round Outcomes (UR Outcomes), Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL), Economic Committee, Budget and Management Committee (BMC), Human Resources Development (HRD), Industrial Science and Technology (ISTWG), Marine Resource Conservation, Telecommunications, Tourism, Trade Promotion, Transportation, Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME), Agriculture Technical Cooperation Reports Group (ATC), APEC Study Centers, Sustainable Development, Infrastructure Workshop, Gender Issues Sustainable Recovery, Management Review, Electronic Commerce, APEC Food System, Public Affairs, Communications and Database.

Sekretariat APEC berfungsi untuk:

1. Menunjang mekanisme kegiatan APEC
2. Menyediakan “advisory” teknis untuk koordinasi pembinaan bidang perdagangan
3. Mengenalkan dan menginformasikan peranan APEC kepada masyarakat dunia

Dalam status keanggotaan, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerjasamanya. Keikutsertaan Indonesia dalam APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mengantisipasi dan

mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan nasional RI.

Kontribusi Indonesia terbesar bagi APEC adalah disepakatinya komitmen bersama yang dikenal juga sebagai “Tujuan Bogor” (Bogor Goals) yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Komitmen ini menjadi dasar dalam berbagai inisiatif untuk mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antar anggota APEC.

Manfaat APEC Bagi Indonesia adalah;

1. APEC merupakan forum yang fleksibel untuk membahas isu-isu ekonomi internasional.
2. APEC merupakan forum konsolidasi menuju era perdagangan terbuka dan sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral.
3. Peningkatan peran swasta dan masyarakat Indonesia menuju liberalisasi perdagangan

RANGKUMAN

3. Asia Pasifik adalah wilayah yang mencakup pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara dan Australia di dekat Laut Pasifik, ditambah negara-negara di laut Pasifik (Oseania). Walaupun deskripsi geografis kurang tepat, istilah Asia Pasifik menjadi dikenal pada sekitar tahun 1980-an sewaktu pertumbuhan ekonomi pada wilayah heterogen ini dalam hal perdagangan saham, perdagangan umum dan bentuk lain dari interaksi ekonomi dan politik.
4. APEC adalah satu-satunya pemerintahan antar kelompok di dunia yang beroperasi atas dasar komitmen yang tidak mengikat, dialog terbuka dan sama menghormati pandangan dari semua peserta. Tidak seperti WTO atau badan-badan perdagangan multilateral lainnya, APEC tidak memiliki kewajiban perjanjian yang diperlukan dari peserta. Keputusan yang dibuat dalam APEC yang dicapai dengan konsensus dan komitmen yang dilakukan secara sukarela.

PENUTUP

Tes Formatif

Jawablah soal-soal di bawah ini !

3. Jelaskan karakteristik umum negara-negara kerjasama Asia Pasifik. Bobot nilai 50.
4. Jelaskan peran strategis APEC bagi Indonesia. Bobot nilai 50

UMPAN BALIK

Setelah menjawab soal-soal di atas, cocokkanlah dengan kunci jawaban tes formatif yang ada di bagian akhir. Hitunglah jumlah jawaban yang benar kemudian gunakan rumus tingkat penguasaan, sebagai berikut :

Arti tingkat penguasaan yang dicapai adalah :

(Jumlah jawaban yang benar)

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{—————}}{2} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan yang dicapai adalah :

80 % - 100 % = Baik sekali

70 % - 79 % = Baik

60 % - 69 % = Cukup

< 60 % = Kurang

TINDAK LANJUT

Bila belum mencapai penguasaan 80 %, maka harus mempelajari kembali kegiatan belajar terutama bagian yang belum dikuasai, agar dapat menyelesaikan soal di atas. Jika telah dapat mencapai 80 % penguasaan, maka dapat melanjutkan ke pokok bahasan yang berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

Sukawarsini Djelantik, 2015. Asia-Pasifik : konflik, kerja sama, dan relasi. Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

BAB III.

APEC DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Materi pada Bab III ini mencakup APEC dan perkembangannya serta APEC dan mengatasi katahan pangan Indonesia. Dalam mempelajari bab III ini, nantinya mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti Tahapan kegiatan APEC telah berkembang dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerjasamanya , juga bagaimana para Menteri Pertanian Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang terdiri dari 21 anggota ekonomi sepakat untuk mengatasinya bersama melalui kerangka kerja sama yang disebut “*Strategic Framework For Rural-Urban Development and Food Security*” dalam kesempatan pertemuan *the Fourth Food Security Ministerial Meeting* (FSMM4) di Piura, Peru, pada tanggal 26-27 September 2016.

3.1. APEC dan Perkembangannya.

Kemajuan pesat yang dialami APEC tidak lepas dari dorongan politis langsung yang diberikan para Pemimpin melalui APEC Economic Leaders Meeting sejak AELM I di Blake Island, AS tahun 1993. Sejak saat itu, telah berlangsung 12 (dua belas) kali pertemuan. Namun demikian, AELM tahun 1993-1996 merupakan tahapan-tahapan penting yang menjadi dasar kerjasama APEC.

Tahapan kegiatan APEC telah berkembang dari perumusan visi di Blake ke tahapan target dan komitmen pada AELM II di Indonesia tahun 1994 yang mencatat momentum penting

dalam sejarah perkembangan APEC dengan disepakatinya Bogor Goals yang memuat kerangka waktu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi maju, dan 2020 untuk ekonomi berkembang.

Tiga unsur kerjasama APEC, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Para Pemimpin APEC di Bogor tersebut adalah:

1. strengthening the open multilateral trading system
2. enhancing trade and investment liberalization in the Asia-Pacific; dan
3. intensifying Asia-Pacific development cooperation.

Dimasukkannya wacana mengenai kerjasama pembangunan Asia Pasifik (butir 3) merupakan inisiatif Indonesia. Tujuannya, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Bogor, adalah untuk mendorong negara anggota APEC untuk mengembangkan sumber daya alam maupun manusia di kawasan Asia dan Pasifik guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pembangunan yang merata dengan mengurangi jurang ekonomi di antara para anggota APEC.

Selanjutnya, pada Pertemuan Pemimpin APEC di Osaka, Jepang tahun 1995, dicatat beberapa perkembangan penting di APEC, antara lain;

1. Deklarasi tiga pilar kerjasama APEC berdasarkan Deklarasi Bogor, yaitu liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi (lebih dikenal sebagai pilar TILF/Trade and Investment Liberalization and Facilitation), serta pilar Economic and Technical Cooperation (ECOTECH);
2. penetapan Osaka Action Agenda (OAA), yang merupakan cetak biru liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi untuk mengarahkan kerjasama ekonomi dan teknik. OAA digunakan sebagai ukuran dalam perancangan rencana kerja dan proyek-proyek APEC, dan terbagi atas: Bagian Pertama yang memuat elaborasi kerja di bawah pilar Trade and Investment Liberalization Facilitation (TILF); dan Bagian Kedua, yang memuat rencana kerja dalam kerangka ECOTECH dan menetapkan bidang-bidang kerjasama sesuai dengan Working Group.

Pada tahun 1996 di Manila, dihasilkan pijakan penting untuk pilar ECOTECH, yaitu deklarasi para pemimpin APEC mengenai Framework for Strengthening Economic Cooperation and Development, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai MAPA (Manila APEC Plan of

Action). MAPA menetapkan enam wilayah prioritas kerjasama di bawah pilar ECOTECH, yaitu: (1) pengembangan modal sumber daya manusia, (2) menciptakan pasar modal yang aman dan efisien, (3) memperkuat infrastruktur ekonomi, (4) merancang teknologi untuk masa depan, (5) mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, serta (6) membangun dasar bagi dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM).

Pada tahun 1997 di Vancouver, Canada, APEC menghasilkan proposal untuk Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL) di 15 sektor dan memutuskan agar update Individual Action Plans (IAP) atau Rencana Aksi Individu (RAI) harus dilakukan setiap tahunnya.

Pada tahun 1998 di Kuala Lumpur, Malaysia, APEC menyetujui 9 sektor EVSL dan mendorong persetujuan atas EVSL dari non-APEC members pada tingkat World Trade Organization.

Pada tahun 1999 di Auckland, New Zealand, anggota APEC menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan paperless trading pada tahun 2005 untuk developed economies dan tahun 2010 untuk developing economies. Pertemuan juga menyetujui skema APEC Business Travel Card serta menghasilkan Mutual Recognition Arrangement on Electrical Equipment dan Framework for the Integration Women in APEC.

Pada tahun 2000 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, APEC menghasilkan electronic Individual Action Plan (e-IAP) system yang memungkinkan pemantauan IAP secara online sekaligus meningkatkan akses internet di kawasan APEC tiga kali lipat hingga tahun 2005.

Pada tahun 2001 di Shanghai, Republik Rakyat Cina, APEC mengadopsi Shanghai Accord, yang terfokus pada perluasan Visi APEC, memperjelas Roadmap to Bogor dan memperkuat mekanisme implementasi. Pertemuan juga mengadopsi e-APEC Strategy, yang menentukan agenda untuk memperkuat market structures and institutions, memfasilitasi investasi infrastruktur dan teknologi untuk transaksi secara on-line serta mendorong kewirausahaan dan capacity building. Pertemuan di Shanghai menghasilkan Counter-Terrorism Statement APEC yang pertama dan merupakan awal pembahasan isu keamanan dalam APEC.

Pertemuan pada tahun 2002 di Los Cabos, Meksiko berhasil mengadopsi Trade Facilitation Action Plan, Policies on Trade and the Digital Economy and Transparency Standards. Pertemuan menghasilkan pula Counter-Terrorism Statement yang kedua dan mengadopsi inisiatif Secure Trade in the APEC Region (STAR).

Pada tahun 2003 di Bangkok, Thailand, pertemuan sepakat untuk mendorong negosiasi WTO Doha Development Agenda (WTO DDA) dan melihat bahwa Free Trade Agreements, Regional Trade Agreements, Bogor Goals dan system perdagangan multilateral di bawah skema WTO yang pada prinsipnya bersifat saling komplementer.

Pertemuan ke-12 Para Pemimpin Ekonomi APEC yang diselenggarakan di Santiago, Chile, tanggal 20 – 21 November 2004, telah menghasilkan Deklarasi para Pemimpin yang berjudul: Santiago Declaration: “One Community, Our Future”. Sedangkan Pertemuan Tingkat Menteri (APEC Ministerial Meeting/AMM) telah menghasilkan Joint Ministerial Statement AMM ke-16.

Pada tahun 2005 di Busan, Korea Selatan, Para Pemimpin Ekonomi APEC sepakat untuk meluncurkan ”Busan Roadmap to Bogor Goals”, melakukan Mid-Term Stock Take/ evaluasi atas capaian anggota ekonomi APEC dalam merealisasikan Bogor Goals. Selain itu, para Pemimpin Ekonomi APEC juga mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang berisi dukungan kuat APEC atas penyelesaian negosiasi Doha Development Agenda di WTO.

3.2. Perkembangan Terakhir APEC

Pada kondisi saat ini, ekonomi yang menjadi host APEC adalah Vietnam. Tema yang diambil untuk penyelenggaraan APEC tahun ini adalah “Towards a Dynamic Community for Sustainable Development and Prosperity” dengan Sub Tema “Enhancing Trade and Investment with the Busan Roadmap and Doha Development Agenda, Strengthening Economic and Technical Cooperation for Gap Bridging and Sustainable Development, Improving Secure and Favorable Business Environment, Promoting Community Linkages.”

Sebagai perwujudan tema tersebut, telah ditetapkan 8 prioritas APEC 2006 sebagai berikut:

1. Mendorong kerjasama APEC untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, melalui Dukungan APEC terhadap WTO atau Doha Development Agenda (Support for the WTO DDA) Pengimplementasian Busan Roadmap to Bogor Goals.
2. Meningkatkan daya saing dari Usaha Kecil dan Menengah.
3. Mendorong pemerataan kapasitas antar anggota Ekonomi APEC melalui pembangunan sumber daya manusia, Kerjasama di bidang IT, dan kemitraan untuk pembangunan.

4. Meningkatkan human security: Counter terrorism, health security, Disaster Preparedness dan Energy Security.
5. Mendukung anti korupsi dan transparansi.
6. Menghubungkan anggota-anggota Ekonomi APEC melalui pariwisata dan pertukaran kebudayaan.
7. Mereformasi APEC menjadi organisasi yang lebih dinamis dan efektif.
8. Mendorong komunikasi lintas budaya (Cross-cultural Communication)

Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerjasamanya. Keikutsertaan Indonesia dalam APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan nasional RI. Menjadi anggota APEC merupakan salah satu peran Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam APEC didasari oleh keperluan mengantisipasi dan mengamankan kepentingan nasional di era perdagangan bebas dan investasi Asia Pasifik

Kontribusi Indonesia terbesar bagi APEC adalah disepakatinya komitmen bersama yang dikenal juga sebagai 'Tujuan Bogor' (Bogor Goals) yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Komitmen ini menjadi dasar dalam berbagai inisiatif untuk mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antar anggota APEC.

Manfaat APEC bagi Indonesia

1. APEC merupakan forum yang fleksibel untuk membahas isu-isu ekonomi internasional.
2. APEC merupakan forum konsolidasi menuju era perdagangan terbuka dan sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral.
3. Peningkatan peran swasta dan masyarakat Indonesia menuju liberalisasi perdagangan
Salah satu pilar APEC yaitu fasilitasi perdagangan dan investasi secara langsung akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha di Indonesia yakni kemudahan arus barang dan jasa dari Indonesia ke anggota APEC lainnya. Beberapa inisiatif APEC yang memberikan manfaat kepada dunia usaha di Indonesia antara lain melalui pelaksanaan APEC Business Travel Card (ABTC) serta penyederhanaan prosedur kepabeanan.

4. Peningkatan Human and Capacity Building Indonesia dapat memanfaatkan proyek-proyek APEC untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan sumber daya manusia, baik yang disponsori oleh anggota ekonomi tertentu maupun melalui skema APEC.
5. Sumber peningkatan potensi ekonomi perdagangan dan investasi Indonesia Pembentukan APEC telah memberikan manfaat terhadap peningkatan arus barang, jasa maupun pertumbuhan ekonomi negara anggota APEC. Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan potensi pasar APEC bagi peningkatan ekspor maupun arus investasi, khususnya karena mitra dagang utama Indonesia sebagian besar berasal dari kawasan APEC.
6. APEC sebagai forum untuk bertukar pengalaman Forum APEC yang pada umumnya berbentuk “policy dialogue” memiliki manfaat yang sangat besar terutama untuk menarik pelajaran dan pengalaman positif maupun negatif (best practices) anggota APEC lainnya dalam hal pengambilan dan pembuatan kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi.
7. Memproyeksikan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam konteks ekonomi internasional.
8. APEC merupakan salah satu forum yang memungkinkan Indonesia untuk memproyeksikan kepentingan-kepentingannya dan mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka.

Selama tergabung dalam APEC, Indonesia mampu meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasional. Hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional. Biaya transaksi bisnis di Asia Pasifik berkurang sekitar 5% berkat APEC Trade Facilitation Action Plan. Pihak swasta di Indonesia diuntungkan dengan liberalisasi perdagangan.

3.3. APEC dan Mengatasi Ketahanan Pangan Indonesia.

Terdapat tiga hal yang menghambat ketahanan pangan saat ini, yaitu rendahnya akses pasar produk pangan, perubahan iklim, dan pembangunan pedesaan – perkotaan yang tidak bersinergi. Untuk itu, para Menteri Pertanian Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang terdiri dari 21 anggota ekonomi sepakat untuk mengatasinya bersama melalui kerangka kerja sama yang disebut “Strategic Framework For Rural-Urban Development and Food Security”

dalam kesempatan pertemuan the Fourth Food Security Ministerial Meeting (FSMM4) di Piura, Peru, pada tanggal 26-27 September 2016.

Tanpa ketahanan pangan permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kelaparan akan menjadi hambatan besar untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif sebagaimana yang dicitakan oleh seluruh bangsa. Indonesia sendiri yang pada masanya pernah mencapai swasembada pangan, sangat merasakan tantangan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan meningkatnya arus urbanisasi yang memperlemah ketahanan pangan. Karena itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus untuk kembali mencapai swasembada dengan program Upaya Khusus Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai).

Kemudahan lintas perdagangan produk pangan memiliki peran dalam meningkatkan ketahanan pangan, namun berdasarkan prediksi WTO pertumbuhan perdagangan tahun 2016 hanya 1.7%, lebih rendah dari angka prediksi pertumbuhan ekonomi dunia 3.4% (IMF, 2016).

Kegagalan untuk mengantisipasi perubahan iklim mengakibatkan terjadinya kegagalan panen di beberapa wilayah APEC. Dan pertumbuhan desa dan kota yang tidak bersinergi mengakibatkan permintaan pangan lebih besar dari pada produksinya. Berdasarkan data APEC, jumlah penduduk Asia Pasifik yang tinggal di wilayah urban saat ini mencapai 60%.

Untuk itu, dalam kerangka kerja sama strategik tersebut, APEC sepakat untuk membuat aksi nyata dalam membangun rural-urban secara bersinergi dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan. Aksi nyata akan dilakukan secara holistik dan menyeluruh mencakup aspek ekonomi untuk meningkatkan perdagangan, penanggulangan dampak perubahan iklim, antisipasi dinamika dampak perubahan sosial dan reformasi struktural.

Menurut Duta Besar RI di Lima, Moenir Ari Soeananda dalam intervensinya selaku ketua Delri mewakili Menteri Pertanian RI pada FSMM4, Indonesia akan mensinergikan pembangunan di pedesaan secara holistik, dan mengusulkan agar seluruh pemerintah APEC terus membantu petani dan nelayan kecil untuk meningkatkan ketahanan pangan. Merevitalisasi fungsi lahan di daerah pedesaan untuk kegiatan bertani dan menjaga ekosistem lingkungan.

Lebih lanjut, Indonesia mengajak seluruh ekonomi APEC untuk mengutamakan tujuan SDGs terkait pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan dalam agenda pembangunannya. “Strategic Framework For Rural-Urban Development and Food Security”, akan memberi akses pasar lebih luas di wilayah Asia Pasifik bagi komoditas pertanian dan perikanan Indonesia yang akan berdampak pada pembangunan pedesaan.

RANGKUMAN

1. Forum Kerjasama Ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation-APEC) dibentuk pada tahun 1989 berdasarkan gagasan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Menjadi anggota APEC merupakan salah satu peran Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam APEC didasari oleh keperluan mengantisipasi dan mengamankan kepentingan nasional di era perdagangan bebas dan investasi Asia Pasifik.
2. Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik , Asia-Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC adalah forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik, dimana Keanggotaan dalam APEC akan bermanfaat bagi ekonomi berkembang di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia karena akan membantu upaya-upaya ekonomi untuk melakukan perbaikan dalam infrastruktur perekonomiannya, meningkatkan industrialisasinya dan memfasilitasi transfer teknologi yang dibutuhkan dalam era globalisasi.

PENUTUP

Tes Formatif

Jawablah soal-soal di bawah ini !

5. Jelaskan Apakah APEC menguntungkan bagi Indonesia?. Bobot nilai 50.
6. Jelaskan Mengapa keanggotaan APEC disebut ekonomi?. Bobot nilai 50

UMPAN BALIK

Setelah menjawab soal-soal di atas, cocokkanlah dengan kunci jawaban tes formatif yang ada di bagian akhir. Hitunglah jumlah jawaban yang benar kemudian gunakan rumus tingkat penguasaan, sebagai berikut :

Arti tingkat penguasaan yang dicapai adalah :

(Jumlah jawaban yang benar)

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{2} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan yang dicapai adalah :

80 % - 100 % = Baik sekali

70 % - 79 % = Baik

60 % - 69 % = Cukup

< 60 % = Kurang

TINDAK LANJUT

Bila belum mencapai penguasaan 80 %, maka harus mempelajari kembali kegiatan belajar terutama bagian yang belum dikuasai, agar dapat menyelesaikan soal di atas. Jika telah dapat mencapai 80 % penguasaan, maka dapat melanjutkan ke pokok bahasan yang berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

Sukawarsini Djelantik, 2015. Asia-Pasifik : konflik, kerja sama, dan relasi. Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

BAB IV.
**PEMBANGUNAN EKONOMI DAN JARINGAN BISNIS DI KAWASAN
PASIFIK**

Materi pada bab IV ini mencakup penanaman modal di Taiwan dan asal usul sosialnya, kelompok Bisnis dalam lingkungan dinamis : Hongkong, jaringan dagang regional jeruk mandarin : Bisnis Cina dan campur tangan pemerintah Malaysia, kapitalisme negara : perusahaan multinasional dan pengusaha etnis Cina di Singapura, serta pergeseran global kekuatan ekonomi menuju kawasan Asia Pasifik.

Dalam mempelajari bab IV ini, mahasiswa akan dapat mengetahui jaringan-jaringan bisnis di Kawasan Pasifik dan perusahaan-perusahaan multinasional disamping itu setelah menjadi sarjana peternakan sebagai pelaku bisnis atau mengajar pemasaran dapat mengetahui peluang-peluang pasar baik secara nasional maupun internasional. Untuk itu sebaliknya mahasiswa sudah mempelajari mata kuliah ekonomi mikro dan makro dengan mempelajari bab II ini memudahkan anda untuk mempelajari bab-bab selanjutnya dalam mata kuliah kepasifikan.

Pada akhir perkuliahan materi kepasifikan, diharapkan anda dapat mengaplikasikan kepasifikan dalam pembangunan ekonomi peternakan. Dan pada akhir

perkuliahan materi bab II ini diharapkan anda dapat menguraikan pembangunan ekonomi dan jaringan bisnis kawasan pasifik.

4.1. Peranan Modal di Taiwan dan Asal-usul Sosialnya.

a. Manajemen Perputaran Modal

Di Taiwan ternyata sektor keuangan formal dan informal berjalan beringan. Sekarang sudah saatnya kita menganalisis hubungan antara perusahaan dan sistem keuangan secara keseluruhan, dan pengaruh hubungan tersebut pada pengelolaan sumber-sumber modal perusahaan Taiwan. Sejauh ini kita sudah mendiskusikan segi statis dari modal perusahaan, yaitu masalah pembentukan modal. Sekarang yang menjadi target pembicaraan kita adalah masalah perputaran modal dalam operasi bisnis sehari-hari.

Kita akan mulai dari sektor keuangan formal karena ini yang menjadi basis terpenting dari modal perusahaan di kebanyakan masyarakat kapitalis. Pada umumnya, saluran-saluran formal terdiri dari agen-agen keuangan, terutama bank. Para periset selalu mengkritik agen-agen keuangan di Taiwan sebagai "kerjai-kerjai mortgage yang pada prakteknya membatasi tersedianya modal bagi perusahaan. Dad sebutan tersebut kita sudah bisa membayangkan praktek dunia perbankan di Taiwan Tetapi bila kita tidak langsung mengkritik tetapi memandang agen-agen ini sebagai sebuah organisasi sosial, kita akan mendapat interpretasi yang sedikit berbeda. -

Setiap organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial eksternalnya. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, organisasi selalu mempertimbangkan berbagai faktor dan pendinan yang diambil yang bisa berbeda-beda, bahkan ketika dihadapkan pada masalah yang sama. Organisasi mempunyai gaya dan cara yang berbeda-beda dalam melakukan aktivitasnya. Karena itu, untuk memahami organisasi-organisasi bank, kita harus mengamati peran-peran yang mereka rancang sendiri untuk dipraktekkan dalam operasi praktis, dan tata perilaku yang muncul dari peran-peran tersebut.

Kecuali beberapa bank yang sebagian sahamnya dimiliki swasta, sebagian besar bank di Taiwan dijalankan oleh pemerintah. Hal ini sangat mempengaruhi citra dari mereka. Kalau bank dioperasikan pemerintah, dia menjadi alat kebijakan pemerintah. Dari pihak pemerintah, bank merupakan unit administrasi dari sebuah mesin politik.

Seorang manajer umum sebuah bank berkata kepada kami bahwa "Bank adalah untuk kepentingan umum". Sikap ini berbeda dengan sikap perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba. Lebih dari itu, para pegawai bank adalah pegawai negeri.¹¹

Promosi, penghargaan, dan sanksi diatur oleh hukum-hukum pegawai negeri. Akibatnya bank sangat rentan terhadap tekanan politik dari pemerintah. Kita dapat melihat beberapa contoh dari tekanan tersebut di bawah ini.

Menurut hasil wawancara kami, di Taiwan rasio pinjaman terhadap aset total bank tidak boleh lebih dari 60-70 persen¹³, padahal rasio bankbank di Barat bisa sampai 100 persen atau lebih. Apabila rasio bank Taiwan naik melebihi angka di atas, Bank Sentral akan menganggap bank tersebut "tidak taat" dan kemudian menjatuhkan sanksi. Seorang manajer umum sebuah bank berkata bahwa apabila rasio pinjaman terhadap aset meningkat, "Menteri Keuangan menganggap bank tersebut tidak sehat dan tidak stabil".¹⁴ Selain Bank Sentral dan Menteri Keuangan, badan-badan yang dipilih melalui pemungutan suara seperti Lembaga Legislatif Yuan dan Provincial Assembly juga dapat melakukan tekanan pada bank dengan jalan memeriksa budget mereka. Tak terelakkan bahwa bank yang dioperasikan oleh pemerintah akan mengalami berbagai tekanan dan pengaruh politik seperti itu. Akan tetapi bank juga harus dinilai sebagai organisasi yang menghasilkan laba, dan hal ini mempengaruhi praktek perbankan. Sebagian besar laba berasal dari perbedaan antara pinjaman dan tabungan. Karena bank merupakan monopoli di Taiwan, kita bisa melihat sisi monopoli tersebut dalam tata cara Pemberian kredit bisnis.

Bank memang menaruh perhatian pada laba, tetapi bank sebetulnya lebih menitikberatkan pada kemungkinan pengembalian kredit. Kredit macet merupakan bukti buruknya penilaian bisnis dan mengundang investigasi pemerintah. Banyaknya kredit macet akan merugikan bank dan reputasi pegawai bank yang bertanggung jawab atas kredit-kredit tersebut. Karena itu, di samping meneliti besarnya modal yang dimiliki oleh pengusaha yang mengajukan pinjaman, neraca rugi laba perusahaannya selama tiga tahun terakhir, dan prospek usahanya, bank juga menanyakan apakah calon peminjam mempunyai cukup aset untuk dijadikan jaminan. Kontras dengan sistem Barat yang mempunyai sanksi-sanksi yang jelas yang dipakai untuk menjamin pengembalian utang, bank-bank di Taiwan tidak bisa mengandalkan hal yang sama. Akibatnya bank cenderung

bertindak sangat konservatif. Tampaknya inilah yang dikehendaki oleh pemerintah yang mengatakan bahwa bank harus mempunyai manajemen yang "sehat dan mapan".

Akibatnya, pengusaha Taiwan sangat sulit mengandalkan bank sebagai sumber investasi dan modal operasional mereka. Bisnis swasta tidak menganggap diri sebagai bagian dari sistem keuangan formal. Pertama-tama, mereka tidak merasa mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintah, dan kenyataannya pemerintah memang tidak banyak melakukan campur tangan. Kedua, perusahaan-perusahaan di Taiwan juga tidak menduduki posisi-posisi oligarkis di pasar. Sebaliknya, terjadi persaingan di antara mereka. Ketiga, tepatnya pemilihan waktu dan efisiensi dalam operasi bisnis merupakan hal yang penting bagi perusahaan-perusahaan pemburu laba ini. Karena faktor-faktor di atas, kekonservatifan bank jelas membatasi persediaan dan perputaran modal perusahaan yang berasal dari sektor formal.

Bagi Weber (1978, hlm. 107-109, 161-166), bisa diperhitungkan dan diramalkannya lingkungan-lingkungan sosial merupakan landasan yang penting bagi perkembangan perusahaan dan "pitalisme. Meskipun agen-agen keuangan formal di Taiwan memang dapat diperhitungkan dan diramalkan, kemungkinan adanya intervensi politik dari pemerintah membuat bank, dilihat dari sudut pandang Weberian, cenderung tidak lagi menjadi pilihan "rasional" sebagai sumber modal. Bank tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan akan efisiensi yang dibutuhkan untuk sukses dalam lingkungan pasar yang amat kompetitif. Pinjaman-pinjaman bank kebanyakan berbentuk mortgage, dan dengan demikian acia prosedur yang harus dilalui dan jangka waktu. yang dipakai untuk menguji serta mengevaluasi keselamatan perijaman Perusahaan-perusahaan oleh Taiwan harus memperlutungkan hambatan-hambatan tersebut.

Masalahnya bukan karena perusahaan-perusahaan di Taiwan tidak bisa memperoleh pinjaman, tetapi lebih karena mereka tidak bisa mendapat pinjaman tepat pada waktunya. Bila ada krisis atau kesempatan bisnis mendadak, perusahaan harus mencari alternatif sumber dana selain bank. Sektor keuangan informal dapat memenuhi permintaan tersebut. Sektor informal ini mencakup modal yang berasal dari keluarga dan teman, dari asosiasi-asosiasi gotong royong dan dari real estate. Seorang pengusaha juga bisa mengandalkan "keuangan bawah tanah" seperti "kerja-kerja mortgage". Karena peminjaman ini didasarkan pada koneksi yang didasarkan pada kepercayaan pribadi,

uang dapat dimobilisasi dengan cepat. Salah seorang yang kain wawancarai mengatakan bahwa "bantuan dan saudara, teman, dan orang tua tetap merupakan hal yang paling diandalkan dalam keadaan darurat". Para pengusaha memperlakukan sumber keuangan bawah tanah sebagai pilihan terakhir, yaitu bila sumber-sumber lain tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sumber keuangan bawah tanah tersebut tetap menuntut jaminan, tetapi prosesnya jauh lebih cepat dibanding bank-bank formal. Sektor informallah yang memainkan peran penting dalam pengelolaan modal perusahaan.

Sejauh ini kita telah mendiskusikan hubungan antara bank dan perusahaan pada tingkat umum. Diskusi selanjutnya akan membahas Secara lebih kongkret perbedaan yang berasal dari variasi skala perusahaan. Pada umumnya, perusahaan besar mempunyai kebutuhan finansial yang besar yang biasanya kurang bisa dipenuhi oleh anggota keluarga dan teman. Karena itu, perusahaan besar harus lebih mengandalkan agen-agen keuangan formal. Bank sendiri lebih suka memberi pinjaman kepada perusahaan yang sehat dan berprospek cerah, yang biasanya merupakan perusahaan skala besar atau merupakan anggota sebuah kelompok bisnis. Perusahaan semacam itu biasanya menjadi rebutan bank-bank pemerintah, yang pada saat yang sama menelantarkan perusahaan skala menengah dan kecil.

Besar-kecilnya perusahaan secara langsung mempengaruhi tersedianya modal yang dipinjamkan oleh bank. Hal ini untuk menjamin pengembalian pinjaman. Tetapi kalau dilihat dari sudut laba bank, ceritanya lain lagi. Perusahaan besar biasanya meminta potongan tingkat bunga atau keringanan lainnya yang pada akhirnya mengurangi laba bank. Menurut manajer bank yang kami wawancarai, laba tertinggi biasanya justru berasal dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan menengah dan kecil yang sehat. Kebijakan bank tersebut mengundang kritik bahwa bank hanya membantu pengusaha kaya dan menelantarkan pengusaha miskin.

Meskipun ada perbedaan kemampuan perusahaan dalam memperoleh modal, yaitu tergantung dari besar-kecilnya usaha mereka, ada juga persamaan di antara semua perusahaan. Ketika sebuah perusahaan menjalin hubungan dengan bank, hubungan tersebut selalu dijalin melalui introduksi seseorang. Yang memperkenalkan klien baru bisa klien lama bank tersebut, seorang pejabat bank, atau pejabat pemerintah. Beberapa orang yang diwawancarai menegaskan bahwa introduksi oleh klien lamalah yang paling

dihargai oleh bank. Sekali lagi kita melihat pentingnya hubungan pribadi dalam menjalin kepercayaan.

Meskipun bukan merupakan kondisi yang cukup untuk memberi pinjaman, hubungan pribadi merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Adanya jaminan pribadi tersebut menguntungkan bank karena yang mengintroduksi menjamin bahwa pemohon kredit tersebut bisa dipercaya, dan dengan demikian menciptakan garansi keuangan ganda. Karena itu tingkat pengembalian pinjaman pengusaha yang diperkenalkan oleh klien lama lebih tinggi daripada Yang diperkenalkan oleh pengusaha yang bukan merupakan klien bank tersebut.

b. Aspek Sosial dari Perputaran Modal Kepercayaan Pribadi

Kita melihat di satu pihak perusahaan Barat adalah badan yang ditata oleh hukum dan mereka mengandalkan sumber kredit dari sektor keuangan formal, yaitu dari bank dan pasar modal. Di lain pihak, perusahaan Taiwan merupakan yang ditata oleh sistem sosial dan mereka memobilisasikan modal dari masyarakat, terutama dari keluarga. Perbedaan mereka terletak pada cara mobilisasi dan mempertahankan modal. Pada dasarnya, perbedaan-perbedaan cara ini mengungkapkan basis sosial yang unik yang melandasi operasi bisnis mereka. Di Barat, landasannya adalah kredit yang terjamin. Sedang di Taiwan landasannya adalah kepercayaan pribadi.

Tentu saja, tidak mungkin sebuah perusahaan di Taiwan bisa berhasil kalau sama sekali tidak mempunyai relasi dengan bank. Tetapi seperti yang sudah kita lihat, tidak mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan cukup pinjaman dari bank untuk memulai bisnis, kecuali kalau bank tersebut mendapat jaminan. Dengan kata lain, pinjaman pada dasarnya adalah mortgage dan bukannya kredit. Meskipun begitu, di samping pinjaman mortgage memang ada aturan main untuk pinjaman tanpa jaminan dalam sistem perbankan Taiwan. Tetapi sektor keuangan formal lebih cenderung menggunakan pinjaman mortgage, dan kecenderungan tersebut harus dicari penjelasannya dalam perputaran modal sehari-hari, dan bukannya dalam sistem perbankan itu sendiri. Kecenderungan itu berhubungan dengan kebiasaan dan basis sosial utama dari perputaran modal dalam masyarakat ini.

Orang Taiwan biasanya meminjam uang dari saudara dan teman, dan bukannya dari bank. Mereka memang menabung dalam bank, tetapi pada dasarnya tidak meminjam uang dari sana. "Asosiasi gotong royong", yang dalam bahasa Cinanya disebut Hui, merupakan contoh yang pas (Isau, 1980). Dilihat dari definisinya, tujuan hui adalah memberikan modal kepada yang memerlukan. Hui adalah asosiasi gotong royong. Hui tidak bersifat permanen, dan biasanya bertahan selama dua sampai tiga tahun. Keluarga biasanya juga memanfaatkan hui, dan setiap keluarga biasanya sekaligus bergabung dengan beberapa asosiasi seperti ini. Karena menyebar sedemikian Was, hui merupakan satu sarana utama perputaran modal dan penyimpanan uang.

Syarat dasar dari asosiasi tersebut adalah adanya sekelompok manusia yang diikat kepercayaan pribadi. Anggotanya bisa terdiri dari anggota keluarga, teman, tetangga, dan rekan sejawat. Jarang ada orang asing yang diikutkan. Hak dan kewajiban anggota hui didasarkan pada kepercayaan pribadi. Tidak ada undang-undang formal atau badan administratif yang memastikan para anggota hui memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Karena itu kalau terjadi kebangkrutan (yang memang bisa terjadi) atau uangnya digelapkan oleh koordinator hui (yang juga memang terjadi), para anggota harus memecahkan masalah dengan melakukan tawar-menawar dengan orang yang bangkrut atau dengan koordinator yang menggelapkan uang. Seringkali mereka cuma bisa mengeluh pahit. Tidak ada hukum yang menjamin.

Kita juga bisa melihat pasar-pasar modal informal ini dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah undian di Taiwan. Yang menduduki posisi kunci dalam undian ini disebut tzutou, yang perannya mirip dengan koordinator hui. Posisi kunci lainnya dipegang oleh chuchia, yang berdasarkan koneksi pribadinya memperkenalkan anggota-anggota baru (chuyuan). Jadi undian tersebut merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai jaringan yang terkait secara pribadi, dan didasarkan pada ikatan sosial. Di situ mereka bermain untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, undian ini merupakan permainan pertukaran uang yang didasarkan pada koneksi-koneksi pribadi.

Pasar modal di Taiwan merupakan contoh yang serupa. Antara 1985-1989, 4 juta investor, atau lebih dari 25 persen dari keseluruhan populasi Taiwan, menanamkan uang di pasar modal. Banyaknya orang yang menanamkan uang di pasar modal bisa dijelaskan

oleh banyak faktor, tetapi tingginya peningkatan penanaman modal dan dinamika pasar modal paling tepat dijelaskan dengan koneksi-koneksi pribadi di antara para investor. Bagi yang ingin memasuki atau berspekulasi di pasar modal, syarat utamanya bukanlah prestasi kredit atau besarnya kekayaan pribadinya, tetapi apakah ada orang yang bisa memperkenalkannya kepada seorang stock jobber yang sekaligus menjadi stock broker. Lebih dari itu, karena adanya demam pasar modal yang mencekam Taiwan, para stock broker dengan aktif memanfaatkan jaringan-jaringan pribadi mereka, yang pada gilirannya semakin menaikkan suhu pasar modal. Jaringan-jaringan koneksi pribadi inilah yang memobilisasi lebih dari 4 juta orang dalam waktu cepat. Meskipun jaringan-jaringan ini tidak mempunyai kedudukan hukum, mereka merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, dan menjadi basis tatanan sosial di Taiwan."

Gejala yang sama juga muncul dalam kegiatan pasar sehari-hari. Tawar-menawar harga terjadi di pasar, toko, dan department store. Pada dasarnya tawar-menawar menunjukkan tidak adanya aturan obyektif dan formal yang menjadi kriteria penentuan harga. Bukan berarti tidak ada hukum yang mengatur transaksi tersebut. Selalu ada harga-harga yang seragam dan tetap untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ini berlaku bahkan bagi sebagian besar konsumen yang tidak mempunyai hubungan atau bahkan tidak kenal dengan pemilik toko. Tetapi bagi langganan tetap, penjual selalu memberi potongan harga atau persenan lain. Alasan pemberian potongan tersebut adalah bahwa koneksi pribadi harus masuk dalam pertimbangan bisnis. Karena itu, tiap kali orang Cina membutuhkan barang sehari-hari, mereka cenderung pergi ke tempat yang sama. Mereka pergi ke dokter, ke tempat reparasi perabotan, ke restoran, membeli kebutuhan sehari-hari dan real estate dari pedagang-pedagang yang sama yang pertamanya dikenalkan kepada mereka. Pendek kata, perasaan terbiasa ini merasuki hampir segala aspek kehidupan sehari-hari. Kuncinya bukanlah mencari lembaga, tetapi mencari orang yang dikenal. Ketika transaksi terjadi, pelanggan merasa bahwa harga yang dibayar adalah wajar, meskipun dia tidak mendapat potongan. Lebih penting dari itu, pelanggan merasa kualitas barang terjamin dan dia akan mendapat pelayanan purna jual yang lebih baik. Meskipun keuntungan dari transaksi-transaksi ini bisa jadi tidak sebanyak yang dibayangkan pelanggan, sentimen dan kebiasaan yang dilanggengkan melalui tawar-menawar tampak nyata di mana-mana.

Sejauh ini saya menekankan fungsi kepercayaan pribadi dalam berbagai transaksi. Tentu saja ada faktor-faktor lain yang juga penting. Kepentingan-kepentingan praktis dan keinginan akan laba, tidak bisa diabaikan. Misalnya, bunga yang diperoleh dari simpanan di bank lebih rendah daripada yang bisa diperoleh dari kegiatan hui.

Demikian juga koneksi pribadi merupakan jalan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Kepentingan-kepentingan praktis seperti itu bisa dijumpai di setiap masyarakat, tetapi hanya di Taiwan kepercayaan pribadi mempunyai peran yang sangat penting dalam perputaran modal.

Kepercayaan pribadi terkadang lebih penting dari sekedar kepentingan-kepentingan praktis. Misalnya, dalam keadaan darurat, orang akan meminjamkan uang tanpa bunga dengan tujuan menolong. Karena bagi orang Cina koneksi pribadi merupakan hubungan jangka panjang, perolehan dan kehilangan tidak dapat dihitung dalam jangka pendek, apalagi dipandang sebagai untung-rugi. Aspek ini masuk ke segala sudut kehidupan sehari-hari di Taiwan.

c. Tabungan Keluarga Minimum

Apabila, kepercayaan pribadi menjadi basis perputaran modal di Taiwan, wajar dan bisa dimengerti kalau struktur modal di perusahaan-perusahaan Taiwan mengandalkan koneksi pribadi secara intensif. Yang menjadi pertanyaan adalah: bagaimana mungkin keluarga, saudara, dan teman mengakumulasi modal? Pendek kata kita bertanya bagaimana proses; terbentuknya kekayaan dan bagaimana hubungan antara kekayaan dengan pendapatan nasional dan tingkat pajak di masyarakat Taiwan.

Di Taiwan tingkat pajak berkisar 20 persen, sedang tingkat pajak di negara-negara Barat mencapai 30 persen.¹⁸ Karena tingkat pajak relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Barat, orang Taiwan mempunyai lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Lebih dari itu, pada tahun 1988 pendapatan per kapita di Taiwan mencapai 6.800 dolar AS,¹⁹ dan ini meningkatkan jumlah uang yang dipegang individu. Tetapi mempunyai uang tidak berarti mengakumulasikan uang.

Itu tergantung penggunaan uang tersebut. Asuransi dan jaminan sosial belum mapan di Taiwan (Peng, 1984). Orang tahu bahwa mereka sendiri harus menanggung kebutuhan tersebut, baik dalam keadaan mapan maupun dalam situasi darurat. Di

samping itu, biasanya keluarga Cina mengongkosi pendidikan, perkawinan dan bahkan perusahaan anak-anaknya (Liu dan Wang, 1986). Sisa uang setelah belanja sehari-hari saya sebut "tabungan minimum keluarga". Tabungan ini besarnya tidak tentu, dan lebih merupakan desakan sosial-psikologis bahwa sebagian dari penghasilan harus ditabung. Jumlah tabungan untuk anak dan hari tua dapat diperkirakan, tetapi tabungan untuk keadaan darurat sulit ditaksir besarnya.

Menghadapi masalah itu, dan karena ingin memberikan rasa aman kepada anggota keluarga, keluarga perlu menabung sebagian, atau bahkan hampir semua, penghasilan mereka setelah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Besarnya tabungan minimum keluarga tidak harus proporsional dengan besarnya pendapatan keluarga karena tabungan tersebut lebih merupakan sikap sosial bahwa uang harus ditabung dan dikelola. Uang di bawah jumlah tabungan minimum ini tidak diputar di luar keluarga, dan dengan demikian tidak bisa dipakai untuk investasi. Dengan kata lain, kalau keluarga sudah menumpuk uang melebihi tabungan minimum barulah mereka mempunyai uang untuk investasi dan yang lain-lainnya. Melimpahnya uang di Taiwan dalam tiga sampai lima tahun ini tidak hanya karena meningkatnya saluransaluran investasi (yaitu pasar modal), tetapi juga karena akumulasi kekayaan telah jauh melampaui batas tabungan minimum keluarga. Tetapi mungkin juga melimpahnya uang ini karena banyak keluarga yang, demi spekulasi, mengabaikan garis batas psikologis antara tabungan dan investasi.

Budaya menabung ini mempengaruhi pengelolaan uang. Di masa lalu, penduduk Taiwan biasa menyimpan uang di tempat yang aman dan stabil. Bahkan pilihan yang ada pun terbatas karena pada waktu itu Taiwan hanya memiliki sedikit saluran investasi. Itulah sebabnya mengapa setelah dekade 1970-an Taiwan menjadi salah satu negara yang tingkat tabungannya paling tinggi (lebih dari 30 persen).¹² Meskipun demikian, menyimpan uang di bank hanya merupakan salah satu bentuk tabungan. Partisipasi dalam hui, membeli emas, dan meminjamkan uang kepada keluarga dan teman merupakan bentuk tabungan juga. Tabungan-tabungan seperti itu merupakan kekayaan keluarga, dan ini juga menjadi sebab tingginya tingkat tabungan di Taiwan. Akumulasi tabungan keluarga ini juga merupakan sumber utama pembentukan modal. Tetapi tabungan-tabungan ini secara langsung dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan pengelolaan kekayaan keluarga. Lebih penting lagi, tabungan tersebut juga dipengaruhi oleh ad2inya

saluran untuk mengubah kekayaan menjadi modal. Dari sini kita bisa melihat bahwa "tabungan minimum ke-luarga" dan kepercayaan pribadi adalah yang menjadi pedoman pengelolaan kekayaan keluarga. Sedangkan saluran mana yang akan dipilih, sektor formal atau informal, untuk mengubah kekayaan menjadi modal, ditentukan oleh koneksi dan kepercayaan pribadi.

4.2. Kelompok Bisnis Dalam Lingkungan Yang Dinamis: Hong Kong, 1976-1986

Saya harap tulisan ini menyumbang studi tentang kelompok-kelompok bisnis di Hong Kong. Tujuan tulisan ini adalah mengajukan analisis mengenai perubahan pola-pola pertalian direktur di antara perusahaan-perusahaan terbesar dan bank-bank di Hong Kong pada periode 1976-1986.

a. Kelompok Bisnis Pada Umumnya

Studi tentang kelompok-kelompok bisnis menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan dari bawah ke atas berdasarkan teori-teori ekonomi. Pendekatan ini memfokuskan diri pada ketergantungan sumber daya dan ketidaksempurnaan pasar. Kedua, pendekatan dari atas ke bawah berdasarkan teori-teori ilmu politik. Pendekatan ini menekankan distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat (Hamilton et al., 1988).

Pendekatan "ketergantungan sumber daya" (resource dependence approach) mengandalkan bahwa pada umumnya organisasi tidak dapat mencukupi semua sumber daya yang diperlukan dari sumber-sumber internal perusahaan dan terpaksa sedikit banyak tergantung pada sumber daya eksternal. Sering kali suplai sumber daya (modal uang dan bahan-bahan mental) yang sangat vital bagi kehidupan perusahaan sangat tidak pasti kelancarannya. Salah satu tujuan tulisan ini adalah mengamati strategi organisasi bisnis dalam mengamankan dan mengatasi ketidakpastian suplai sumber daya tersebut.

Meskipun pendekatan ini mengakui pentingnya aktivitas organisasi-organisasi lain dalam lingkungan yang sama, pusat perhatian dan unit analisisnya adalah masing-masing organisasi bisnis itu sendiri. Dengan demikian kelompok bisnis tidak masuk ke dalam hitungan, tidak seperti pendekatan-pendekatan yang akan saya bahas dengan singkat di bawah ini.

Pendekatan "kegagalan pasar" (Williamson dan Ouchi, 1981) misalnya memperhitungkan keseluruhan hubungan antara masing-masing perusahaan dengan lingkungan mereka, dan dengan demikian pendekatan ini memasukkan kelompok bisnis ke dalam analisis mereka. Pendekatan ini berargumen bahwa dalam situasi-situasi tertentu, pasar tidak berfungsi "dengan sempurna" dalam mengalokasikan sumber daya. Sebab utama ketidak sempumaan ini adalah tidak sempurnanya atau tidak lengkapnya pertukaran informasi di antara -mereka yang melakukan transaksi bisnis karena relatif sedikitnya jumlah orang yang betul-betul paham akan sebuah jenis transaksi. Ketidakpastian dalam aktivitas bisnis ini diperparah oleh "tingkah laku oportunistik" beberapa pelaku transaksi yang ingin mengeksploitasi situasi demi keuntungan sendiri.

Masalah yang dihadapi teori ketergantungan sumber daya dan teori kegagalan pasar sebetulnya sama, yaitu bagaimana organisasi bisnis mengatasi ketidakpastian. Teori kegagalan pasar menganalisis masalah ini pada tingkat sistem dan mengusulkan bahwa, dengan adanya kegagalan pasar, perusahaan-perusahaan menjangkau keluar serta mencoba mengganti pasar dengan sarana-sarana otoritatif dan semi-otoritatif. Yang termasuk dalam sarana otoritatif adalah merger dan joint venture, dan sarana semi-otoritatif mencakup pertalian direktur dan kesepakatan industri untuk mengatur bisnis. Ditinjau dari perspektif ini, kelompok-kelompok bisnis yang terbentuk dari pertalian direktur, pemilikan saham timbal balik, ikatan-ikatan kekeluargaan, dan lain-lain, merupakan suatu semi-organisasi yang berada di antara. kesempumaan pasar dan organisasi swadaya, serta berfungsi mengalokasikan sumber daya.

Baik perspektif ketergantungan sumber daya maupun kegagalan pasar memandang lingkungan sebagai "terstruktur". Struktur tersebut kebanyakan dilukiskan dalam bentuk ciri-ciri industri seperti tingkat konsentrasi dalam tiap industri dan hubungan-hubungan transaksi antar-industri. Strukturstruktur ini mempunyai peran penting dalam menentukan strategi yang dipilih organisasi bisnis untuk mengatasi ketidakpastian. Dalam hal merger antarindustri, ditemukan bahwa merger antara dua industri berkorelasi positif dengan tingkat transaksi antara dua industri tersebut (Pfeffer dan Salancik, 1978).

Tetapi menerapkan analisis yang berorientasi industri semacam ini pada lingkungan bisnis dalam perekonomian Negara-negara Industri Baru (NIB) di Asia seperti Hong Kong yang berorientasi ekspor ternyata mengandung beberapa masalah.

Pertama, kebanyakan studi tersebut dilakukan di AS yang tingkat swadaya ekonominya lebih tinggi daripada ekonomi Hong Kong yang herorientasi ekspor. Berbagai tahap produksi, dan konsumen akhir dari produk-produk AS, terdapat dalam lingkungan ekonomi yang sama. Lain dengan Hong Kong, yang produksi industrinya sebagian besar hanya mencakup satu. atau beberapa tahap proses produksi dan konsumen produk jadinya berada di luar wilayah Hong Kong. Karena itu, pola arus sumber daya antar-industri dalam ekonomi AS tidak dapat dipakai untuk menjelaskan kesalingtergantungan sumber daya antar-industri di Hong Kong.

Kedua, di negeri-negeri industri maju, cenderung terdapat kendala besar yang menghadang masuknya pemain baru ke dalam beberapa industri. Kendala ini disebabkan oleh tingginya tingkat teknologi yang digunakan dalam beberapa proses produksi, tuntutan kecanggihan profesionalisme angkatan kerja, dan kekuatan serikat buruh. Di Hong Kong, tingkat kondisikondisi tersebut lebih rendah, dengan akibat bahwa kendala-kendala terhadap pemain baru juga rendah.

Ketiga, sumber ketidakpastian yang dihadapi oleh bisnis Hong Kong kebanyakan berasal dari kondisi politik-ekonomi mitra. dagangnya, yaitu negara-negara industri maju. Bisnis di Hong Kong lebih memperhatikan masalah eksternal/internasional seperti proteksionisme, tingkat pengeluaran konsumen, serta harga bahan mentah, dan bukannya masalah hubungan ketergantungan sumber daya di dalam negeri.

Karena struktur industri Hong Kong berbeda, strategi yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian juga lam. Seperti yang dilukiskan Chandler (1977), perusahaan-perusahaan raksasa AS menggunakan merger horisontal dan integrasi vertikal sebagai alat utama untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian. Tetapi kedua cara itu. tidak dapat digunakan sebagai strategi utama oleh bisnis Hong Kong. Dari sudut pandang bisnis Hong Kong, perusahaan-perusahaan yang menjadi target pengambilalihan, kalau strategi itu diterapkan, jumlahnya banyak sekali dan tersebar di semua negara industri maju. Banyak yang skalanya terlalu besar untuk diambilalhh oleh perusahaan Hong Kong (meskipun memang ada kekecualian), dan kebanyakan pengusaha Hong Kong tidak

terbiasa dengan proses hukum dan keuangan dari pengambilalihan. Di samping itu, bisa jadi muncul kendala hukum dan sosial terhadap tawaran pengambilalihan yang dilakukan oleh pihak asing.

Karena adanya keterbatasan di atas, bisnis di Hong Kong lebih suka menggunakan strategi lain untuk mengatasi ketidakpastian. Misalnya, mereka meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dengan menggunakan teknologi padat karya, dengan menggunakan pola subkontrakting, dan mempertahankan skala kecil perusahaan mereka. Situasi ini ditemukan dalam industri-industri pengolahan di Hong Kong (Redding dan Tam, 1985).

Sebuah strategi penting lainnya yang dipilih oleh organisasi bisnis di Hong Kong adalah bekerja sama atau berjalan seiring dengan pemerintah. Contoh dari strategi ini adalah tindakan lobi untuk memperoleh dukungan pemerintah dalam negosiasi kuota ekspor tekstil Hong Kong ke Eropa dan Amerika Utara. Ini dilakukan terutama melalui lembaga pemerintah, Textile Advisory Committee, yang sangat terlibat dalam proses -negosiasi tersebut dan yang juga mewakili hampir semua pengusaha besar tekstil dan garmen Hong Kong. Dalam konteks ini, kelompok bisnis menjadi sarana penting untuk melaksanakan aksi-aksi-kolektif, termasuk strategi pembangunan nasional. Studi tentang kelompok bisnis di beberapa negara Asia menunjukkan bahwa mereka memang telah menjalankan fungsi seperti itu (Jones dan Sakong, 1980; Johnson, 1982; Hamilton dkk., 1987). Akan tetapi, studi-studi ini juga menemukan bahwa struktur kelompok-kelompok bisnis tersebut, dan hubungannya dengan pemerintah nasional mereka, berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Di Korea Selatan, perusahaan-perusahaan besar mengelompok ke dalam chaebol-chaebol, di mana perusahaan-perusahaan anggotanya dikontrol secara ketat oleh perusahaan-perusahaan holding yang dimiliki oleh individu ataupun keluarga. Pada gilirannya, perusahaan-perusahaan holding tersebut secara langsung diatur oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga perencanaan dan kontrol fiskal (Hamilton dan Biggart, 1988). Di Jepang negara tidak campur tangan langsung tetapi lebih cenderung menciptakan dan mempromosikan kekuatan-kekuatan perantara, dan negara bertindak sebagai koordinator kegiatan serta menengah perbedaan-perbedaan kepentingan (Johnson, 1982). Jadi, meskipun kelompok-kelompok bisnis di Jepang sebanding besarnya dengan yang -ada di Korea Selatan, jalur-

jalur langsung mereka ke negara lebih encer dan mereka jauh lebih membandel dalam menghadapi pengarahannya negara (Abegglen dan Stalk, 1985; Eads dan Yamamura, 1987). Di Taiwan, pemerintah lebih selektif dan terkendali dalam melakukan intervensi, dan ini melahirkan perekonomian yang pola industrialisasinya jauh lebih terdesentralisir, derajat konsentrasinya rendah, serta didominasi oleh perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah.

Keragaman antar-negara ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok bisnis juga dibentuk oleh sistem otoritas dan lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat-masyarakat tersebut. Karena itu, pengamatan kelompok-kelompok bisnis membutuhkan perspektif politik-ekonomi dan kelembagaan.

Perspektif politik-ekonomi memandang perusahaan sebagai alat yang dipakai oleh para pemimpin perusahaan, sebagai anggota kelas yang berkuasa, untuk mempraktekkan kekuasaan mereka dalam masyarakat. Ada dua tema dominan dalam perspektif ini. Pertama, bagaimana berbagai unit bisnis yang berbeda dalam kelompok-kelompok yang dominan bersatu untuk mengejar kepentingan bersama mereka. Kedua, bagaimana hubungan antara pemerintah dan kalangan elite bisnis. Dilihat dari perspektif ini, kelompok-kelompok bisnis menjadi alat untuk menjalin ikatan-ikatan antar-perusahaan dan antar-pemilik/manajer senior yang mempunyai kepentingan yang sama. Kedua ikatan tersebut menciptakan lingkup pengaruh yang berbeda dan berfungsi sebagai alat eksploitasi.

Meskipun perspektif politik-ekonomi bertujuan menggambarkan sistem-sistem aliansi di antara kelompok-kelompok kuat dalam masyarakat, perspektif ini tidak mencoba menerangkan dasar aliansi-aliansi tersebut. Untuk menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok perusahaan di berbagai negara, kita harus mengamati lingkungan kelembagaan masing-masing masyarakat tersebut.

Whitley mengidentifikasi lima ciri lingkungan kelembagaan yang berpengaruh besar terhadap pembentukan kelompok-kelompok bisnis (1989): yaitu sistem hubungan otoritas, sistem kepercayaan dan tolong menolong, sistem yang mengutamakan keluarga, kebijakan negara dalam pembangunan ekonomi, dan sistem keuangan.

Sifat-sifat kelembagaan ini juga menyebabkan perbedaan kelompok-kelompok bisnis di Asia. Pengutamakan hubungan keluarga berarti komitmen seseorang pada

keluarga. berada di atas loyalitas lainnya. Kalau diterjemahkan ke dalam dunia bisnis, dalam masyarakat Cina ikatan antara perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga yang sama lebih kuat daripada ikatan antar-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga yang berbedabeda. Kontras dengan kondisi ini, perusahaan-perusahaan Jepang karena sejarah feodal mereka, telah mengembangkan komitmen yang lebih kuat terhadap kolektivitas di luar lingkup keluarga. Hubungan antar-perusahaan dalam sebuah kelompok bisnis Jepang dilandaskan pada kewajiban timbal balik dalam lingkup kelompok perusahaan itu sendiri. Keanggotaan dalam kelompok bisnis Jepang mencakup spektrum yang lebih luas daripada keanggotaan dalam kelompok bisnis Cina, yang hanya terbatas pada orang/kelompok yang mempunyai ikatan keluarga.

Perbedaan ini diperkuat oleh perbedaan mekanisme pembentukan kepercayaan dalam masyarakat Cina dan Jepang. "Jaringan guanxi" tolong-menolong dalam masyarakat Cina biasanya diikat dengan kesantunan latar belakang. Sedang jaringan kewajiban Jepang dibentuk melintasi berbagai latar belakang dan menunjukkan kemampuan untuk membentuk ikatan yang kuat antar-manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda" (Whitley, 1989). Para pemilik perusahaan dalam kelompok bisnis Cina, misalnya, kalau tidak punya hubungan keluarga, kemungkinan besar mereka berasal dari daerah yang sama di Cina, seperti misalnya Shanghai atau Teochow.

Peran lembaga-lembaga keuangan dalam menyediakan dana untuk pengembangan bisnis menyebabkan besarnya peran lembaga-lembaga tersebut dalam kelompok-kelompok bisnis. Di Jepang, bank-bank yang membiayai kegiatan bisnis perusahaan anggota sebuah keiretsu biasanya menempati posisi sentral dalam kelompok tersebut. Di Taiwan, di mana banyak modal berasal dari pasar uang non-formal, kedudukan lembaga keuangan dalam kelompok bisnis juga lebih marjinal.

Di samping hubungan antar-perusahaan, hubungan antara bisnis dan pemerintah juga bervariasi menurut konteks kelembagaannya. Hubungan kelembagaan itu pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan antarperusahaan. Dalam tiap masyarakat, pemerintah mempunyai pilihan untuk mengembangkan bentuk hubungan tertentu dengan sektor bisnis. Secara historis banyak faktor penting yang menentukan pilihan; "tetapi tampaknya faktor yang terpenting bukan faktor ekonomi. Keputusan-keputusan kunci mengenai hubungan antara negara/bisnis harus dilihat dalam konteks yang lebih luas,

yaitu dalam konteks kepentingan para pemimpin politik untuk mensahkan pemerintahan mereka. Baik rezim Jepang, Korea Selatan maupun Taiwan, masing-masing eksistensinya berada-dalam titik yang kritis pada periode setelah perang dan penjajahan, dan mereka memerlukan legitimasi untuk mendukung keberadaan mereka. Dalam membangun legitimasi tersebut, masing-masing rezim pada akhirnya, dalam usahanya membentuk sistem kekuasaan politik, mengandalkan cara-cara yang sudah teruji oleh waktu dan diterima oleh tata cara sosial masyarakat" (Hamilton dan Biggart, 1988). Jadi tata cara sosial ikut membentuk kelompok-kelompok bisnis yang juga dipengaruhi oleh hubungan-hubungan ekonomi "dunia" dan sistem politik yang terbentuk secara historis.

b. Pertalian Direktur

Studi tentang kelompok-kelompok bisnis, misalnya yang terbentuk karena pertalian direktur, didominasi oleh dua pendekatan. Pertama, pendekatan "ketergantungan sumber daya" yang mendekati masalah "dari atas ke bawah". Kedua, pendekatan politik yang mendekati masalah "dari bawah ke atas". Keduanya sudah saya bicarakan sebelumnya. Konteks kelembagaan dalam masyarakat yang melandasi pertalian direktur cenderung diabaikan oleh kebanyakan studi.

Perspektif ketergantungan sumber daya paling sering meneliti hubungan modal dan pertalian finansial (Dooley, 1969; Pfeffer, 1972; Allen, 1974; Pennings, 1980). Hipotesisnya: semakin besar ketergantungan perusahaan pada sumber-sumber keuangan eksternal, semakin tinggi kemungkinannya untuk membentuk pertalian direktur dengan lembaga keuangan. Ini bisa dilakukan dengan menerima wakil lembaga keuangan untuk duduk dalam Dewan Direktur, atau mengirim seorang direktur untuk duduk dalam Dewan Direktur lembaga keuangan. Pengetesan hipotesis melalui studi-studi ini menunjukkan hasil yang beragam (Pfeffer, 1972; Pennings, 1980).

Perspektif ilmu politik paling sering meneliti posisi dan kekuasaan bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam jaringan pertalian direktur, karena mengontrol modal uang, mereka dianggap mampu mengontrol perusahaan-perusahaan besar dalam masyarakat. Sebuah teori yang berhubungan menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan keuangan dan non-keuangan membentuk pertalian untuk membangun sebuah jaringan

yang erat yang dipakai untuk memperkokoh kepentingan kelas elite dalam masyarakat .(Fitch dan Oppenheimer, 1970; Zeitlin, 1976; Norich, 1980).

Muncul perdebatan apakah pertalian direktur merupakan mekanisme kooptasi dan kontrol (dilihat dari sudut pandang perspektif ketergantungan sumber daya) atau merupakan alat konsolidasi kepentingan kelas (elite). Kami berpendapat bahwa keduanya dalam. praktek tumpang tindih. Lembaga-lembaga keuangan menempati posisi sentral dan berpengaruh dalam jaringan bisnis karena mereka mengontrol sumber keuangan yang dibutuhkan oleh banyak organisasi bisnis. Sekali sebuah lembaga memegang kekuasaan, para pengelolanya mengambil langkah untuk memperkuat kekuasaan dengan jalan membangun hubungan dengan pelaku-pelaku penting dalam. lingkungan tersebut, misalnya perusahaan industri raksasa dan pemerintah.

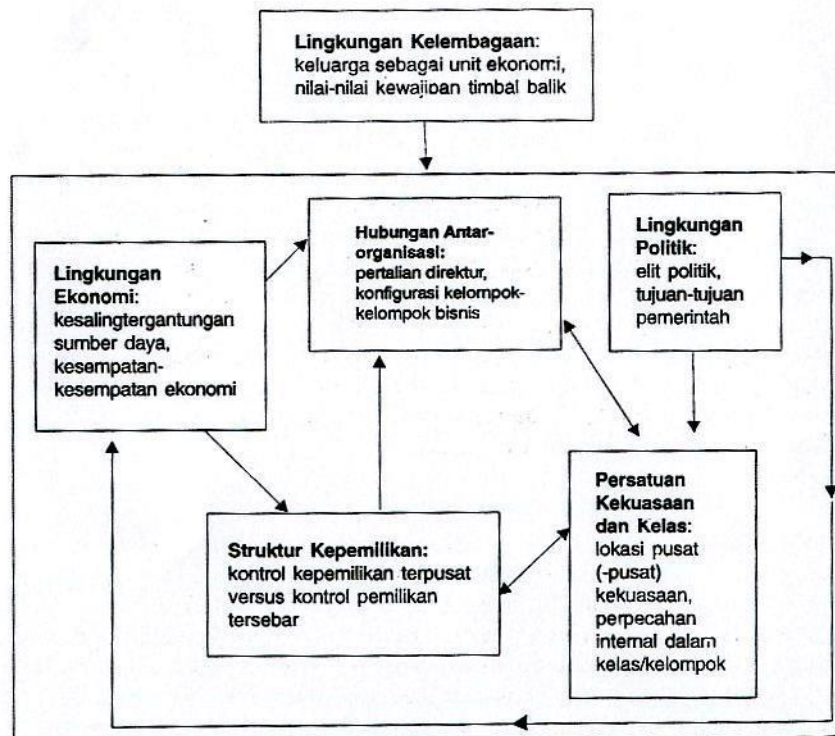
Yang lebih menarik adalah bagaimana sebuah organisasi bisnis mengontrol sumber daya penting, reaksi organisasi bisnis lainnya, dan hubungan yang terjadi setelah mereka mengontrol sumber daya tersebut. Yang juga menarik adalah bagaimana hubungan antar organisasi bisnis tersebut melahirkan pola-pola kelompok bisnis yang berbeda-beda dalam perekonomian-perekonomian Asia. Pertanyaan inilah yang akan dijawab dengan jalan melihat berubahnya pola pertalian direktur di Hong Kong dalam periode 1976-1986.

c. Model Terpadu

Saya akan mencoba memadukan tiga pendekatan dalam studi pertalian direktur di Hong Kong karena ketiga pendekatan tersebut tidak saling bertentangan, dan semuanya bermanfaat. Misalnya, dalam mempelajari strategi bisnis perusahaan-perusahaan besar Asia, pendekatan V2tergantungan sumber daya memperlihatkan kondisi yang membuat hubungan ketergantungan sumber daya menjadi masalah kritis bagi keberlangsungan perusahaan. Sedang pendekatan politik ekonomi dan kelembagaan membantu memahami strategi khusus yang diambil perusahaan dalam sebuah masyarakat. Model yang pendekatan tersebut bisa dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1

Sebuah Model Terpadu untuk Menjelaskan Pembentukan dan Beroperasinya Kelompok-kelompok Bisnis



Dua unsur dalam model tersebut yang diandalkan oleh teori-teori ketergantungan sumber daya adalah lingkungan ekonomi dan hubungan antar-organisasi. Masalah

kepemilikan juga secara tidak langsung ikut dibicarakan ketika teori-teori tersebut berpendapat bahwa merger dan jointventure digunakan sebagai mekanisme untuk mengatasi ketidakpastian bisnis yang bersumber dari lingkungan.

Keempat unsur yang menjadi perhatian utama perspektif politik ekonomi adalah struktur pemilikan, lingkungan politik, keterpaduan kelas dan kekuasaan, serta hubungan-hubungan antar-organisasi. Bagi perspektif ini, lingkungan kelembagaan hanya berfungsi sebagai latar belakang yang membentuk unsur-unsur di atas, sehingga terjadi penerapan model terpadu tersebut pada kelompok-kelompok bisnis di Hong Kong dalam periode 1976-1986. Periode ini dipilih karena pada waktu itu terjadi kemerosotan perusahaan-perusahaan dagang Inggris yang dulunya dominan, dan kemunculan kelompok-kelompok bisnis Cina yang kuat di Hong Kong. Apakah model terpadu ini bisa menjelaskan perubahan ekonomi yang sangat berarti tersebut?

c. Sampel Riset

Sampel yang kami gunakan untuk mengidentifikasi kelompok bisnis di Hong Kong terdiri atas 100 perusahaan non-finansial terbesar yang terdaftar dalam bursa saham (diranking berdasarkan omset tahunan) dan 25 bank lokal terbesar (dan perusahaan-perusahaan yang menerima, deposit yang sejajar dengan bank-bank pedagang di Inggris, dan diranking menurut aset tahun 1976, 1981, dan 1986. Jumlah modal 100 perusahaan non-finansial tersebut mencapai 80 persen dari total-modal dalam pasar saham, dan dibanding dengan total aset bank lokal yang diinkorporasikan di Hong Kong, aset 25 bank yang ada dalam sampel mencapai proporsi yang setara dengan proporsi modal 100 perusahaan non-finansial di atas. Sampel tersebut mewakili sebagian besar perusahaan non-finansial dan bank di Hong Kong.

d. Metode Identifikasi Kelompok-kelompok Bisnis

Dalam studi ini teknik teori diagram (graph theory) digunakan untuk mengamati pola-pola pertalian direktur. Teori diagram merupakan cabang matematika yang mempelajari konfigurasi hubungan-hubungan dan titik-titik. Dalam konteks ini, sebuah perusahaan diwakili oleh sebuah titik, dan kesamaan direktur antara dua perusahaan ditunjukkan dengan adanya sebuah garis yang menghubungkan kedua titik tersebut.

Kalau kedua perusahaan tersebut mempunyai dua direktur yang sama, akan ada dua garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Sebuah diagram adalah kumpulan dari titik-titik dan garis-garis. Kalau hubungan antar-titik terdiri atas satu garis atau lebih, diagram tersebut dinamakan 1-diagram, dan kalau hubungan tersebut terdiri atas dua garis atau lebih, grafik tersebut disebut 2-diagram, dan seterusnya.

Konsep "komponen" digunakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan pertalian direktur. Sebuah komponen adalah seperangkat titik yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga kita bisa bergerak dari satu titik ke titik yang mana pun dengan mengikuti garis-garis yang menghubungkan mereka.

Serupa dengan hasil studi di AS dan Eropa (Sonquist dan Koenig, 1975; Stokman dkk., 1985), hampir semua perusahaan dalam sampel masuk ke dalam komponen 1-diagram yang besar. Ukuran terbesar dari komponen 1-diagram dalam tiga tahun yang diteliti adalah 104, 108, dan 99 untuk tahun 1976, 1981, dan 1986.

Karena besarnya komponen di atas, untuk mengidentifikasi adanya kelompok-kelompok bisnis yang berpengaruh dalam jaringan-jaringan pertalian direktur tersebut, harus diterapkan syarat-syarat yang lebih ketat. Sonquist dan Koenig (1975) dan 11M (1978) menggunakan kriteria 1-diagram untuk memecah jaringan itu menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Teknik yang serupa juga dipakai dalam sebuah studi pertalian direktur di 10 negara di Eropa (Stokman dkk., 1985). Keputusan peningkatan penggunaan diagram tergantung pada kemampuannya masing-masing untuk membantu mengidentifikasi kelompok bisnis yang berpengaruh dalam suatu konteks tertentu. Dalam studi ini, kelompok yang berpengaruh belum kelihatan sampai kita menggunakan 3-diagram dan 4-diagram. Kelompok bisnis dalam studi ini didefinisikan sebagai komponen yang terjadi dan minimal tiga perusahaan yang terkait satu sama lain, secara langsung atau tidak langsung dalam 3-diagram atau diagram.

e. Kelompok Bisnis Hong Kong

Ekonomi Politik Hong Kong pada Tahun 1976

Dalam ulasannya tentang struktur politik Hong Kong, Rear (1971) menyatakan bahwa "kekuasaan di Hong Kong dipraktekkan melalui aliansi diam-diam. antara bisnis

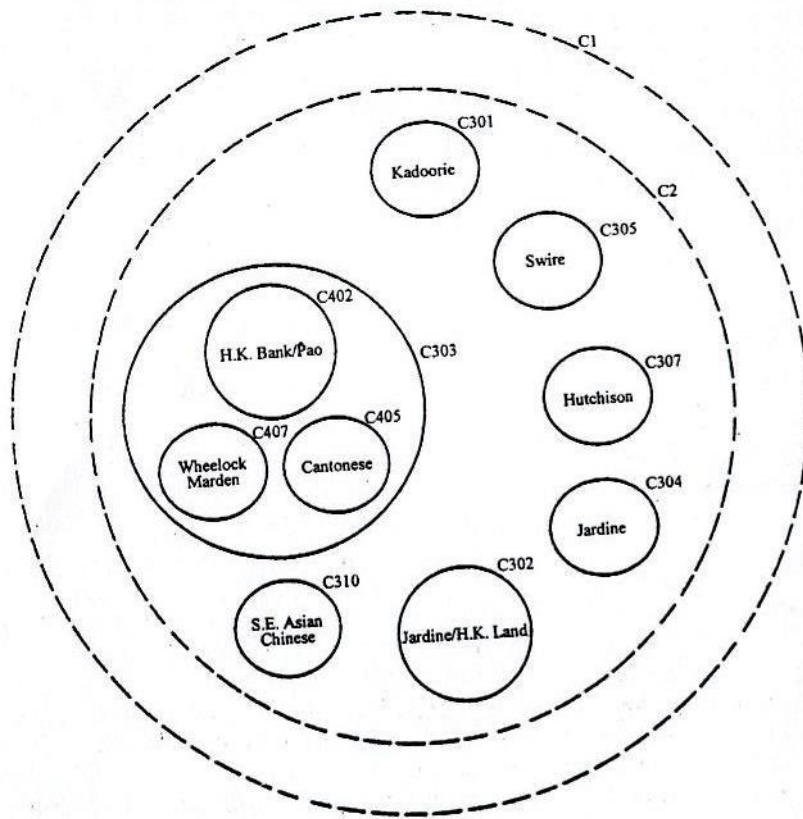
dan birokrasi." Dalam studinya tentang tumpangtindihnya keanggotaan badan-badan politik, dewan-dewan direktur, dan badan-badan penasihat pemerintah pada tahun 1976, Dark sampai pada kesimpulan yang sama.

Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa ada sekelompok elite yang relatif kecil jumlahnya yang mengontrol proses kebijakan. Kebanyakan mereka adalah non-Cina dan banyak yang ekspatriat. Tetapi keterkaitan antara yang Cina dan yang non-Cina membuat kita bisa mengatakan bahwa ada kesamaan sikap yang mendasar. Tampaknya kesamaan ini dibentuk oleh komunitas kepentingan yang terdiri atas para anggota Dewan Direktur dalam sejumlah kecil badan bisnis dan keuangan yang besar; kesamaan keanggotaan dalam segelintir klub-klub; tingkat pendapatan dan oleh keterlibatan mereka dalam berbagai organisasi sosial dan fungsi publik mereka. (Dark, 1977).

Komunitas kepentingan bisnis yang dibicarakan oleh para penulis tersebut pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan dagang (hong) yang didirikan oleh wiraswasta-wiraswasta. Inggris pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Empat hong utama adalah Jardine and Matheson, Swire, Hutchison, dan Wheelock Marden. Dalam daftar ini harus ditambahkan kepentingan bisnis keluarga Kadoorie dan Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (sekarang berganti nama menjadi Hong Kong Bank, atau biasa disebut The Bank) yang secara de facto berfungsi sebagai bank sentral di Hong Kong. Pada tahun 1976, keempat hong tersebut mengontrol salah satu dari dua koran berbahasa Inggris di Hong Kong, dua perusahaan listrik, dua dari tiga pelabuhan kontainer, satu-satunya perusahaan penerbangan dan bengkel kapal terbang, perusahaan telepon, sebagian besar properti di daerah pusat keuangan, tram Peak, Hong Kong Tramway, dan sejumlah bisnis lainnya seperti pelabuhan kapal, pelabuhan bongkar muat, hotel, dan supermarket. Biasanya, kepala eksekutif dari semua hong tersebut duduk dalam dewan direktur Hong Kong Bank. Para taipan ini juga menjadi anggota Royal Hong Kong Jockey Club, yang kepala administrasinya juga duduk dalam dewan direktur Hong Kong Bank. Ketua Hong Kong Bank pada gilirannya merqach ketua pengelola Jockey Club tersebut. Jaringan ini sangat ketat, dan kekuasaan kelompok elite pengusaha ini sedemikian besarnya sehingga pernah dikatakan bahwa "kekuasaan di Hong Kong ada di Jockey Club, Jardine and Matheson, Hong Kong and Shanghai Bank, dan menurut urutannya seperti itu." (Hughes, 1976)

Konfigurasi dari komponen jaringan pertalian direktur dan kesalingterkaitannya pada dasarnya mencerminkan posisi dominan hongkong tersebut, dan ini dilukiskan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Kelompok-kelompok Bisnis Sebagaimana Diidentifikasi melalui Jaringan Pertalian Direktur, 1976



C1 ; C2 adalah komponen-komponen 1-diagram dan 2-diagram yang kaitannya longgar C3XX; C4XX adalah komponen-komponen 3-diagram dan 4-diagram yang kaitannya erat.

Salah satu dari kelompok bisnis ini terdiri dari 17 perusahaan, dan mereka dibagi ke dalam sub-kelompok dengan menggunakan komponen-komponen 4-diagram. Beberapa indikasi dari "ukuran" dan pentingnya kelompok-kelompok ini diukur dengan

melihat jumlah perusahaan dalam kelompok dan proporsi modal kelompok tersebut terhadap nilai total modal Yang ada di pasar (modal ash dan modal pinjaman). Sentralitas sebuah kelompok bisnis diukur dari jumlah perusahaan Yang terkait dengan kelompok tersebut secara keseluruhan melalui pertalian direktur.

Dalam jaringan pertalian direktur Yang ada pada tahun 1976, kecuali dua kelompok kecil, kelompok-kelompok bisnis utama terdiri dari dan dikontrol oleh organisasi-organisasi atau keluarga-keluarga bisnis non-Cina. Sebagian besar kelompok bisnis tersebut dikontrol keluarga bisnis tunggal, yaitu kelompok Kadoorie, Swire, Jardine, Hutchison, dan Wheelock Marden. Kebanyakan perusahaan dalam kelompok-kelompok ini adalah perusahaan Yang mempunyai sejarah panjang (lebih dari 40 tahun) di Hong Kong. Akan tetapi juga ada joint venture di antara kelompok-kelompok tersebut.

Misalnya, banyak layanan di bandara Yang dimiliki oleh Jardine dan Swire.

Tabel 1. Profil Kelompok-kelompok Bisnis, 1976

Nama Kelompok	Dikontrol oleh orang Cina ?	Jumlah Perusahaan	% dari Modal yang ada	Setralitas Kelompok Jumlah perusahaan di pasar yang terkait dengan kelompok
Cina Asia Tenggara (310)	Ya	4	0,24	17
Kadoorie (301)	Tidak	3	4,92	33
Swireno (301)	Tidak	3	7,07	25
Hutchison (307)	Tidak	6	7,27	32
Jardine (1) (304)	Tidak	3	7,27	18
Jardine / H.K Land (302)	Tidak	5	10,14	42

Campuran (303)	Campuran	17	30,80	41*
Sub-kelompok dalam kelompok campuran HK Bank / Y.K				
Pao (402)	Campuran	5	20,51	40
Kantonis (405)	Ya	5	7,02	40
Whelock Marde (407)	Tidak	5	3,18	13

* Sentralitas ini tidak sama dengan jumlah total sentralitas sub-sub kelompok karena perusahaan-perusahaan dalam sub-sub kelompok tersebut bisa jadi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sama.

Sebagian besar perusahaan dalam kelompok-kelompok bisnis tersebut mempunyai usaha perhotelan, properti, dan industri-industri untuk memenuhi kepentingan publik akan listrik, gas, dan air (utility industries). Dilihat proporsinya dalam sampel, sangat sedikit yang bergerak di bidang usaha, manufaktur dan perbankan.

Bisnis keluarga-keluarga Cina cenderung tidak terlalu terdiversifikasi dan mereka terpusat di sektor properti. Beberapa dari mereka bergerak di bidang hotel dan pengapalan. Sejarah perusahaan mereka di Hong Kong juga lebih pendek (kecuali Bank of East Asia). Hal ini mencengangkan karena faktanya Hong Kong adalah sebuah kota Cina.

Jaringan pertalian direktur tersebut nyata-nyata didominasi oleh perusahaan-perusahaan kelompok Jardine. Secara bersama, kedua kelompok Jardine menguasai 17,41- persen dari total modal pasar saham.

Kedua kelompok Jardine terkait dengan 60 perusahaan, sementara kelompok campuran yang besar saja cuma terkait dengan 41 perusahaan. Tetapi besarnya skala kelompok campuran itu memang karena adanya Hong Kong Bank dalam kategori tersebut. Hong Kong Bank sendiri saja terkait dengan 40 perusahaan, dan menguasai 14,16 persen dari modal pasar saham. Bila bagian Hang Seng Bank ditambahkan, proporsinya naik menjadi 17,7 persen. Kelompok-kelompok Hong Kong Bank dan Jardine merupakan dua sentral dalam jaringan tersebut.

Jadi konfigurasi kelompok-kelompok bisnis itu mencerminkan posisi dominan bisnis-bisnis Inggris di Hong Kong. Sebuah analisis tentang sistem perwakilan di Hong Kong menunjukkan bahwa para ekspatriat (sebagian besar orang Inggris) menduduki lebih dari 50 persen kursi dewan legislatif dan eksekutif di daerah koloni tersebut (Davis, 1989). (Kedua dewan tersebut sejajar dengan badan legislatif dan kabinet dalam sebuah negara.) Perwakilan bisnis di masing-masing dewan tersebut menduduki 30 persen dan 40 persen dari kursi yang ada. Tumpang tindihnya kekuasaan ekonomi dan politik ini mendukung sebuah teori kelas tentang kelompok-kelompok bisnis yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok bisnis merupakan alat dan manifestasi dari dominasi.

f. Bibit-bibit Perubahan

Karena dominannya posisi kelompok bisnis Inggris di Hong Kong pada tahun 1976, sulit bagi kelompok bisnis lainnya untuk berkompetisi secara langsung dengan kelompok bisnis inti tersebut dan untuk berkembang dalam ekonomi Hong Kong. Akan tetapi perkembangan industri dan perkotaan di Hong Kong dalam dekade 1970-an membuka dua jalan yang kemudian dimanfaatkan oleh para pengusaha Cina untuk menantang dominasi kelompok-kelompok yang sudah mapan tersebut. Salah satu jalan yang dibuka adalah sektor pengolahan, yang pada umumnya berorientasi ekspor. Karena lokasi pasar ada di luar negeri, mereka berada di luar jangkauan pengaruh hong-hong yang sudah mapan tersebut. Meskipun demikian, hong-hong tersebut bisa menekan, karena mereka mengontrol infrastruktur ekonomi seperti fasilitas pelabuhan dan angkutan udara.

Jalan yang; satunya lagi adalah industri pembangunan properti. Untuk memahami kesempatan yang dibuka oleh industri pembangunan properti, kita perlu mengetahui sejarah ringkas industri tersebut dan hubungannya dengan industri perbankan maupun keuangan.

Awal dekade 1950-an merupakan periode yang paling traumatik dalam sejarah Hong Kong. Pengambilalihan kekuasaan Cina daratan oleh pihak komunis dan embargo perdagangan PBB atas Cina menghancurkan perdagangan perantara yang merupakan fondasi ekonomi Hong Kong. Hong Kong kemudian berpaling ke industrialisasi untuk menunjang hidupnya. Karena masih pada tahap awal, hanya sedikit sumber daya yang

dialokasikan untuk pembangunan properti, meskipun memang ada gelombang besar migrasi dari Cina. Faktor kedua yang menghambat pembangunan properti adalah regulasi yang membatasi tinggi gedung. Pada waktu itu para developer hampir tidak mungkin membangun gedung pencakar langit untuk perumahan padat-huni seperti yang sekarang umum. ditemui di Hong Kong. Proyek-proyek pembangunan biasanya berskala kecil dan dibiayai dengan sumber-sumber pribadi developer sendiri, pinjaman, bank, dan uang muka dari penjualan yang dilakukan sebelum pembangunan dimulai.

Ketika memasuki awal dekade 1960-an, Hong Kong sudah pulih dari trauma-trauma masa setelah perang. Industri eksportnya sedemikian sukses sehingga ada uang melimpah untuk membiayai pembangunan properti. Perubahan ini, seiring dengan pengenduran regulasi gedung menciptakan ledakan bisnis properti. Proyek-proyek pencakar langit untuk perumahan padat-huni dibangun pada waktu ini. Pelopornya adalah Goodyear Property Development Company, sebuah perusahaan dalam Kelompok Cina Asia Tenggara yang diidentifikasi dalam jaringan tahun 1976.

Para developer dengan cepat menyadari adanya permintaan besar akan perumahan karena adanya tekanan pertambahan penduduk dan meningkatnya kelas menengah yang makmur. Di bawah kondisi itu, dan didorong lebih jauh lagi oleh spekulasi; harga tanah dan properti meningkat drastis. Di antara para spekulator tersebut ada manajer-manajer bank yang ikut-ikutan menjadi pemodal yang juga sekaligus developer. Kurangnya regulasi dalam industri perbankan membuat bank-bank mempunyai kesempatan untuk melampaui persentase batas peminjaman, yang akhirnya menghasilkan krisis perbankan pada tahun 1964-1965. Di bawah situasi ini bank Cina terbesar, Hang Seng Bank, diambilalih oleh Hung Kong Bank, dan pemerintah mengeluarkan moratorium yang membekukan pengeluaran izin untuk bank-bank baru. Tidak lama kemudian krisis tersebut diikuti oleh. kerusuhan Star Ferry pada tahun 1966 dan gejolak sosial pada tahun 1967 yang merupakan akibat dari pengaruh Revolusi Kebudayaan di Cina. Perekonomian merosot dengan tajam tetapi kemudian membaik lagi menjelang akhir dekade tersebut.

Dalam dekade 1970-an, industri pembangunan properti mengalami kejayaan. Ini karena adanya program pembangunan perumahan publik besar-besaran dan, seiring dengan itu, adanya perkembangan dalam industri perbankan dan security yang merombak

metode konvensional pembiayaan pembangunan properti di Hong Kong. Di bawah kepemimpinan Sir Murray Madehose, Gubernur baru. Hong Kong yang datang pada tahun 1971, pemerintah melancarkan proyek-proyek terbesar di Asia dalam bidang perumahan publik dan pengembangan kota. Dalam waktu 10 sampai 15 tahun kemudian, lebih dari separo penduduk Hong Kong tinggal di gedung-gedung perumahan publik yang letaknya ada di Daerah-daerah Baru. Bersamaan dengan proyek pembangunan publik tersebut, juga dibangun proyek-proyek perumahan pribadi yang tidak kalah besarnya. Kedua proyek pembangunan tersebut mengubah desa-desa sepi seperti Shatm dan Tuen Mun, yang dulu populasinya hanya beberapa ribu, menjadi pusat-pusat perkotaan dengan populasi masing-masing lebih dari beberapa ratus ribu orang.

Proyek-proyek pembangunan raksasa tersebut membutuhkan pendanaan skala besar. Ini dimungkinkan dengan perkembangan baru dalam industri perbankan dan security. Sampai saat itu, Hong Kong Stock Exchange merupakan satu-satunya pasar bursa di Hong Kong; dan yang diperdagangkan pada umumnya saham-saham perusahaan Inggris dan utility industries. Bursa saham tersebut sama sekali tidak aktif dan tidak berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan modal. Pada awal dekade 1970-an, tiga bursa baru dibuka, dan sejumlah besar perusahaan menjual sahamnya. Meskipun banyak dari saham yang diapungkan bersifat spekulatif, dan gelembung pasar modal kempes pada tahun 1973, pasar saham menjadi lebih matang pada pertengahan dan akhir dekade 1970-an, dan betul-betul berfungsi sebagai sarana. pengumpulan modal bagi perusahaan-perusahaan pembangunan properti. Perusahaan-perusahaan andalan kelompok-kelompok bisnis Cina, yang akan kami bicarakan secara. lebih rinci, mulai menjual saham ke publik pada periode ini atau pada awal dekade 1980-an.

Satu lagi sumber keuangan dibuka pada tahun 1976 dengan adanya "Peraturan Perusahaan Deposit" (Deposit Company Ordinance). Peraturan ini memungkinkan perusahaan-perusahaan deposit memasuki bisnis yang selama itu dikuasai oleh bank-bank resmi. Ini berarti bank-bank internasional sekarang dapat berpartisipasi dalam pasar uang meskipun ada pembekuan pengeluaran izin bank. Partisipasi mereka membuka kontak-kontak dan akses ke sumber-sumber keuangan internasional bagi para pengusaha. developer Hong Kong.

Sang Perantara-Hong Kong Bank sebagai Pencipta Raja Bisnis Dua perang akuisisi perusahaan yang dimenangkan oleh pengusaha. Cina yang mengambilalih kontrol perusahaan-perusahaan besar dari wigan hong mempercepat perubahan dalam struktur jaringan pertalian direktur pada tahun 1976. K.S. Li mengambilalih Hutchison dan YK. Pao mengambilalih Hong

Kong and Kowloon Wharf. Dalam kedua pengambilalihan tersebut Hong Kong Bank berfungsi sebagai penjual sejumlah besar saham atau sebagai sumber utama kredit untuk memblayai pengambilalihan tersebut. Agak menghe-rankan bahwa lembaga keuangan yang membantu pengusahapengusaha Cm4 mengambilalih perusahaan-perusahaan Inggris tersebut adalah Hong Kong Bank yang waktu itu dan sesudahnya dijalankan oleh para eksekutif Inggris yang mempunyai hubungan dekat dengan para hong. Salah satu penjelasannya adalah bahwa bank tersebut merupakan salah satu dari segelintir, kalau tidak merupakan satusatunya, perusahaan yang tidak dikontrol oleh keluarga dan dengan demikian para manajerriya dapat bertindak lebih "profesional", yaitu mendukung siapa pun yang dipandang potensial menjadi kapten-kapten bisnis di Hong Kong di masa depan. Mungkin juga karena bank tersebut berperan aktif mendukung industriindustri di Hong Kong yang sedang berkembang No, 1986), para manajernya mempunyai apresiasi yang lebih baik terhadap potensi yang dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan orang Cina.

g. Dua Studi Kasus :

Kebangkitan kelompok-kelompok bisnis K.S. Li dan Y.K. Pao menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok bisnis Cina bangkit dari lingkungan yang telah kami uraikan di atas.

Kelompok K.S. Li. K.S. Li berasal dari keluarga biasa. Dia pertamataa terjun ke dalam industri plastik pada tahun 1950-an, dan pada awal dekade 1960-an menurut cerita. dia berhasil mengumpulkan 50-60 juta dolar Hong Kong dari bisnis tersebut. Dari pertengahan dekade 60-an sampai awal dekade 1970-an dia membeli banyak properti yang waktu itu harganya masih rendah. Pada dekade 1970-an dia beralih ke bisnis pembangunan properti.

Perusahaan andalannya, Cheung Kong, menjual saham ke publik pada tahun 1972, Pada tahun 1974, dia membentuk Canadian Eastern Finance, sebuah perusahaan deposit yang merupakan joint venture dengan Canadian Imperial Bank of Commerce.

K.S. Li diangkat menjadi seorang direktur Hong Kong Bank pada tahun 1978. Sebelumnya, pada tahun 1975, Hong Kong Bank memperoleh sejumlah besar saham Hutchison dalam operasi penyelamatan perusahaan. Kemudian pada tahun 1979, Hong Kong Bank menjual saham tersebut kepada Cheung Kong, dan dengan demikian perusahaan ini mengontrol kelompok Hutchison. Minggu berikutnya, K.S. Li diangkat menjadi seorang direktur dalam China International Trust and Investment Corporation (CITIC), yang merupakan salah satu sarana utama investasi yang dibentuk oleh State Council of China. Sesudah mengakuisisi Hutchison dan segala macam bisnisnya, perusahaan-perusahaan kelompok Li kemudian mengakuisisi perusahaan-perusahaan Inggris seperti Green Island Cement dan Hong Kong Electric di Hong Kong serta bisnis-bisnis di manca negara seperti Husky Oil of Canada pada awal dekade 1980-an.

Kelompok YX Pao. YK Pao berangkat dari titik yang lebih menguntungkan dibanding K.S. Li. Keluarganya mempunyai bisnis perbankan di Shanghai. Dia datang ke Hong Kong pada tahun 1949 dengan membawa cukup uang untuk memulai sebuah bisnis baru. Dia melihat potensi pertumbuhan, industri pengapalan pada waktu itu, terutama setelah penutupan terusan Suez, dan merancang cara-cara untuk membiayai operasi pengapalannya. Perusahaan-perusahaannya mendapat dukungan kuat dan Hong Kong Bank. Sering dengan itu, Hong Kong Bank menguasai 45 persen dan saham World Maritime Bahamas Ltd., yang merupakan perusahaan pengapalan utama YK. Pao pada tahun 1964, dan beberapa waktu kemudian, bersama dengan Industrial Bank of Japan, menguasai 37 persen saham dari World Finance International, satu lagi perusahaan andalan YK Pao. Hong Kong Bank juga memiliki 10 persen saham Eastern Navigation yang merupakan perusahaan kelompok YK. Pao yang terdaftar dalam-bursa saham.

Pada tahun 1978, Cheung Kong berusaha menguasai sejumlah besar saham Hong Kong and Kowloon Wharf untuk mengontrol aset-aset tanahnya yang sangat berharga, yang lokasinya kebanyakan di Tsimshatsui, di ujung semenanjung Kowloon yang sedang berkembang cepat. Di bawah tekanan Hong Kong Bank, Cheung Kong menjual sahamnya kepada YK. Pao dan mengantungi laba yang besar. Dengan jumlah saham

yang besar di tangan, dan karena ada usaha dari pihak Hong Kong Land untuk mengontrol Wharf, Y.K. Pao mengambilalih perusahaan tersebut pada tahun 1980. Pada waktu itu YK. Pao adalah wakil ketua. Hong Kong Bank, dan masyarakat percaya bahwa pengambilalihan itu dibiayai oleh. Hong Kong Bank atau cabangnya.

Akuisisi Hong Kong and Kowloon Wharf memapankan kelompok YK. Pao dalam industri pembangunan properti dan industri hotel. Pada tahun 1984, kelompok tersebut mengambilalih perusahaan-perusahaan kelompok Wheelock Marden dan dengan demikian semakin mengembangkan usaha dalam bisnis properti dan eceran. Perluasan usaha diteruskan dengan mengakuisisi hotel-hotel kelompok Omni, yang berbasis di AS, dan British Standard Chartered Bank pada tahun 1988.

h. Tahap Pertumbuhan

Pola pertumbuhan kelompok perusahaan K.S. Li dan YK. Pao menunjukkan bahwa pertumbuhan kelompok-kelompok bisnis besar Cina berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama, modal awal diperoleh dari bisnis-bisnis di luar Hong Kong, seperti misalnya industri ekspor atau pengapalan. Tahap kedua adalah pertumbuhan yang cepat melalui pembangunan properti. Ini biasanya dicapai dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang menguasai banyak tanah, seperti misalnya perusahaan utility (gas, listrik, air) atau pelabuhan bongkar muat dan perusahaan-perusahaan yang berada dalam kesulitan, atau dengan jalan mendapatkan kontrol atas lokasilokasi pembangunan baru. Tahap ketiga. adalah tahap ekspansi lebih jauh dan diversifikasi dengan jalan mengakuisisi perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan tersebut mulai menawarkan sahamnya kepada publik ketika mereka. memasuki bisnis properti secara besar-besaran, dan dengan demikian mereka tampak sebagai sebuah jaringan pertalian direktur. Harus diingat bahwa, karena kendurnya regulasi, pendiri perusahaan biasanya tidak kehilangan kontrol atas perusahaan tersebut ketika dia menawarkan sahamnya kepada publik. ,

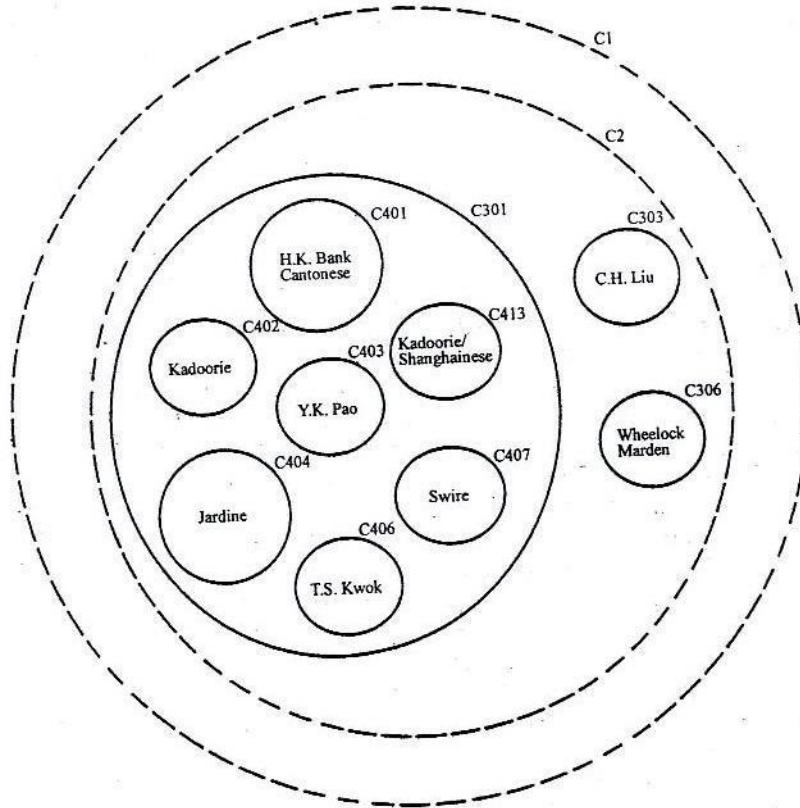
Kelompok-kelompok perusahaan Cina lainnya. yang sedang berada pada tahap kedua dalam periode ini adalah kelompok T.S. Kwok, yang mengambilalih Kowloon Motor Bus, dan. kelompok S.K. Lee yang mengambilalih kontrol atas Hong Kong and China Cas dan Hong Kong and Yaumatei Ferry masing-masing pada tahun 080 dan

1981. Kelompok TS. Kwok muncul dalam jaringan pada tahun 1981, sedang kelompok S.K. Lee muncul dalam jaringan pada tahun 1986.

i. Jaringan Pertalian Direktur Pada Tahun 1981

Perubahan-perubahan. pada akhir dekade 1970-an menghasilkan konfigurasi jaringan pertalian direktur yang sangat berbeda, seperti yang bisa. dilihat dalam gambar 3.

Gambar 3. Kelompok-kelompok Bisnis Diidentifikasi melalui Jaringan Pertalian Direktur, 1981



C1 ; C2 adalah komponen-komponen 1-diagram dan 2-diagram yang kaitannya longgar. C3XX adalah komponen-komponen 3-diagram dan 4-diagram yang kaitannya erat.

Berdasarkan kriteria kami, ada tiga. kelompok bisnis yang berkaitan erat. ini dijabarkan dalam Tabel 2. Salah satu dari kelompok-kelompok ini terdiri atas 31

perusahaan, dan bisa dipecah ke dalam sub-sub kelompok dengan menggunakan komponen-komponen diagram.

Dalam jaringan. tahun. 1981, terjadi integrasi dan diferensiasi. Kecuali dan kelompok kecil, sebagian besar perusahaan terkait dengan sebuah kelompok besar yang berkaitan erat yang disebut Kelompok Campuran dalam ' Tabel 2. Dalam kelompok ini, terdapat perbedaan-perbedaan. antara. sub-sub kelompok menurut garis nasionalitas, ukuran, dan sentralitas

Tabel 2 Profil Kelompok-kelompok Bisnis, 1981

Nama Kelompok	Dikontrol oleh orang Cina ?	Jumlah Perusahaan	% dari Modal yang ada	Setralitas Kelompok Jumlah perusahaan di pasar yang terkait dengan kelompok
C.H. Liu (303)	Ya	3	0,95	18
Wheellock Marden (306)	Tidak	6	0,53	8
Campuran (301)	Campuran	31	61,21	56+
Sub-kelompok dalam kelompok campuran				
HK Bank (401)	ya	13	33,06	56
Kardoorie (1) (402)	Tidak	3	5,27	35
YK. Pao (403)	Ya	3	5,15	28
Jardine (406)	Tidak	2	11,54	16
T.S. Kwok (406)	Ya	2	2,39	26
Swire (407)	Tidak	3	3,40	30
Kadoorie/ Shangtiainis (413)	Campuran	3	0,17	17

* Sentralitas ini tidak sama dengan jumlah total sentralitas sub-sub kelompok karena perusahaan-perusahaan. dalam sub-sub kelompok tersebut bisa jadi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sama.

Dilihat dari sudut besarnya perusahaan, jaringan tersebut masih didominasi oleh Hong Kong Bank dan Jardine. Hong Kong Bank menguasai 9,8 persen dari total modal di pasar saham, sedang dua perusahaan dari kelompok Jardine yang kecil-jardine Matheson dan Hong Kong Landmenguasai 11,45 persen. Proporsi mereka memang sudah

menurun dibanding dengan tingkat penguasaan mereka pada tahun 1976. Lebih dari itu, terjadi perubahan dramatis dalam ukuran perusahaan-perusahaan kelompok Jardine. Sementara pangsa Jardine dalam total modal yang ada di pasar saham mengalami penurunan drastis dari 7,05 persen menjadi 2,95 persen, pangsa Hong Kong Land mengalami kenaikan dari 6,2 persen ke 8,59 persen.

Dilihat dari sudut sentralitas, Hong Kong Bank masih dominan, yaitu terkait dengan 36 perusahaan. Hong Kong Bank, bersama dengan kelompok Kantonis, merupakan pusat jaringan tersebut pada tahun 1981. Pusat jaringan tahun 1976 yang didasarkan pada kelompok Jardine sudah hilang dari peredaran.

Dua kelompok bisnis yang didasarkan pada hong tradisional kelompok Hutchison dan kelompok Wharf-telah sima. Ini akibat dari dua akuisisi besar-besaran yang dilakukan oleh para usahawan Cina. lokal seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Dari diagram jaringan tersebut tampak perusahaan-perusahaan dalam kelompok YX Pao telah menjadi kelompok tersendiri. Perusahaan-perusahaan kelompok Hutchison, yang sekarang berlandung di bawah payung kelompok perusahaan K.S. Li, dalam diagram tersebut dimasukkan ke dalam kelompok Kantonis/Hong Kong Bank.

Kelompok-kelompok bisnis Cina yang terdiri atas multi-perusahaan muncul sebagai wajah baru dalam jaringan tersebut. Tidak seperti para usahawan Kantonis dalam kelompok-kelompok Kantonis/Hong Kong Bank pada tahun 1976 yang bisnis-bisnisnya telah mapan jauh sebelum Perang Dunia II, bisnis-bisnis Cina yang baru ini menjadi mapan baru pada dekade 1960-an.

Kekalahan Hong

Kenapa. hong-hong tidak memanfaatkan ledakan bisnis properti seperti yang dilakukan oleh para pengusaha Cina? Ada empat sebab. Pertama, karena sifat spekulatif bisnis properti, para hong yang konservatif tidak mau mengambil risiko. Kenyataannya memang banyak pengusaha Cina yang jatuh bangkrut karenanya. Goodyear Property Development Co. merupakan contoh yang tepat bagaimana sebuah perusahaan yang sangat sukses bisa jatuh bangkrut dalam tempo yang sangat singkat.

Kedua, pembangunan properti dalam dekade 1970-an dan 1980-an sebagian besar adalah pembangunan pencakar langit untuk perumahan padathuni di daerah-daerah baru.

Para eksekutif senior hong-hong, sebagian besar ekspatriat, cenderung tinggal dan bekerja di daerah-daerah Hong Kong yang lebih mewah dan tidak begitu sesak. Karena itu, mereka tidak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang daerah-daerah ini, dan dengan demikian sulit bagi mereka untuk menanamkan sejumlah besar uang ke dalam proyek-proyek pembangunan tersebut.

Ketiga, bisa jadi mereka tidak optimis akan masa depan Hong Kong. Sebagai orang Inggris, mereka memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk pindah dari Hong Kong dibanding dengan rekan-rekan Cina mereka. Investasi dalam gedung dan tanah akan menghilangkan keuntungan tersebut karena penanaman itu akan menahan investasi mereka di daerah koloni tersebut. Yang terakhir, pemilikan properti selalu menjadi alat membangun prestise sosial dan kekayaan di desa-desa Cina tradisional. Karena itu para pengusaha Cina paling menghargai properti sebagai investasi, dan sifat spekulatif bisnis tersebut dianggap wajar.

Berubahnya kondisi-kondisi ekonomi di daerah koloni tersebut memberi kesempatan bagi munculnya pengusaha-pengusaha besar Cina. Akan tetapi pemanfaatan kesempatan tersebut ditentukan oleh kondisi politik dan kelembagaan dalam masyarakat yang ada pada waktu itu. Lagi-lagi faktor politiklah yang memicu perubahan mendasar dalam jaringan tersebut, pada periode berikutnya.

Efek Negosiasi Cina-Inggris 1982-1984

Krisis kepercayaan bisnis akibat negosiasi Cina-Inggris tentang kerjaulatan Hong Kong tahun 1997 menyebabkan anjloknya pasar properti. Pada awal dekade 1980-an banyak perusahaan jatuh bangkrut. Tetapi waktu itu juga merupakan periode ketika perusahaan-perusahaan Cina mengkonsolidasikan kontrol mereka atas perusahaan-perusahaan anggota mereka. Ada juga yang kehilangan nyali dan pergi ke luar negeri, dan yang paling mencolok dari kelompok ini adalah seorang Cina pemegang saham mayoritas kelompok Wheelock Marden. Dia memutuskan menjual sahamnya, dan Y.K. Pao memanfaatkan situasi dan berhasil mengambilalih kontrol perusahaan tersebut.

Kelompok Jardine menderita pukulan berat dalam periode ini, salah satu sebabnya adalah reaksi mereka atas ancaman pengambilalihan oleh para pengusaha Cina. Setelah pengambilalihan Hong Kong dan Kowloon Wharf, Jardine dan Hong Kong Land

saling membeli sejumlah besar saham perusahaan mereka supaya pemangsa harus mengambil dua perusahaan sekaligus, dan itu ditafsirkan sebagai tidak mungkin. Sialnya strategi ini menjadi bumerang karena Hong Kong Land mengalami rugi besar pada waktu pasar properti anjlok. Akibatnya ukuran dan sentralitas kelompok Jardine semakin menciut.

Jaringan Tahun 1986

Konfigurasi jaringan pertalian direktur pada tahun 1986 bisa dilihat dalam Skema 4. Berhasil diidentifikasi sembilan kelompok bisnis yang terkait erat, seperti yang terlihat dalam Tabel 3.

Jaringan pada tahun 1986 terpecah menjadi kelompok-kelompok bisnis yang terpisah. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada lagi sebuah kelompok besar yang terkait erat yang meliputi sejumlah besar perusahaan dan yang menghubungkan kelompok-kelompok bisnis Cina dengan yang non-Cina.

Bangkitnya kelompok-kelompok bisnis besar Cina, yang terdiri atas multi-perusahaan dan terpisah-pisah, semakin menonjol. Gejala ini disertai dengan menurunnya jumlah kelompok bisnis non-Cina. Posisi kelompok Jardine semakin merosot, dan tinggal menguasai 6 persen dari total modal di pasar saham dan hanya terkait dengan 10 perusahaan.

Hong Kong Bank tetap mempertahankan dominasinya kalau dilihat dari ukurannya. Perusahaan itu sendiri menguasai 8,33 persen dari total modal di pasar saham. Tetapi sentralitasnya dalam jaringan itu sangat merosot. Hong Kong Bank terkait hanya dengan 16 perusahaan, dan kelompok Hong Kong Bank/Swire secara keseluruhan hanya terkait dengan 32 perusahaan. Mereka hanya menduduki tempat ketiga dalam skala sentralitas kelompok bisnis pada tahun 1986.

Dengan tetap memperhitungkan jumlah perusahaan dalam satu kelompok, dan mengakui pentingnya Hong Kong Bank sebagai sebuah lembaga independen, kita melihat kelompok K.S. Li telah menjadi kelompok bisnis terpenting dari segi penguasaan modal pasar saham, dan sentralitas.

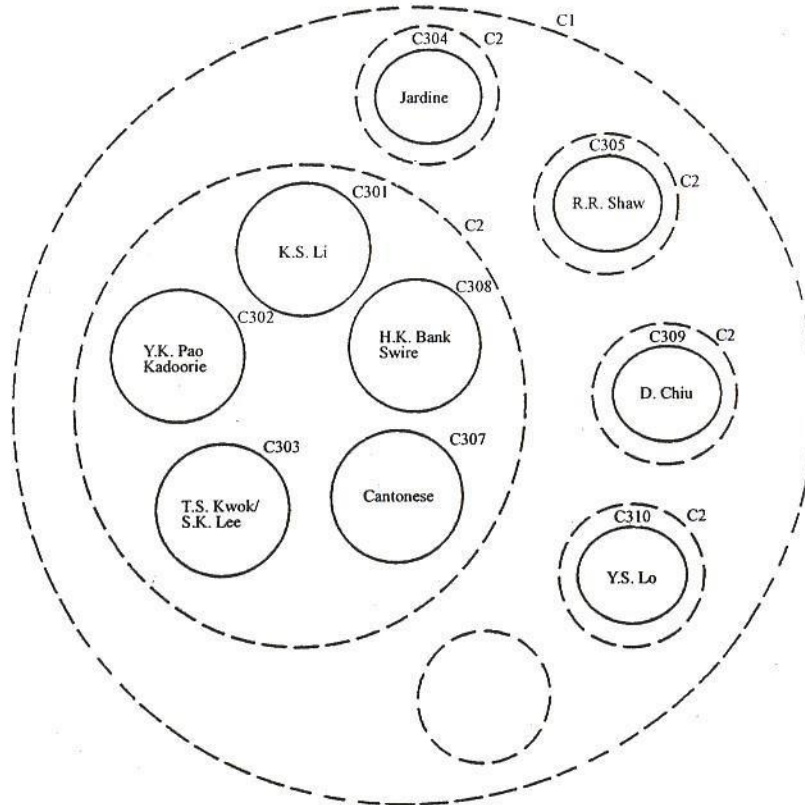
Kelompok ini menguasai 12,78 persen dari modal pasar saham dan terkait dengan 37 perusahaan. Tetapi dominasi kelompok K.S. Li tidak mencengkam. Ada empat kelompok

lain yang juga mempunyai posisi yang berarti dilihat dari ukuran dan sentralitasnya (yaitu yang menguasai lebih dari 6 persen modal pasar saham dan yang angka sentralitasnya lebih besar dari 20).

Dibandingkan dengan relatif tingginya tingkat sentralitas pada tahun 1976 dan 1981, keterkaitan di antara kelompok-kelompok bisnis telah menurun. Secara keseluruhan, jaringan bisnis di Hong Kong terkait secara longgar dan mempunyai beberapa sentral. Di samping itu, dalam kelompok-kelompok Cina pemilikan cenderung lebih terpusat, dan terdapat lebih banyak direktur yang memegang lebih dari satu posisi eksekutif di beberapa perusahaan. Ciri ini serupa dengan yang ditemukan dalam kelompok-kelompok bisnis Taiwan (Hamilton dkk., 1988) dan dapat dikatakan merupakan akibat dari gaya manajemen para pengusaha Cina, yang bersifat pribadi dan obsesi mereka mempertahankan kontrol atas investasi (Redding, 1989).'

Gambar 4

Kelompok-kelompok Bisnis diidentifikasi melalui Jaringan Pertalian Direktur, 1986



C1 ; C2 adalah komponen-komponen 1-diagram yang kaitannya longgar. C3XX ; adalah komponen-komponen 3 diagram dan 4-diagram yang kaitannya erat.

Tabel 3 Profil Kelompok-Kelompok Bisnis, 1986

Nama Kelompok	Dikontrol oleh orang Cina ?	Jumlah Perusahaan	% dari Modal yang ada	Setralitas Kelompok Jumlah perusahaan di pasar yang terkait dengan kelompok
K.S. Li (301)	Ya	4	12,78	37
Y.K. Pao/ Kadoorie (302)	Campuran	11	13,31	24
T.S. Kwok/S.K. Lee (303)	Ya	8	7,56	38
Jardine (304)	Tida	2	6,00	10
R.R. Shaw (305)	Ya	3	1,43	20
Kantonis (302)	Ya	5	7,07	32
H.K. Bank/ Swire (309)	Tidak	4	15,58	32
D. Chiu (309)	Ya	3	0,19	13
Y.S. Lo	Ya	3	0,55	0

4.3. Jaringan Dagang Regional Jeruk Mandarin: Bisnis Cina Dan Campur Tangan Pemerintah Malaysia.

a. NEP dan Pengusaha-pengusaha Cina di Malaysia V

Selama lebih dari sepuluh tahun setelah kemerdekaannya pada tahun 1957, Malaysia menganut kebijakan ekonomi pasar bebas. Pembangunan ekonomi pada periode ini menguntungkan modal asing dan bisnis Cina. Mayoritas Melayu, yang terkonsentrasi dalam industri rumah tangga, belum mendapat bagian dari kemajuan ekonomi tersebut. Kesenjangan ekonomi antara kelompok Melayu dengan kelompok Cina terus meningkat. Ketegangan sosial termasuk, dan ketidakpuasan di kalangan Melayu. (Bumiputera) akan kesenjangan ini melahirkan kerusuhan rasial yang parah pada tahun 1969.

Pada tahun 1970, generasi muda pemimpin Melayu menekan pemerintah melakukan intervensi di bidang ekonomi. Mereka berusaha memperkecil ketergantungan pembangunan ekonomi Malaysia pada orang Cina Malaysia, dan meningkatkan kekuatan ekonomi orang Melayu dengan jalan memberikan kontrol yang lebih besar kepada mereka atas sumber daya ekonomi negara tersebut. Sebuah strategi ekonomi baru, New Economic Policy (NEP), diterapkan pada tahun 1971. NEP merupakan sebuah rencana 20 tahun yang ambisius, yang bertujuan untuk (1) meningkatkan proses restrukturisasi masyarakat Malaysia untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi, dan (2) untuk melenyapkan kemiskinan dengan menaikkan tingkat pendapatan dan menyediakan lebih banyak kesempatan kerja untuk semua orang Malaysia tanpa memandang ras (Mid-Term Review of the Second Malaysia Plan, 1973:1, dikutip dari Jesudason, 1988, hlm. 71).

Unsur yang paling menonjol dari kebijakan tersebut adalah perluasan peran negara untuk mengimbangi dominasi ekonomi modal asing dan modal Cina. Orang Melayu ditargetkan untuk mengontrol paling tidak 30 persen dari keseluruhan modal perusahaan pada tahun 1990. Pada tahun 1970, mereka cuma mengontrol 2 persen. Perusahaan-perusahaan negara seperti Perbadanan Nasional (PEMAS) didirikan untuk "memperoleh aset-aset yang dicadangkan untuk orang Melayu dan orang-orang lain lainnya sampai mereka sendiri mempunyai kemampuan untuk mendapatkan saham-saham tersebut (Mid-Term Review of the Second Malaysia Plan, 1973, hlm. 14, dikutip dari Jesudason, 1988, hlm. 72). Di bawah NEP, perusahaan-perusahaan negara menikmati kemudahan khusus dari badan-badan pemerintah untuk mengimbangi dominasi ekonomi para pengusaha Cina. Karena itu kontrol ekonomi oleh negara mengalami kenaikan pada awal dekade 1970-an.

Akibatnya bisnis Cina yang berskala kecil dan menengah, yang terutama bergerak di bidang perdagangan grosir dan eceran, transportasi, dan dalam bidang konstruksi serta manufaktur papan bawah menghadapi saingan yang lebih banyak. Mereka mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan-perusahaan Melayu dalam mendapatkan kontrak dengan pemerintah. Meskipun demikian, seperti dikatakan oleh Jesudason (1989, hlm. 148), pengusaha-pengusaha Cina diuntungkan oleh adanya jaringan pembeli-perjual-pengecer yang transaksinya dipengaruhi oleh ikatan dan loyalitas etnik. Para pengecer Cina dapat mengandalkan penduduk Cina di perkotaan yang jumlahnya besar sebagai

pasar yang terjamin. Ini merupakan faktor yang harus diperhitungkan untuk memahami reaksi para pengusaha Cina terhadap insiden jeruk mandarin pada tahun 1985. Perusahaan-perusahaan kecil Cina berhasil menghindari regulasi pemerintah tersebut dengan jalan menggunakan orang Melayu sebagai tameng. Orang-orang Melayu dibayar bulanan untuk mendapatkan izin usaha dari kementerian-kementerian yang bersangkutan. Praktek "Ali-Baba" ini menjamur di sektor-sektor usaha yang menganakemaskan orang Melayu dalam pemberian izin-izin usaha (Nonini, 1983).

Para pengusaha Cina yang lebih besar tidak begitu khawatir tersingkir, dan mereka lebih disibukkan dengan mencari celah-celah usaha untuk melakukan ekspansi. Meskipun diharuskan menjual paling tidak 30 persen dari saham yang dikeluarkan, dengan korting harga, kepada orang Melayu, hal ini tidak masalah karena perusahaan-perusahaan besar mempunyai sumber keuangan yang bisa menutup kerugian tersebut (jesudason, 1989, h1m. 150). Karena adanya kendala-kendala ini, perusahaan-perusahaan besar Cina mulai bertualang dalam pembangunan properti yang kendal-kendalanya tidak begitu banyak dan menjanjikan hasil yang cepat, tidak seperti halnya industri pengolahan. Konglomerat-konglomerat ini juga semakin mengandalkan merger dan pengambilalihan sebagai strategi ekspansi, menyebarkan aset dan kegiatan bisnis mereka ke luar batas-batas nasional negara (jesudason, 1989, 151).

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Gerakan (Sunday Times, 26 Maret, 1989)-yaitu sebuah partai oposisi yang kebanyakan anggotanya beretnis Cina-pada pertengahan dekade 1980-an NEP sudah mencapai tujuan utamanya karena pemilikan modal oleh Bumiputera. dalam sektor usaha telah melampaui 30 persen. Akan tetapi laporan itu menunjukkan bahwa sementara NEP berhasil menciptakan kelompok-kelompok finansial Melayu yang besar, kebijakan tersebut gagal menumbuhkan perusahaan kecil Melayu. Dengan kata lain, kekayaan hanya didistribusikan kepada sekelompok kecil orang Melayu. Partai tersebut juga mengkritik pemerintah yang menggunakan kebijakan perizinan, penerimaan tenaga kerja, perumahan, penggusuran tanah, dan pendidikan untuk membatasi partisipasi "orang Malaysia lainnya" (yang maksudnya pasti etnis Cina) di beberapa area ekonomi sementara Bumiputera diberi kesempatan untuk mendapatkan saham dengan potongan harga. Meskipun studi yang dilakukan oleh Gerakan menggarisbawahi sukses NEP dalam mencapai target 30

persen kepemilikan Bumiputera, studi tersebut menyiratkan bahwa kebijakan penganakemasan sudah habis legitimusnya. Laporan itu sendiri mencerminkan terus berlangsungnya pergulatan ekonomi antara etnis Cina melawan dominasi politik orang Melayu.

b. Usaha Menggalang Perdagangan Langsung dengan Cina.

Ketika mulai melakukan campur tangan pada tahun 1970, pemerintah Malaysia juga berupaya mengadakan perdagangan langsung dengan jaringan Dagang Regional jeruk Mandarin.

Negara-negara sosialis. Yang dituju Malaysia adalah hubungan dagang langsung dengan Cina. Tujuan strategi ini bukan hanya untuk menjangkau pasar Cina yang menjanjikan banyak keuntungan, tetapi juga untuk mempromosikan perusahaan-perusahaan eceran Bumiputera yang bersaing dengan pengusaha-pengusaha Cina lokal (Gale, 1981, hlm. 110).

Biasanya komoditi dari Cina. diimpor ke Malaysia lewat Singapura dan Hong Kong. Perantara di Singapura dan Hong Kong ini menarik 4-5 persen komisi dari importir Malaysia. PEMAS, sebuah perusahaan negara, ingin memonopoli perdagangan ini dan menyingkirkan peran negen perantara. Strateginya: PEMAS yang pada tahun 1971 ditunjuk sebagai agen tunggal dalam perdagangan dengan negerinegeri sosialis, akan diberi kekuasaan eksklusif untuk mengeluarkan izin impor komoditi dari Cina. Para importir Malaysia kemudian langsung mengimpor dari Cina dan membayar 0,5 persen komisi kepada PEMAS. Rendahnya komisi itu diharap membuat para. importir Malaysia meninggalkan para. pedagang perantara di Hong Kong dan, Singapura. Lebih dari itu, kebijakan baru tersebut diharapkan membuat para pedagang Malaysia yang memegang izin resmi akan menjadi sangat kompetitif dalam menghadapi para pedagang tradisional Cina. Kebijakan ini merupakan langkah awal rencana PEMAS untuk mengontrol impor dari Cina yang akan dilakukan dengan jalan menolak memberikan izin impor kepada pengusaha Cina dan memberikannya kepada pengusaha Bumiputera.

Para pengusaha Cina menyadari bahwa PEMAS mampu mempengaruhi struktur ekonomi Malaysia. Melalui jalur-jalur politik dan komersial, mereka mendesak pemerintah untuk tetap mengizinkan impor barang-barang Cina melalui Hong Kong dan

Singapura. Meskipun mereka harus membayar komisi yang lebih tinggi dan dengan demikian mempertinggi ongkos transaksi, jaringan bisnis Cina ini bisa diandalkan. Mereka takut kalau impor langsung akan menimbulkan masalah, padahal yang diimpor dari Cina adalah barang-barang mudah busuk. Mereka juga khawatir adanya kemungkinan putusnya arus perdagangan, yang akan menaikkan harga-harga, dan dengan demikian mengancam kehidupan mereka (Gale, 1981, hlm. 113).

Pada saat yang sama, Cina menyambut dingin usulan PEMAS, yang tidak dinegosiasikan dengan Cina sebelum diumumkan. Ternyata asuransi pemerintah Malaysia, bahwa perusahaan-perusahaan negara Cina akan lebih suka berdagang langsung dengan perusahaan-perusahaan negara Malaysia daripada dengan pedagang Cina di negara ketiga, keliru. Dalam Guangzhou Spring Fair yang diselenggarakan bulan April 1972, para eksportir Cina menolak menjual produk-produk tertentu, yang biasanya dijual kepada para importir tradisional mereka, kepada PEMAS. Malahan, delegasi-delegasi Malaysia dipersilakan membeli dari pedagang-pedagang perantara yang justru ingin mereka potong perannya (Gale, 1981, hlm..114). Darah ternyata lebih kental daripada air, dan koneksi Cina tetap kuat terjalin.

Karena pemerintah Cina enggan meninggalkan ikatan-ikatannya dengan para pedagang perantara tradisional, pelan-pelan PEMAS terpaksa mencabut rencananya mempromosikan partisipasi langsung para pengusaha Bumiputera dalam perdagangan Cina. Menurunnya jumlah wakil Bumiputera dalam misi-misi perdagangan berikutnya kelihatan mencolok. Dari 90 orang delegasi yang berangkat ke Cina pada bulan April 1973, hanya 15 pedagang Melayu yang ikut serta. Padahal dalam delegasi sebelumnya, komposisi rasialnya seimbang. Pada bulan April 1979, hanya ada sembilan Bumiputera di antara 239 orang delegasi (Gale, 1981, hlm. 115). Pemerintah Cina telah menggagalkan rencana PEMAS memonopoli perdagangan dengan Cina dan mempromosikan perusahaan-perusahaan Bumiputera. Menurut Gale, "PEMAS sudah menyerupai agen yang menjadi saluran perdagangan yang didominasi para pengusaha non-Melayu tradisional" (1981, him. 115).

Sampai tahun 1981, PEMAS telah mengorganisir kondisi perdagangan ke Cina. Negosiasi dengan Cina berjalan lambat dan alot.

Inisiatif pemerintah Malaysia untuk menjalin perdagangan langsung antara Cina dan Malaysia tetap dipertahankan dalam agenda selama dekade 1980-an. Setiap tahun pembicaraan berkisar pada perlunya Cina membuka pasar bagi para pengusaha Bumiputera, dan jangan hanya melakukan transaksi dengan orang-orang keturunan Cina.

Pada tahun 1985, komite tingkat tinggi antar-menteri yang terdiri dari para pejabat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri serta Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) dibentuk untuk mencari strategi pengembangan perdagangan langsung dengan Cina (Strait Times, 29 April, 1985).

Meskipun perdagangan antara Cina dan Malaysia tumbuh dengan mantap dari M\$ 704 juta pada tahun 1974 menjadi M\$ 1,1 milyar pada tahun 1984 (Strait Times, 29 April, 1985)-sampai waktu itu pemerintah Malaysia tetap belum berhasil memotong peran negara ketiga dan menyalurkan perdagangan dengan Cina lewat PEMAS, yang mewakili kepentingan Bumiputera. Insiden jeruk mandarin pada tahun 1985 mencerminkan kegagalan usaha PEMAS (dan pemerintah Malaysia) untuk memotong peran para pedagang perantara, terutama dari Singapura, dan menempatkan monopoli Bumiputera untuk menggantikan peran pedagang-pedagang Cina tradisional.

c. Insiden jeruk Mandarin pada Tahun 1985

Pada tanggal 14 dan 15 Januari 1985, di bawah terik sinar matahari tropis, 13 truk jeruk mandarin yang dibawa masuk ke Johor Baru dari Singapura ditahan oleh bea cukai Malaysia. Yang ditahan berupa 20.000 kotak (masing-masing berisi 100 jeruk mandarin) seharga M\$ 700.000. Empat hari kemudian, importir Malaysia membayar pajak dan cukai sebesar M\$ 280.000 untuk mengambil buah yang cepat busuk tersebut. Beberapa waktu kemudian pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa importir tersebut telah melanggar izin resmi yang mengharuskannya mengimpor jeruk mandarin langsung dari Cina, bukannya melalui pedagang perantara dari negeri ketiga. Meskipun secara teknis importir tersebut melanggar peraturan perdagangan langsung, ini baru pertama kalinya pemerintah menahan pengiriman jeruk mandarin yang diimpor melalui Singapura.

Tindakan pemerintah tersebut membenarkan sinyalemen surat kabar bahwa PEMAS mencoba memonopoli perdagangan jeruk mandarin dengan jalan memotong jalur para importir Cina tradisional. Menurut salah satu laporan, pada awal bulan Januari PEMAS mendekati Kuala Lumpur Fruits Wholesaler's Association (Asosiasi Grosir Buah Kuala Lumpur) dan menawarkan 80.000 kotak jeruk mandarin untuk memenuhi kebutuhan perayaan Tahun Baru Cina. Thwaran ini ditolak karena PEMAS minta uang muka sebesar 50 persen dan sisanya harus dilunasi pada waktu penyerahan barang. Sistem tersebut dianggap tidak menguntungkan dibandingkan dengan sistem para pedagang Singapura yang memberikan tenggang waktu pembayaran selama 30-45 hari setelah pengiriman barang. Lebih dari itu, mereka tidak yakin akan kualitas dan sumber suplai PEMAS. Mereka juga tidak siap meninggalkan mitra dagang Singapura mereka karena sudah ada hubungan saling percaya yang menjamm, kepastian, "mengikuti manajemen bisnis gaya Cina" yang dipraktekkan dari generasi ke generasi (Kin Kwok Daily News, 7 Januari, 1985).

Insiden di Johor Baru tersebut membenarkan kekhawatiran para pedagang Cina tradisional bahwa PEMAS, dengan dukungan pemerintah, sedang berusaha mematahkan jaringan dagang Cina. dalam perdagangan jeruk mandarin dan menggantikannya dengan monopoli Bumiputera. Pada tanggal 18 Januari: 1985, di bawah tekanan yang gencar, Kementerian Perdagangan dan Industri (KPI) mengakui telah memberikan dua izin resmi kepada dua perusahaan Bumiputera pada bulan Desember 1984 untuk mengimpor 450.000 kotak jeruk mandarin langsung dari Cina. Dua puluh buah lamaran lagi-bisa diduga berasal dari para pedagang tradisional Cina sedang dipertimbangkan (Sin Chew fit Poh, 19 Januari, 1985). Karena permintaan jeruk mandarin untuk perayaan Tahun Baru Cina pada tahun 1985 diperkirakan mencapai 500.000 sampai 600.000 kotak, dua izin impor yang dipegang oleh dua perusahaan Bumiputra tersebut mencakup 80-90 persen dari total permintaan. Ini secara de facto menciptakan monopoli.

Karena menghancurkan pola perdagangan yang telah lama mapan, pemerintah Malaysia memicu serentetan reaksi dari pihak-pihak yang terlibat, di dalam maupun di luar Malaysia. Pertama, para importir/grosir buah Cina di Malaysia sudah pasti prihatin, dan merekalah yang pertama kali bereaksi. Di samping mengajukan protes keras, mereka dengan cepat mengeluarkan ancaman boikot tersamar. Setelah mengadakan pertemuan

penting pada tanggal 18 Januari, Kuala Lumpur Fruits Wholesalers' Association menyatakan bahwa, meskipun sebagai organisasi tidak akan memboikot Satria Utara (sebuah perusahaan Bumiputera yang mengantungi izin impor jeruk mandarin langsung dari Cina), asosiasi tersebut tidak bisa apa-apa kalau para pedagang individual memutuskan melakukan boikot (Sin Chew fit Poli, 19 Januari, 1985). Tiga hari kemudian diberitakan lagi bahwa para grosir memutuskan untuk tidak mencari izin impor jeruk dari Singapura. Malahan, untuk mematahkan usaha monopoli, mereka berpaling ke Taiwan dan Pakistan untuk mencari suplai jeruk yang tidak memerlukan lisensi impor. Sekali lagi mereka menekankan bahwa meskipun tidak menganjurkan para pedagang dan konsumen melakukan aksi, mereka tidak. mengesampingkan "kemungkinan untuk melakukan boikot" (Sin Chew fit Poh, 22 Januari, 1985). Para pedagang buah beretnis Cina dari kota-kota Malaysia lainnya bersikap sama.

Para politisi, terutama yang mengaku sebagai pembela kepentingan etnis Cina, dengan cepat memanipulasi kejadian itu untuk memperoleh dukungan dari komunitas etnis Cina. Partai oposisi Democratic Action Party (DAP), yang boleh dikatakan basisnya. Adalah masyarakat Cina, mengeluarkan pernyataan publik pada tanggal 17 Januari yang isinya mengecam upaya pemerintah untuk memonopoli perdagangan jeruk mandarin. Pada tanggal 18 Januari, Sekjen DAP mengumumkan bahwa: "Kecuali apabila pemerintah membatalkan usaha monopolinya, saya mengusulkan agar masyarakat dengan serius mempertimbangkan untuk memboikot semua jeruk mandarin yang diimpor langsung dari Cina sebagai protes terhadap usaha-usaha pemerintah yang tidak ada habisnya untuk mencampuri gaya hidup tradisional kita" (Sin Chew fit Poli, 19 Januari, 1985). Sentimen etnik dan budaya orang-orang Cina bangkit.

Youth Movement dari Malaysian Chinese Association (MCA) tidak mau ketinggalan. MCA merupakan anggota pendukung Barisan Nasional, koalisi nasional yang berkuasa. Youth Movement mengeluarkan pernyataan keras yang memprotes tindakan KPI dan mengingatkan akan adanya kemungkinan boikot. Tetapi posisi para pemimpin MCA sulit karena banyak dari mereka duduk dalam kabinet dan terbukti gagal mencegah KPI mengambil langkah monopoli tersebut. Mereka dikritik oposisi sebagai "pengkhianat" yang "menjual" kepentingan etnis Cina. kepada orang Melayu.

Para penjaja buah beretnis Cina yang membentuk jaringan pengecer menjadi partisipan sukarela dalam pemboikotan jeruk mandarin. Pertama, mereka tergantung pada para grosir tradisional untuk memperoleh suplai jeruk mandarin, dan dengan demikian tidak mempunyai pilihan lain kecuali mendukung para grosir tradisional tersebut. Kedua, kepentingan jangka panjang mereka sama dengan para grosir tersebut, yaitu mempertahankan perdagangan jeruk mandarin dalam jaringan perdagangan Cina. Ini karena jaringan tersebut memberikan syarat-syarat kredit yang lunak, dan menjan-dn suplai dengan biaya yang rendah. Ketiga, mereka sama-sama tidak senang terhadap kalangan Bumiputra dan pemerintah yang berupaya mencampuri, apa yang mereka anggap sebagai bisnis dan cara hidup orang Cina.

Dalam beberapa kesempatan, menteri-menteri dan pejabat-pejabat pemerintah mengimbau para pengecer untuk menghentikan boikot jeruk mandarin. Tetapi menurut beberapa penjahaj, konsumenlah yang paling sangat memboikot jeruk mandarin. Bahkan terjadi insiden pengumpatan dan kekerasan yang dilakukan oleh konsumen terhadap panjahaj yang tidak berpartisipasi dalam pemboikotan tersebut dan tetap memajang jeruk mandarin dari Cina untuk dijual. Tidak bisa dipastikan apakah para anggota. serikat rahasia. juga terlibat dalam boikot tersebut. Melihat watak dari serikat-serikat rahasia Malaysia, mereka bisa diduga terlibat.

Di ujung akhir rantai komoditi, para konsumen Cina mendukung boikot tersebut, terlepas dari makna. simbolis jeruk mandarin. Masalah tersebut dianggap cukup serius sehingga mereka bersedia berkorban. Seorang konsumen yang memboikot berkata bahwa konsumen etnis Cina "paling akan membeli dua kilo jeruk mandarin untuk kepentingan bai-shen (sesaji)." Untuk kado dan konsumsi, "kami dapat membeli jeruk biasa dari negeri-negeri lain" (Kin Kwok Daily News, 17 januari, 1989). Menarik untuk dicatat bahwa arti keagamaan dari jeruk mandarin masih tetap diutamakan. Banyak konsumen yang langsung menerima jeruk mandarin dari Taiwan dan Pakistan sebagai pengganti. Menurut seorang - informan, sebagian orang tua ternyata mengesahkan penggunaan "jeruk biasa" sebagai pengganti, dalam perayaan Tahun Baru dengan mengutip sebuah preseden pada Tahun Baru Cina 1942, yaitu tidak lama sctelah invasi Jepang. Tampaknya yang ingin disampaikan adalah bahwa jeruk mandarin memang penting, tetapi bukannya tidak dapat ditiadakan atau diganti. Meskipun diikat erat oleh tradisi,

orang Cina juga bersikap pragmatis dan praktis. Praktek~praktek tradisi dapat dikompromikan untuk menghadapi keadaan krisis.

Pemerintah terpaksa mengalah menghadapi tekanan komunitas etnis Cina. Pada tanggal 29 dan 30 Januari, KPI menyetujui 33 izin impor untuk mendatangkan 295.000 kotak jeruk mandarin dari negara ketiga. Pada. tanggal 4 Februari, kira-kira dua minggu sebelum hari perayaan Tahun Baru (yang jatuh pada tanggal 20 Februari) KPI menyatakan bahwa telah disetujui lebih dari ' 100 izin impor jeruk mandarin dari negara ketiga. Menurut seorang juru bicara KPL suplai jeruk mandarin terpotong oleh adanya "perdebatan dagang", dan Kementrian "tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keengganan para pengecer untuk menjual jeruk kepada publik" (Strait Umes, 12 Februari, 1-985).

Perusahaan Bumiputera Satria Utara, yang memegang izin untuk mengimpor 430.000 kotak jeruk mandarin juga menghadapi banyak masalah. Perusahaan tersebut tidak hanya menghadapi kesulitan mendapatkan order dari para grosir tradisional, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan suplai, jeruk dari Cina. Menurut The Strait Times (5 Maret, 1985), Satria Utara gagal mengumpulkan cukup uang untuk mengorder jeruk seharga S\$ 14,5 juta dari Guang dong Province Shantou Special Economic Zone Import and Export Association. Karena itu perusahaan tersebut terpaksa, mendekati para grosir lokal untuk meminta pembayaran di muka. secara penuh yang kemudian diturunkan menjadi 50 persen. Thwaran tersebut ditolak.

Akibatnya perusahaan tersebut terpaksa membatalkan order sebanyak 270.000 kotak dan membayar M\$ 917.500 kepada para eksportir Cina sebagai kompensasi pembatalan kontrak.

Pada akhir Januari, para pedagang Singapura, karena menghadapi ketidakpastian pasar, telah membatalkan dua pengapalan yang terdiri atas 120.000 kotak jeruk mandarin dari Cina. (Order aslinya adalah 6 pengapalan Jeruk-jeruk mandarin yang, diimpor untuk konsumen Malaysia diobral ke konsumen Singapura melalui promosi di super market, atau diekspor ke negara-negara lain seperti Brunei dan Indonesia. Di Cina, order-order yang dibatalkan (baik oleh pedagang Singapura maupun Satria Utara) dipasarkan di Beijing dan kota-kota. Cina lainnya untuk konsumsi lokal (Lianche Zaobao, 2 Februari, 1989). Ketika KPI mengeluarkan izin impor untuk para grosir tradisional Malaysia,

waktunya sudah tidak cukup lagi untuk mengorder pengapalan baru melalui Singapura, walaupun penjualannya terjamin.

Tahun Baru Cina tahun 1985 banyak menghasilkan kerugian dan hanya memberi sedikit keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Para grosir etnis Cina tradisional di Malaysia (dan para eksportir di Singapura) kehilangan M\$ 2 juta dari bisnis jeruk mereka. Para pengecer tradisional kehilangan pendapatan dari penjualan jeruk mandarin pada hari perayaan tersebut. Perusahaan-perusahaan Bumiputra, yang mengharapkan bisa mengontrol sebagian besar perdagangan jeruk mandarin, menderita kerugian besar akibat boikot tersebut. Masyarakat Cina terpaksa merayakan Tahun Baru Cina tanpa berkali "emas" (gum) yang disimbolkan jeruk mandarin Cina. Pemerintah Malaysia sekaligus kehilangan kredibilitas dan dukungan populer dari masyarakat etnis Cina. Itulah kerugian-kerugian yang harus ditanggung ketika sebuah rantai jaringan perdagangan yang tertutup, diputus oleh faktor eksternal, dalam kasus ini oleh campur tangan pemerintah. Kasus ini membuktikan kekuatan dan sekaligus kelemahan jaringan Cina dalam menyalurkan barang-barang dari Cina di Asia Tenggara.

d. Koneksi Etnis dan Campur Tangan Negara

Jaringan perdagangan jeruk mandarin Cina, seperti yang dilukiskan dalam insiden tahun 1985, mencakup seperangkat koneksi erat antara Para pengusaha Cina di berbagai kota dan negara. Jaringan perdagangan yang didominasi oleh orang Cina terdiri dari produsen dan eksportir di Cina, yang diwakili oleh perusahaan-perusahaan negara, para importir/eksportir di Singapura, para grosir di Malaysia (dan berbagai bagian Asia Tenggara lainnya), para pengecer di kota-kota besar dan kecil yang banyak penduduk etnis Cirtanya, dan akhirnya para konsumen etnis Cina. Jaringan koneksi-koneksi bisnis yang kuat tersebut dimapankan melalui hubungan bisnis yang berlanjut selama bertahun-tahun.

Distribusi jeruk mandarin dari Shantou (Swatow) dan Chaozhou (Teochew) secara eksklusif ditangani oleh Shantou Special Zone Import and Export Association yang dijalankan oleh negara. Karena jumlah jeruk yang diproduksi petani--tidak seperti barang manufaktur tidak mudah dikontrol, para pejabat Asosiasi tersebut memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah jeruk mandarin yang dibagikan setiap

tahunnya kepada grosir-grosir yang saling bersaing. Melalui transaksi bisnis menahun yang disertai dengan kontak-kontak pribadi, para importir/grosir dari Singapura menanam dan membangun hubungan-hubungan pribadi jangka panjang (guanxi) dengan staf kelompok Shantou. Hubungan tersebut melampaui sekedar kontak bisnis dan mencakup kewajiban-kewajiban timbal balik.

Hubungan tersebut diperkuat oleh ikatan-ikatan regional yang didasarkan pada dialek Teochew antara para eksportir di Cina dan pedagang-pedagang buah serta sayuran di Singapura (juga para grosir di Malaysia) yang asal-usulnya kebanyakan dari Teochew.

Dalam Basar Musim Gugur Guangzhou, para pedagang besar jeruk mandarin dari Singapura berhasil memastikan transaksi impor jeruk mandarin dari Shantou dan Chaozhou untuk didistribusikan ke Singapura, Malaysia, Brunei, dan sampai tahun 1984, Indonesia. Hubungan guanxi tersebut didasarkan pada ikatan etnis, dan utusan bisnis Melayu dari Malaysia sulit membangun perdagangan langsung dengan Cina. Lebih dari itu, hubungan-hubungan tersebut juga diikat oleh tradisi dan didasarkan pada hubungan pribadi, sehingga bahkan pengusaha Cina Malaysia pun mengalami kesulitan menembus status "pedagang favorit" yang dibangun oleh para pedagang Singapura selama bertahun-tahun. Rasa kepercayaan dan kewajiban timbal balik telah tertanam dalam. Karena menghormati guanxi jangka panjang, para eksportir Cina enggan menghancurkan praktek hubungan dagang tradisional mereka dengan jalan memotong "langganan-langganan dan teman-teman lama" mereka di Singapura.

Dengan demikian, importir/eksportir tradisional Singapura menikmati keuntungan kompetitif karena mereka bisa memastikan suplai jeruk mandarin dari Cina untuk didistribusikan ke kota-kota lain di Asia Tenggara. Keuntungan ini diperoleh pertama-tama karena Singapura mempunyai fasilitas pelabuhan dan gudang yang canggih, yang secara historis menjadikannya entrepot antara Cina dan Asia Tenggara. Dengan demikian, para grosir tradisional Malaysia tergantung pada Singapura untuk memperoleh suplai jeruk Mandarin dari Cina, dan barang-barang lainnya. Mereka mengorder jeruk mandarin dari Singapura dengan harga yang ditetapkan oleh para pedagang di sana, dan mendapat tenggang waktu kredit dari 30 sampai 45 hari. Melalui kontak bisnis yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, mereka membangun guanxi jangka panjang

dengan para pedagang Singapura, dan karena itu menikmati hak yang hampir eksklusif untuk mengimpor jeruk mandarin dari Singapura. Mereka berpendapat bahwa pola hubungan dagang ini mudah dikelola; tidak riskan, dan menguntungkan kedua belah pihak. Lebih dari itu, karena terikat guanxi, kalau para grosir tradisional Malaysia memotong "rekanan" Singapura, mereka dengan jalan berhubungan dagang langsung dengan Chia, mereka sama dengan mengkhianati kepercayaan.

Pola bisnis dan hubungan sosial yang sama juga terdapat dalam hubungan transaksi antara grosir-grosir tradisional dengan para pengecer yang membentuk jaringan distribusi di Malaysia. Kedua belah pihak mengandalkan pola hubungan saling mendukung yang sudah mapan yang didasarkan pada kewajiban timbal balik. Para pengecer tergantung pada dealer-dealer yang lebih besar untuk mendapat suplai barang dan kredit uang untuk membiayai bisnis mereka yang bermodal kecil. Jaringan pengecer terdiri atas sekelompok penjajah yang loyal, yang pada gilirannya memungkinkan para grosir lebih mengontrol pasar.

Akhirnya, di ujung jaringan perdagangan ini adalah konsumen yang kebanyakan beretnis Cina. Karena adanya arti simbolik dalam jeruk mandarin Cina selama perayaan Tahun Baru Cina, permintaan selalu kuat dan kontinu. Kontinuitas permintaan itulah yang membantu mempertahankan jaringan perdagangan jeruk mandarin di atas. Permintaan dan konsumsi jeruk mandarin dalam masyarakat Cina di Asia Tenggara bukan saja bersifat ekonomi murni, tetapi juga mengandung arti budaya. Inilah sebabnya kenapa reaksi masyarakat Cina Malaysia terhadap insiden 1985 tersebut diwarnai dengan sentimen etnis yang kuat. Boikot tersebut mungkin tidak akan begitu efektif kalau produknya tidak begitu bersifat "Cina". Juga, boikot tersebut bertujuan mencegah pemerintah melakukan campur tangan bukan hanya dalam impor jeruk mandarin, tetapi juga semua barang-barang dari Cina. Yang menjadi isu adalah "Tahun ini jeruk mandarin, tahun depan apa lagi?".⁶ Para konsumen Cina tampaknya tidak keberatan merayakan Tahun Baru cuma tanpa jeruk mandarin dari Cina. Yang ikut dirayakan dalam perayaan Tahun Baru pada tahun itu adalah keberhasilan aksi kolektif mereka dalam menghadapi percobaan monopoli para pengusaha Bumiputera.

Dari diskusi di atas, jelas bahwa jaringan perdagangan jeruk mandarin bersifat khusus Cina; mereka tidak dengan mudah memungkinkan masuknya unsur-unsur "asing".

Keuntungan kompetitif dan jaringan Cina ini diakui oleh Dr Mahathk Perdana Menteri Malaysia, dalam bukunya yang kontroversial yang diterbitkan pada tahun 1970, *71st Malay Dilemma* (1970, film. 32-33):

Metode-metode bisnis Cina dan jangkauan kontrol mereka dalam perekonomian sangat tidak memungkinkan terjadinya kompetisi antara komunitas mereka dengan komunitas Lainnya. Koneksi dan pertalian bisnis komunal yang rapat, kontrol mereka yang ekstensif atas bisnis grosir dan eceran, kontrol mereka atas transportasi, bank-bank mereka yang kuat, dan kekayaan pribadi mereka, membentuk sebuah tameng yang melindungi mereka dari infiltrasi yang berarti, yang dilakukan oleh komunitas-komunitas lain terhadap benteng-benteng ekonomi mereka di dalam masyarakat pasar bebas. Jadi kekuatan jaringan perdagangan Cina terletak pada monopoli.

Seperti yang diamati Linda Lim (1983, hlm. 8, huruf miring merupakan tambahan), "Sekali mapan, monopoli cenderung mempertahankan posisinya, terutama kalau bisnis pribadi dan jaringan-jaringan sosial berfungsi sebagai perintang terhadap masuknya para pendatang baru." Mengacu pada monopoli-monopoli ekonomi Cina di Asia Tenggara, Lim (1983, hlm. 8) lebih lanjut mengamati bahwa "Monopoli-monopoli ekonomi yang sukses hanya bisa dipatahkan oleh campur tangan negara, dan ini jarang terjadi tanpa menimbulkan biaya ekonomi yang besar dan ketidakefisienan."

Situasi dan risikonya bukannya tidak diperhitungkan oleh PEMAS dan para pembuat kebijakan di KPI. Yang terjadi adalah salah perhitungan. Untuk mengulas kegagalan PEMAS dalam usahanya memotong peranan pedagang perantara Singapura dan mengontrol perdagangan jeruk mandarin, perlu dilihat apa yang mendasari keputusan campur tangan PEMAS, dan menganalisis kegagalannya.

Salah satu strategi memasuki jaringan yang tertutup adalah dengan menggunakan kekuatan politik negara untuk melakukan intervensi. Dalam usaha gandanya membangun hubungan dagang langsung dengan Cina dan mengembangkan kewiraswastaan Bumiputra, PEMAS pada mulanya berusaha membentuk hubungan dagang antar-pemerintah melalui perusahaan negara. Upaya itu gagal karena pihak Cina enggan memotong jalur pedagang perantara tradisional di Hong Kong dan Singapura, tidak diragukan lagi sikap ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik dan etnis. Pemerintah Malaysia juga mencoba menekan jaringan Cina dengan jalan mengenakan 5

persen pajak ekstra. terhadap barang-barang dari Cina yang diimpor melalui negara ketiga. Pengaruh langkah ini tampaknya kecil karena para pedagang dan konsumen etnis Cina di Malaysia siap menanggung tambahan biaya tersebut. Nyatanya para importir menganggap pola perdagangan yang ada tetap ekonomi dan menguntungkan.

Pilihan yang terakhir adalah mengontrol izin impor jeruk dari Cina. Melihat pentingnya jeruk mandarin dalam perayaan Tahun Baru Cina, permintaan akan buah tersebut bersifat tetap (elastisitasnya rendah) dan tidak bisa diganti. Sebuah perhitungan sederhana yang didasarkan pada model ekonomi penawaran dan permintaan menyatakan bahwa siapa yang mengontrol penawaran pasti juga mengontrol pasar, tentu saja dengan asumsi bahwa permintaan bersifat konstan. Dari sini bisa ditarik kesimpulan logis bahwa selama PEMAS dan perusahaan-perusahaan Bumiputra mempunyai hak yang hampir eksklusif untuk mengimpor jeruk mandarin dari Cina, di bawah tekanan permintaan, para grosir tradisional tidak akan mempunyai pilihan lain kecuali mengambil jeruk dan menuruti syarat-syarat dan harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah dan perusahaan-perusahaan Bumiputra. Jaringan pengecer Cina akan terpaksa mengikuti tindakan yang diambil para grosir supaya bisa Mendistribusikan produk tersebut. Bahkan para eksportir di Cina. pun tidak akan punya pilihan lain kecuali mengekspor jeruk mandarin langsung ke perusahaan-perusahaan Bumiputra yang disponsori pemerintah apabila mereka mau memasarkan produk mereka ke masyarakat Cina Malaysia. Skenario ini tampaknya tidak mungkin meleset.

Tetapi terjadi kesalahan perhitungan. Meskipun mengandung arti budaya, ternyata permintaan akan jeruk mandarin dari Cina bersifat sangat elastis dan dapat diganti, paling tidak di bawah kondisi terbakarnya sentimen dan solidaritas etnis. Nilai jeruk mandarin akhirnya ditentukan secara budaya dan bukan secara ekonomis. Tindakan PEMAS diinterpretasikan sebagai memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan Melayu untuk memonopoli perdagangan Cina. Dengan demikian para grosir tradisional dan kelompok-kelompok kepentingan Cina lainnya bisa menarik masyarakat Cina melakukan boikot terhadap jeruk mandarin yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan Bumiputra. Kejadian itu dipandang sebagai kasus pertentangan antara kedua masyarakat etnis tersebut. Demi kepentingan dan solidaritas etnis, tradisi dan adat dapat dikesampingkan, paling tidak untuk sementara. Sebagian besar orang Cina Malaysia memutuskan

memboikot jeruk mandarin dan Cina dan mengganti dengan jeruk dan Taiwan (yang masih bisa disebut sebagai jeruk "Cina") dan bahkan dari Pakistan (yang jelas-jelas bukan Cina).

Kesalahan utama. PEMAS dan IPI adalah mereka mencoba membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika kepentingan PEMAS berbenturan dengan kepentingan bisnis etnis Cina dan secara tidak langsung bertentangan dengan masyarakat Cina Malaysia, masalah promosi perdagangan langsung dengan Cina diterima. sebagai masalah hegemoni eh-ds. Meskipun pemerintah menekankan bahwa tujuan pengontrolan izin impor jeruk adalah untuk mempromosikan perdagangan langsung dengan Cina, kenyataan bahwa hanya perusahaan Bumiputra yang pertama-tama diberi izin impor sudah merupakan bukti yang cukup kuat bahwa tujuan sesungguhnya adalah untuk menempatkan perdagangan jeruk mandarin di bawah kontrol perusahaan-perusahaan Bumiputra. Seluruh jaringan bisnis Cina kemudian digerakkan untuk memulai boikot menolak kebijakan tersebut.

4.4. Pergeseran Global Kekuatan Ekonomi

Hal lain yang juga sangat penting dalam transformasi ekonomi dunia adalah distribusi ulang industri yang menjauh dari ekonomi-ekonomi industri maju yang lama - Amerika Serikat, Eropa Barat, dan. dalam lingkup lebih sempit, Jepang menuju Asia Pasifik, Amerika Latin, dan ekonomi-ekonomi industri baru lainnya. Meskipun pasar-pasar yang sedang tumbuh ini berada dalam. permasalahan. ekonomi yang serius sejak tahun 1997, fondasi alias "fundamental" ekonomi mereka, khususnya di Asia Timur, cukup mantap; mereka memiliki tabungan dan tingkat investasi yang besar di samping pekerja yang sangat bagus dan suatu hari nanti akan pulih. Meskipun Amerika Serikat dan. Ekonomi-ekonomi industri maju yang lain masih memiliki pangsa berpengaruh dalam industri dan kesejahteraan global, mereka secara relatif (bukannya mutlak) telah menurun karena ekonomi-ekonomi industri baru, khususnya Cina, telah mencapai posisi penting dalam. ekonomi selama periode

pasca perang. Dampak krisis ekonomi Asia Pasifik pada ekonomi global yang lebih luas merupakan bukti kuat akan besarnya perubahan yang terjadi.

Dalam dekade tepat setelah Perang Dunia Kedua, para pemimpin dan kaum intelektual di negara-negara yang kurang berkembang (less developed countries - LDCs), khususnya di Amerika Latin, menghujat negara-negara maju kapitalis sebagai "imperialis" dan "eksploratif." Teori ketergantungan menyala akan kemiskinan dan rendahnya pembangunan di LDC pada kebijakan-kebijakan ekonomi-ekonomi kapitalis yang dominan dan pada perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam upaya memutuskan ketergantungannya pada negara maju, LDC, khususnya di Amerika Latin, menutup pasar mereka dari dunia luar dan melaksanakan strategi substitusi impor nasionalis agar menjadi swadanya. Upaya mereka membalikkan kontrol negara-negara maju atas ekonomi dunia mencapai klimaksnya pada pertengahan tahun 1970-an dengan gagalnya upaya koalisi LDC membentuk suatu Tata Ekonomi Internasional 'Baru (New Internasional Economic Order NIEO). Di tahun 1980-an, upaya ini telah gagal; sejumlah anggota LDC telah demikian terbebani hutang yang sangat besar, pemerintah-pemerintah mereka menjalankan defisit anggaran yang tak dapat dikendalikan, dan ekonomiekonomi mereka mengalami tingkat inflasi tinggi yang menciutkannya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif dan investasi asing.

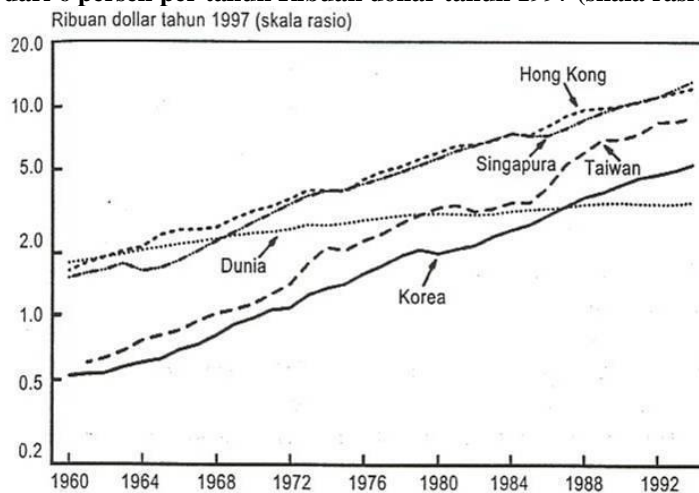
Meski demikian, pada awal tahun 1990-an situasi sejumlah anggota LDC sekali lagi berubah secara dramatis. Banyak yang menanggalkan tekanan terhadap strategi substitusi impor sambil mengimplementasi kebijakan pengaturan struktural segala bidang untuk mereformasi dan memperkuat ekonomi mereka. Reformasi berorientasi-pasar menyertakan kebijakan fiskal yang mantap, deregulasi, dan penurunan secara drastis peran negara dalam ekonomi. Dengan melihat pasar-pasar yang sedang tumbuh di Asia Timur sebagai contoh, negara-negara yang lain mulai membuka ekonomi mereka kepada dunia luar dan melaksanakan strategi pertumbuhan yang didorong ekspor. Perubahan peruntungan ekonomi mereka menyebabkan disintegrasi persatuan politik LDC

menjadi kelompok-kelompok seperti Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of South East Asia Nations- ASEAN) dan persekutuanpersekutuan yang didasarkan pada kepentingan ekonomi seperti kelompok pengeksport pertanian Cairns.¹⁶ Kebanyakan LDC, meski demikian, gagal mereformasi dan menyesuaikan diri terhadap ekonomi global yang berubah.

Bermula di akhir tahun 1980-an, sebagaimana terungkap dalam Gambar 1.4, Empat Macam Asia Timur (Hong Kong, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan) tumbuh sebesar 6 persen per tahun, meninggalkan bagian dunia yang lain. Negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia juga telah tumbuh dengan pesat. Perubahan paling signifikan dalam keseimbangan kekuatan ekonomi internasional adalah industrialisasi Asia Pasifik khususnya Cina, yang, tergantung ukuran yang digunakan, telah menjadi ekonomi kedua atau ketiga terbesar dunia. Sejumlah ekonomi-ekonomi industri baru di Asia Pasifik telah dan sedang membangun permobilan, elektronik dan industri-industri maju lainnya (dalam bidang-bidang seperti baja dan kimia) yang demikian bersaing di pasar dunia.

Gambar 5

GDP per kapita di 'Empat Macam' ' Sejak tahun 1960, GDP riil di setiap empat macam telah tumbuh lebih dari 6 persen per tahun Ribuan dollar tahun 1997 (skala rasio)



Sumber: U.S. Council of Economic Advisor

Meskipun terdapat argumen tentang batas-batas geografi wilayah ini, jelaslah bahwa. ekonomi Asia Pasifik, termasuk Asia Timur Laut, Asia Tenggara dan Cina Selatan, mulai meski perhatikan bentuknya di akhir tahun 1980-an, ketika wilayah yang sangat luas ini menjadi kawasan yang secara ekonomi paling dinamis di dunia dan pengeksport penting produk-produk industri dan berteknologi tinggi. Hingga krisis keuangan tahun 1997, keberhasilan ekonomi Asia Pasifik sangatlah mengesankan. Selama tiga puluh tahun hingga sebelum terjadinya krisis keuangan Asia Timur, tingkat pendapatan per kapita telah meningkat sepuluh kali lipat di Korea Selatan, lima kali lipat di Thailand dan empat kali lipat di Malaysia. Pendapatan per kapita di Hong Kong dan Singapura bahkan melewati beberapa negara industri maju Barat.

Di tahun 1980-an dan awal 1990-an, Cina mengalami laju pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang sangat cepat dan menjadi anggota paling penting kelompok ekonomi yang melakukan industrialisasi. Meningkatnya jalinan ekonomi Cina daratan, Hong Kong dan Taiwan (yaitu, Greater China atau "Cina Raya") telah menjadi kekuatan ekonomi yang penting di wilayah ini. Sebelum tahun 1850, Cina dan India merupakan ekonomi terbesar di dunia, dan dengan laju pertumbuhannya yang sekarang, Cina sepertinya akan menempati kembali posisi terkemukanya suatu saat di abad kedua puluh satu. jika prediksi ini terwujud, negara-negara lain di wilayah ini dan di seluruh dunia, harus melakukan penyesuaian besar atau semacam pergeseran kekuatan ekonominya. Adalah sama atau lebih penting bahwa kemampuan militer Cina telah berkembang, dan dengan turunnya arti penting militer Rusia di Asia Timur, Cina bangkit sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang kuat dan sulit ditebak. Bisa tindakannya Cina melanjutkan pertumbuhan pesatnya dan pilihan yang dibuatnya ketika menjalankan perluasan kekuatan ekonomi dan militernya akanlah sangat penting bagi, Asia Timur pada khususnya, dan juga bagi dunia pada umumnya.

Hubungan Asia Pasifik dan Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa Barat, adalah isu yang selalu ada dan penting yang dihadapi komunitas

internasional. Bagi banyak bisnis dan pemimpin Barat, tumbuhnya ekonomi dan meningkatnya kemakmuran Asia Timur memberikan kesempatan ekonomi yang tidak pernah ada sebelumnya. Sementara bisnis-bisnis Barat mengamati pasar raksasa yang sedang tumbuh ini, ada yang teringat sindiran akhir abad kesembilan betas bahwa, seandainya setiap "orang Cina" memanjangkan bajunya satu inci, pabrik-pabrik kain di Manchester (Inggris) akan boom selamanya. Bagi mereka yang mengkritik meningkatnya globalisasi dunia, industrialisasi Asia Pasifik dan ekonomi-ekonomi berkembang lainnya merasa, terancam, oleh suatu "Cinaisasi" standar-standar hidup Barat. Banyak orang Amerika dan Eropa percaya bahwa kompetisi dengan ratusan juta pekerja Cina, India dan Meksiko, telah memaksa turunnya upah Amerika dan menyebabkan pengangguran di Eropa Barat. N mengingatkan pada seruan Kaiser Wilhelm akan adanya "Bahaya- Kuning" (Yellow Peril). Meski demikian, ini bukanlah hat yang tak terelakkan, bahwa skenario, yang bersifat optimis atau prediksi penuh bahayalah yang terwujud.

Meskipun kebanyakan ekonomi mengesampingkan rasa takut dan menunjukkan, bahwa pergeseran serupa telah terjadi di masa lalu tanpa terlalu menyulitkan ekonomi-ekonomi yang lebih berkembang, para penentang globalisasi takut bahwa beberapa ciri unik dan sangat mengganggu pada kebangkitan industri Asia Pasifik dan ekonomi-ekonomi berkembang lainnya telah membuat situasinya sangat mengancam. (1) Menurut standar-standar sejarah, penyebaran industri dari ekonomiekonomi industri maju ke ekonomi-ekonomi industri baru terjadi demikian cepat. Terlebih lagi, tidak hanya industri. tradisional yang berpindah ke ekonomi-ekonomi industri baru, namun banyak teknologi maju (seperti elektronik dan industri canggih lainnya), di mana peruntungan ekonomi Barat tergantung, telah pindah ke arah selatan dan mengintensifkan persaingan. (2) Kemajuan teknologi dalam. transportasi dan komunikasi telah memberikan fasilitas bagi transfer teknik-teknik manufaktur dari ekonomi-ekonomi industri maju ke ekonomi-ekonomi industri baru. Peran yang dimainkan perusahaan-

perusahaan multinasional Barat dan Jepang merupakan titik utama perdebatan di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan bahkan Jepang. Para pengkritik menuduh bahwa strategi global perusahaan-perusahaan ini telah mempercepat penyebaran teknologi canggih ketika mereka berupaya meningkatkan daya saing internasionalnya lewat penggabungan pekerja yang murah di Selatan dengan teknik-teknik manufaktur termaju Utara. (3) Tantangan yang tertuju pada ekonomiekonomi industri yang lama melalui pergeseran manufaktur ini telah diperburuk dengan membesarnya permasalahan. Dengan berakhirnya Perang Dingin dan meningkatnya integrasi ekonomi dunia, milyaran pekerja berupah rendah tiba-tiba memasuki arena Pekerja dunia. Perbesaran seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para pekerja ini bahkan mau bekerja tanpa tunjangan-tunjangan kesejahteraan dan standar-standar kesehatan mahal yang diminta para pekerja Barat.

Kebanyakan ekonomi Amerika menolak dihidupkannya lagi thesis "Bahaya Kuning" dan cenderung menolak pesimisme "penurunan Barat" dan "benturan peradaban." Sungguh, dalam satu artikel provokatif, Paul Krugman umumnya mengesampingkan gagasan bahwa kebangkitan industri Asia Pasifik menampakkan ancaman terhadap Barat." Keberhasilan ekonomi negara-negara ini disebabkan mobilisasi cepat modal dan pekerja dan tidak mewakili kenaikan signifikan tingkat produktivitas nasional. Kegagalan ekonomi-ekonomi ini dalam menaikkan tingkat produktivitas mereka secara signifikan, tulisnya, bermakna bahwa keberhasilan ekonomi mereka merupakan peristiwa yang hanya terjadi sekali seumur hidup (seperti yang dialami Uni Soviet setelah Perang Dunia 11). Ketika ekonomi-ekonomi ini kehabisan pekerja dan modal yang tersedia, pertumbuhan ekonomi mereka akan melambat. Di sisi lain, Krugman mengakui bahwa persediaan pekerja Cina yang sangat besar akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam banyak dekade.

Sangat pesatnya industrialisasi di Asia Pasifik dan kebangkitan mendadak banyak negara sebagai pengeksport penting telah memaksa ekonomi dunia modern

harus menghadapi, untuk kelima kalinya, permasalahan yang disebabkan oleh distribusi ulang keseimbangan. internasional daya saing dan kekuatan ekonomi dalam ukuran tertentu. Contoh-contoh terdahulunya adalah kebangkitan mendadak Inggris di awal abad kesembilan belas setelah terjadinya revolusi industri dan Perang Napoleon, kebangkitan mendadak Jerman bersatu dan Amerika Serikat berikutnya, sebagai ekonomi-ekonomi industri ekspor utama di akhir abad kesembilan belas dan awal. abad kedua puluh, serta ekspansi ekspor Jepang di tahun 1970-an dan tahun 1980-an yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan adanya pergeseran penting kekuatan ekonomi dan daya saing internasional ini, ketegangan ekonomi dan politik cukup meningkat; ada usaha pencarian kambing hitam, dan tuduhan-tuduhan "praktek perdagangan tidak adil" yang diluncurkan. Pada penutup abad kedua puluh, kebangkitan. ekonomi Cina dan ekonomi-ekonomi Asia Visifik lainnya telah menghasilkan pola. Yang lazim dikenal.

RANGKUMAN

Pernyataan perspektif ketergantungan sumber daya bahwa organisasi selaku mencari koneksi dengan mengambil alih organisasi-organisasi lain yang mengontrol suplai sumber daya yang penting adalah benar. Selalu satu tujuan utama pengambil alih perusahaan dalam periode tersebut adalah untuk memperoleh tanah-tanah yang mereka kontrol.

Pentingnya sumber daya dengan demikian, ditentukan oleh strategi para pengusaha. Karakter dan strategi ini yang oleh whitley di sebut "resep bisnis", ditentukan oleh konteks kelembagaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Beberapa dari faktor-faktor kelembagaan yang mempunyai peran penting dalam membentuk kolompok-kelompok bisnis adalah hubungan diantara aktor-aktor ekonomi yang dominan, hubungan antara lembaga-lembaga keuangan dan bisnis serta peran pemerintah sebagai agen pembangunan. Faktor politik dan ekonomi saling mempengaruhi. Tetapi ada periode-periode ketika faktor-faktor tertentu mendominasi situasi.

PENUTUP

TES FORMATIF

Jawablah soal-soal di bawah ini !

1. Jelaskan asosiasi gotong royong orang Cina di Taiwan dan syarat dasar tiap asosiasi tersebut. Bobot mulai 50 !
2. Jelaskan dua pendekatan utama dalam kelompok bisnis pada umumnya !

UMPAN BALIK

Setelah menjawab soal-soal di atas, cocokkanlah dengan kunci jawaban tes formatif yang ada di bagian akhir. Hitunglah jumlah jawaban yang benar kemudian gunakan rumus tingkat penguasaan, sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{(Jumlah jawaban yang benar)}}{2} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan yang dicapai adalah :

- 80 % - 100 % = Baik sekali
- 70 % - 79 % = Baik
- 60 % - 69 % = Cukup
- < 60 % = Kurang

TINDAK LANJUT

Bila belum mencapai penguasaan 80 %, maka harus mempelajari kembali kegiatan belajar terutama bagian yang belum dikuasai, agar dapat menyelesaikan soal di atas. Jika

telah dapat mencapai 80 % penguasaan, maka dapat melanjutkan ke pokok bahasan yang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gilpin., and Gilpin, J.M., 2002. Tantangan Kapitalisme Global. Ekonomi Dunia Abad ke-21. Penerjemah : Munandar, H., dan Priatna, D., PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal 229 - 257
2. Kojima, K., 1979. Japanese Direct Foreign Investment : A Model of Multinational Business Operations. Charles E. Truth Company. Tokyo.
Hal 23-47

BAB V

REGIONALISME EKONOMI ASIA PASIFIK

Materi pada bab V ini mencakup : karakteristik kawasan Asia Pasifik, Strategi Asia Jepang, kepemimpinan regional Jepang reformasi sistem perbankan dari keuangan reformasi institusional, kebangkitan Cina sebagai kekuatan ekonomi, kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Dalam mempelajari bab V ini, anda akan dapat mengetahui perubahan-perubahan pembangunan ekonomi, bentuk-bentuk kerja sama yang ada di Kawasan Asia Pasifik. Untuk itu untuk memudahkan anda dalam mempelajari ekonomi mikro dan makro, disamping itu dapat memudahkan anda untuk mempelajari bab berikutnya dalam mata kuliah kepasifikan.

Pada akhir perkuliahan materi kepasifikan, diharapkan anda dapat mengaplikasikan kepasifikan dalam pembangunan ekonomi peternakan dan pada akhir perkuliahan materi bab III ini, diharapkan anda dapat menganalisis regionalisme ekonomi Asia Pasifik.

5.1. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Asia Pasifik

Sejak pertengahan tahun 1980-an hingga krisis keuangan melanda pada musim gugur tahun 1997, wilayah Asia Pasifik, sebuah busur rangkaian negara dari Jepang dan Korea di sisi timur laut hingga Indonesia, Thailand, Singapura dan Cina sebelah selatan di sisi Tenggara, merupakan wilayah dalam ekonomi dunia dengan pertumbuhan terpesat. Beberapa pihak memperkirakan bahwa ekonomi-ekonomi ini tumbuh sebesar 8

persen per tahun dan memiliki sekitar seperempat output dunia serta hampir dua pertiga pengeluaran modal dunia. Pertumbuhan ekonomi spektakuler pasar-pasar yang sedang bangkit di Asia Timur ini telah mencengangkan bagian-bagian dunia lainnya. Sebelum krisis keuangan tahun 1997, sepertinya mungkin dan bahkan bisa jadi ekonomi-ekonomi ini menjadi pusat ekonomi dunia di awal abad kedua puluh satu.

Dalam seperempat abad terakhir, sejumlah perkembangan penting dalam kawasan yang luas dan demikian beragam ini telah mentransformasikan wilayah dan posisinya ke dalam ekonomi global. Pembangunan ekonomi dan identitas regional yang mantap di bawah kepemimpinan Jepang, industrialisasi yang pesat di Cina sebelah selatan, dan krisis keuangan yang tiba-tiba melingkupi wilayah tersebut pada musim gugur tahun 1997 adalah hal-hal yang sangat penting. Jepang memainkan peran inti yang semakin penting dalam wilayah ini sebagai kekuatan ekonomi dan, dalam batas-batas yang lebih sempit, kekuatan politik. Perdagangan, investasi, dan Asistensi Pembangunan Resmi (Official Development Assistance-ODA) Jepang. Demikian krusial bagi dinamisme wilayah dan kebangkitan regionalisasi ekonomi Asia Pasifik. Arti penting jangka panjang inisiatif Jepang, meski demikian, akan sangat dipengaruhi oleh peran masa.: depan Cina sebagai kekuatan ekonomi regional dan global serta oleh konsekuensi-konsekuensi akhir krisis keuangan Asia Timur. Perkembangan-perkembangan ini meningkatnya peran Jepang di wilayah tersebut, industrialisasi Cina yang pesat, dan krisis keuangan memiliki implikasi-implikasi signifikan bagi masa depan. wilayah. Dan posisinya di dalam. ekonomi global yang lebih. besar.

5.2. Kawasan Karakteristik Asia Pasifik

Regionalisme Asia Pasifik memiliki beberapa ciri tersendiri yang membuatnya berbeda dengan regionalisme Eropa Barat maupun Amerika Utara. Namun perbedaan-perbedaan ini dapat menyebabkan salah penafsiran. Wilayah Asia Pasifik berbeda dari yang lain karena tidak terdapat pemegang hegemoni atau. persekutuan inti kekuatan kekuatan utama. Kepemimpinan Amerika di Amerika Utara dan persekutuan inti Perancis Jerman di Eropa telah membimbing integrasi wilayah masing-masing. Di wilayah Asia Pasifik terdapat tiga kekuatan utama Amerika Serikat, Jepang dan. Cina dengan kepentingan.

Terlepas dari meningkatnya integrasi aspek-aspek wilayah ini, keragaman ekonomi, politik, dan budayanya yang luar biasa secara signifikan mempengaruhi perkembangan mentalitas regional dan institusi-institusi yang ada di seluruh wilayah. Meskipun bangsa Asia berbagi atas sejumlah karakteristik penting, wilayah ini demikian terbagi-bagi oleh perbedaan-perbedaan budaya, sistem-sistem ekonomi, dan konflik-konflik politik yang serius. Institusi-institusi regional terpenting adalah Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC), terdiri dari Australia, Kanada, Chili, Cina, Jepang, Meksiko, Selandia Baru, Amerika Serikat dan negara-negara Asia Pasifik lainnya. Meski demikian, tak satupun kelompok tadi yang benar-benar menjadi pusat organisasi dan berfungsinya ekonomi Pasifik. Kurangnya struktur politik yang efektif di wilayah tersebut, peran dominan kekuatan-kekuatan ekonomi terdahulu dalam mengintegrasikan wilayah, dan meningkatnya integrasi wilayah dengan bagian-bagian dunia lainnya menghasilkan suatu "regionalisme terbuka"; kontras dengan persatuan kebebasan Uni Eropa dan kawasan perdagangan bebas Amerika Utara, Asia Pasifik tidak memiliki suatu hambatan perdagangan dan investasi yang berlaku di seluruh wilayah. Negara-negara individual, di sisi lain, tetap memiliki hambatan-hambatan yang tinggi baik terhadap impor maupun investasi.

Meskipun Jepang tidak menjalankan hegemoni politik atas wilayah ini, ekspansi ekonomi perusahaan-perusahaan multinasional Jepang dan pengaruh ekonomi Jepang di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara telah mendorong terjadinya perubahan di seluruh wilayah. Melalui suatu strategi nasional investasi langsung asing, perdagangan intraperusahaan, dan ODA, Jepang telah menempa dan mengintegrasikan ekonomi-ekonomi Asia timur dan Tenggara dengan ekonomi Jepang sendiri. Dalam jangka panjang, kemungkinan keberhasilan strategi Jepang ini, tentu saja, sangat tergantung pada pemulihan Asia dari krisis keuangan serta pada kegiatan Cina dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Seandainya Cina terus berkembang secara ekonomi dan memodernisasi militernya, pada akhirnya ia pasti menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang dominan. Sementara itu, krisis keuangan Asia Timur telah menggerogoti secara serius, namun tidak menjatuhkan, strategi Jepang di wilayah ini.

5.3. Strategi Asia Jepang

Upaya-upaya Jepang untuk menciptakan dan memimpin ekonomi Asia Pasifik sangatlah krusial bagi perkembangan wilayah ini. Bahkan, dinamika wilayah tidak dapat dimengerti secara tepat tanpa adanya pengakuan terhadap re-Asianisasi ekonomi dan orientasi nasional Jepang. Meskipun Jepang bermaksud memelihara keberadaan yang kuat dalam ekonomi global, ia mendapatkan kembali minatnya yang terdahulu di Asia Timur dan Asia Tenggara. Perdagangan maupun investasi langsung asing Jepang merupakan faktor-faktor penung dalam industrialisasi wilayah tersebut, khususnya Cina sebelah selatan. Dan karena taruhan Jepang yang demikian besar di Asia UV dan Tenggara, krisis ekonomi Asia timur memunculkan suatu ancaman yang begitu serius terhadap ekonomi Jepang- Jepang, tentu saja telah memiliki krisis ekonomi yang menjangkiti dirinya sendiri sejak ambruknya ekonomi gelembung di awal tahun 1990-an, Jepang berada dalam kondisi keuangan yang penuh dengan masalah, serta yang lebih baru, ekonomi Jepang secara perlahan-lahan tenggelam ke dalam resesi yang serius. Nasib Jepang dan wilayah ini demikian terkait erat.

Sebelum pertengahan tahun 1980-an, Jepang pasca perang hanya menunjukkan sedikit minat kepada ekonomi-ekonomi Asia Timur dan Cekung Pasifik. Perdagangan Jepang dengan wilayah tersebut sangatlah kecil, khususnya bila dibandingkan perdagangannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Di wilayah ini tidak terdapat pasar konsumen bagi mobil, barang elektronik, dan ekspor-ekspor canggih Jepang lainnya. Jepang berpikiran bahwa para tetangga Asia mereka utamanya merupakan sumber produk-produk pertanian serta bahan mentah, dan perusahaan-perusahaan Jepang hanya membuat sedikit investasi jangka panjang di wilayah ini. Investasi langsung hampir semuanya dalam industri ekstraksi, dengan beberapa dalam manufaktur dan hampir tidak ada yang dalam industri berteknologi tinggi. Bantuan luar negeri Jepang ke wilayah ini relatif kurang signifikan dan utamanya diberikan sebagai perbaikan korban-korban kekejaman Jepang di masa perang.

Keragu-raguan Jepang terhadap wilayah Asia Timur tiba-tiba berubah karena adanya apresiasi substansial yen (endaka atau yendaka), setelah Kesepakatan Plaza Bulan September 1985. Apresiasi yen yang sekitar 30 persen terhadap dollar memiliki

pengaruh-pengaruh yang mendadak dan dramatis ketika yen yang bernilai tinggi secara signifikan telah menurunkan perolehan laba dan daya saing internasional di banyak ekspor Jepang, khususnya dari industri-industri yang lebih tradisional, tertekannya ekonomi Jepang, dan perubahan Jepang menjadi kekuatan keuangan terkemuka dunia akibat begitu meningkatnya nilai aset-aset keuangannya. Sebagai tambahan, melonjaknya tingkat upah dan produksi Jepang mulai menggerogoti daya saing di banyak industri. Menteri Keuangan Jepang menanggapinya dengan suatu rangsangan ekonomi yang signifikan untuk menyeimbangkan dampak pendorong deflasi akibat endaka. Adalah pergeseran kebijakan makroekonomi Jepang inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya ekonomi gelembung, yang membuat spekulasi real estat dan keuangan semakin menjadi-jadi. Ketika ekonomi gelembung akhirnya ambruk di awal tahun 1990-an, Jepang tercebur ke dalam resesi yang parah dan belum mampu dipulihkannya (setidaknya hingga tahun 1999). Apresiasi. yen juga menggerogoti strategi ekonomi pasca perang Jepang yang didasarkan pada pertumbuhan yang didorong ekspor. Dan mungkin yang terpenting dari kesemuanya, inilah yang mengakibatkan re-Asianisasi Jepang.

Penggerogotan endanka terhadap keberhasilan strategi pertumbuhan yang didorong ekspor menghadapkan para elit pemimpin, birokrat pemerintah, dan eksekutif bisnis Jepang pada dua alternatif kebijakan yang luas. Satu pilihannya adalah mengikuti rekomendasi Komisi Maekawa (Maekawa Commission). Dalam laporannya yang diterbitkan tanggal 7 April 1986, komisi tersebut mengusulkan reformasi drastis ekonomi Jepang serta perumusan ulang kebijakan ekonomi domestik dan luar negeri untuk bergeser dari pertumbuhan yang didorong ekspor menuju pertumbuhan yang didorong kebutuhan domestik. juga direkomendasikan bahwa Jepang perlu membuka ekonominya terhadap impor dari negara-negara lain.

Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Maekawa akan menyertakan deregulasi yang luas dan menurunkan peran negara dalam ekonomi, dan dengan demikian akhirnya akan membawa pada ekonomi yang lebih berorientasi pasar dan konsumen, serupa dengan yang dimiliki Amerika Serikat dan Eropa Barat. Banyak pakar Barat memperkirakan bahwa ekonomi Jepang akan diubah mengikuti model Barat. Namun

demikian, sebagaimana beberapa kali terjadi dalam sejarah Jepang pasca perang, para elit memilih strategi alternatifnya.

Alternatif yang dipilih secara tepat diistilahkan "strategi Asia Jepang." Strategi ini memerlukan upaya gigih para. elit pemerintah dalam menggunakan modal yang sangat besar dan sumber-sumber daya teknologi Jepang yang superior untuk menciptakan suatu ekonomi Asia Timur yang terintegrasi dengan dan didominasi oleh ekonomi Jepang sendiri. Strategi Asia Timur Jepang tidak hanya dimotivasi hasrat untuk memelihara dan memperkuat posisi ekonominya namun juga pertimbangan-pertimbangan lain. Sebagai konsekuensi atas proteksionisme perdagangan Amerika Serikat dan tuntutan ada perdagangan "terkendali" dalam permobilan dan sektor-sektor lain orang-orang Jepang semakin mencemaskan penyandaran diri mereka pada Amerika Serikat sebagai partner ekonomi dan politik; sebuah strategi Asia dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap pasar Amerika. Orang-orang Jepang juga semakin prihatin dengan kebangkitan blok-blok regional eksklusif dimana mereka mungkin tidak disertakan. Akhirnya, dan bukan yang terakhir, Jepang semakin mengkhawatirkan Cina; lewat perdagangan, investasi, dan bantu luar negeri, orang-orang Jepang berharap dapat mentransformasikan Cina. menjadi satu. partner ekonomi yang lebih tertarik dengan keberadaan ekonomi bersama penuh damai daripada ekspansi militer dan konfrontasi politik.

Meskipun apresiasi yen dan peningkatan biaya-biaya memberikan suatu insentif kuat bagi perusahaan-perusahaan Jepang untuk menurunkan biaya-biaya produksinya melalui relokasi produksi ke ekonomi-ekonomi yang memiliki pekerja berupah murah di Asia Tenggara, kemujuran keuangan dari apresiasi tersebut juga memberi perusahaan-perusahaan dan pemerintah dana yang diperlukan untuk berinvestasi secara besar-besaran di seluruh Asia Timur dan Tenggara serta secara substansial menurunkan bantuan luar negeri ke ekonomi-ekonomi tersebut. Awalnya, pembaharuan minat ini konsentrasikan pada tetangga-tetangga langsung Jepang – Taiwan Korea Selatan, dan Hong Kong. Namun demikian, ketika kenaikan tingkat upah dan apresiasi mata uang segera membuat ekonomi-ekonomi Asia Timur Laut menjadi kurang menarik bagi investasi, Jepang mulai berkonsentrasi di Asia Tenggara, khususnya Cina sebelah Selatan. Sebagai akibatnya, sebagaimana pendapat Walter Hatch dan Kozo Yamamura dalam buku *Asia in Japan Embrace Building a Regional Production Alliance* (1996), Jepang mencoba untuk

memelihara strategi pertumbuhan yang didorong ekspor dengan "meregionalisasikan" strategi tersebut.

Investasi langsung asing keiretsu (kelompok-kelompok industri) Jepang merupakan cara utama yang diterapkan Jepang ketika ia telah meluaskan diri secara ekonomi di Asia Timur dan memperbesar pengaruhnya di seluruh wilayah. Setelah berlangsungnya Kesepakatan Plaza dan apresiasi yen, investasi Jepang di wilayah ini membubung. Awalnya, investasi terjadi di ekonomi-ekonomi yang paling maju (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura) dan di Asia Tenggara. Selanjutnya, investasi asing Jepang bergerak menuju Cina daratan dan menjauh dari bagian-bagian Asia Timur lainnya. Meskipun FDI Amerika di wilayah ini tetap, substansial, di tahun 1990-an Jepang telah menjadi penyedia FDI terbesar. Terlepas dari-adanya pergeseran penting ini, FDI Jepang di Amerika Serikat dan Eropa Barat terus menerus mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada yang di Asia. Meski demikian, dikaitkan dengan ukuran ekonomi-ekonomi yang terlibat, investasi Jepang di Asia Timur sangatlah besar.

Di akhir tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan Jepang telah menginvestasikan sekitar \$100 milyar di kawasan ini. Lebih dari 4.500 perusahaan Jepang, baik berdiri sendiri maupun usaha patungan, mempekerjakan hampir satu-juta pekerja. Investasi Jepang diiringi oleh suatu transfer teknologi besar yang bernilai sekitar \$1 milyar. Di akhir tahun 1990an, sebagian besar persentase produksi MNC Jepang berlokasi di Asia Pasifik. Perkembangan ini menyebabkan seorang ekonomi Jepang berkata bahwa Asia di luar Jepang telah menjadi "bengkel kerja dunia." Patut dicatat bahwa terdapat pula peningkatan FDI di wilayah ini dari Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan. Investasi langsung asing Jepang dan negara-negara Asia lainnya di ekonomi-ekonomi industri baru Asia Pasifik secara mendasar telah membentuk ulang struktur ekonomi-ekonomi tersebut dan hubungan yang ada di antara mereka.

Ledakan FDI di wilayah ini dan kegiatan perusahaan-perusahaan Jepang secara signifikan mengubah pola perdagangan Jepang seiring dengan perubahan pola perdagangan negara-negara lain di Asia Timur. Di awal tahun 1990-an, Asia Pasifik sebenarnya mulai menyusul, Amerika Serikat sebagai pasar ekspor terbesar Jepang melewati Amerika Serikat sebagai partner dan gang utama wilayah tersebut. Surplus perdagangan Jepang dengan kawasan ini membubung dan melebihi surplus

perdagangannya dengan Amerika Serikat. Meskipun perdagangan wilayah ini dengan ekonomi dunia yang lebih besar tetap lebih besar daripada perdagangan antarwilayahnya, yang terakhir inipun juga melonjak, setidaknya hingga krisis keuangan tahun 1997. Meskipun begitu, saya ingin menekankan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi pasar terpenting bagi ekspor Asia Pasifik dan ekspor, ke Amerika Serikat tersebut tumbuh lebih pesat daripada ekspor Amerika ke kawasan ini. Karena ekonomi-ekonomi pengekspor ini memancing mata uangnya kepada dan/atau sedikit di bawah dollar, ekspor mereka sangatlah berdaya saing di pasar Amerika. Seluruh ekonomi-ekonomi kawasan ini, kecuali Cina, memiliki surplus perdagangan yang sangat besar dan terus meningkat terhadap Amerika Serikat.

Selama tahun-tahun tersebut, Jepang dan perusahaan-perusahaannya mengimplementasi suatu strategi yang sengaja menciptakan pembagian pekerja regional terorganisasi secara vertikal di pemimpinan. Jepang, sekalipun beberapa ekonomi Amerika sendiri tidak sependapat. Berdasarkan pengujian mereka terhadap data perdagangan, beberapa ekonom berpendapat bahwa kedekatan geografis dan faktor-faktor pasar seperti keuntungan komparatif Jepang dan ekonomi-ekonomi lainnya di wilayah ini seutuhnya dan dapat menjelaskan pola perdagangan dan investasi yang digunakan. Lebih jauh lagi, mereka berpendapat bahwa tidak ada bukti kesengajaan upaya Jepang untuk menciptakan suatu jenis blok perdagangan. Pihak Jepang sendiri berpendapat bahwa ekspansi perusahaan-perusahaan mereka ke seluruh wilayah dan jaringan produksi yang saling mengunci semata-mata merupakan tanggapan perusahaan-perusahaan terhadap kekuatan pasar. Mungkin pihak Jepang tidak menyukai istilah "strategi" karena itu terlalu mengingatkan pada upaya Jepang sebelum Perang Dunia Kedua untuk menciptakan Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur, dan karena itu sepertinya mengisyaratkan bahwa Jepang berupaya lagi menciptakan suatu kekaisaran Asia Timur atau kawasan pengaruh eksklusif, sekalipun kali ini lewat cara-cara damai seperti perdagangan, keuangan, dan investasi, bukannya penaklukan militer.

Hatch dan Yamamura secara meyakinkan berpendapat bahwa kesimpulan para ekonom tentang Jepang didasarkan pada pemikiran yang keliru bahwa kebijakan publik dan inisiatif swasta Jepang merupakan hal terpisah, bukannya saling terkait erat.¹³ Sebenarnya terdapat lusinan cara, tunjuk mereka, dimana birokrasi ekonomi (Kementrian

Perdagangan. Internasional dan Investasi, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Ekonomi) telah mendesain dan mengkoordinasikan seluruh kebijakan. Jepang terhadap wilayah tersebut dan menyusun mekanisme untuk menjalankannya dalam upaya mengintegrasikan ekonomi-ekonomi tersebut dengan ekonomi Jepang sendiri. Perusahaan-perusahaan multinasional. Jepang dan batuan. luar negeri resmi Jepang, sebagaimana mereka catat, mempunyai dampak mendasar terhadap pola-pola perdagangan, arus investasi, dan kemandirian keuangan. di wilayah Asia Pasifik. Perusahaan multinasional. Jepang khususnya, dengan dukungan kuat negara, telah menciptakan "persekutuan produksi regional" yang terdiri dari perusahaan-perusahaan induk di Jepang, cabang-cabangnya yang berlokasi di seluruh wilayah, dan perusahaan-perusahaan pribumi sebagai sub koordinatnya; jaringan produksi regional ini dimanfaatkan sebagai landasan bagi perusahaan-perusahaan Jepang dalam persaingan di pasar dunia. yang semakin intensif.

Tujuan strategi Asia adalah untuk memungkinkan Jepang melanjutkan pertumbuhan pasca perangnya yang didorong ekspor. Strategi perdagangan maupun pertumbuhan terancam. oleh apresiasi substansial yen, peningkatan biaya-biaya produksi domestik, serta penyebaran proteksionisme perdagangan di Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Meskipun strategi Asia Pasifik ini betul-betul memberikan jaminan bagi Jepang dari berlanjutnya ancaman proteksionisme Barat, strategi ekonomi keseluruhan Jepang juga telah mengurangi biaya-biaya ekspor ke Barat, meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan Jepang lewat integrasi ekonomiekonomi Asia Timur dan Tenggara ke dalam. suatu sistem produksi regional multi-tingkat vertikal, dan menggabungkan ekonomi-ekonomi ini ke dalam. suatu pembagian tenaga kerja yang diorganisasikan dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan multinasional Jepang.

Pembagian tenaga kerja regional terdiri dari jaringan-jaringan produksi yang diorganisasikan secara vertikal dalam sektor-s to, industri seperti permobilan dan elektronik. Perusahaan-perusahaan induk, yang berlokasi di Jepang, memproduksi komponen yang paling banyak kandungan teknologi tingginya dan berada di puncak organisasi. Di tingkat berikutnya terdapat cabang-cabang perusahaan Jepang di ekonomi-ekonomi tersebut dan di bawahnya terdapat perusahaan-perusahaan dari ekonomi-

ekonomi industri yang lebih maju di Asia Timur Laut. Di tingkat terbawah adalah perusahaan-perusahaan bumi di ekonomi-ekonomi industri baru Asia Tenggara yang berupa rendah. Keseluruhan hasil strategi ini adalah suatu sistem "kapitalis jaringan" terintegrasi Asia Timur yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan Jepang dengan ekonomi Jepang sendiri sebagai intinya.

Menurut Hisahiko Okazaki, salah satu diplomat terhebat terlantang Jepang pasca perang dan mantan duta besar Jepang dan Thailand, Jepang telah menciptakan suatu pasar eksklusif dengan menggabungkan bangsa-bangsa Asia Pasifik ke dalam sistem keiretsu, Regionalisme sistem keiretsu lewat penciptaan jaringan-jaringan produksi regional memungkinkan perusahaan-perusahaan Jepang menghindari restrukturisasi besar ekonomi mereka sendiri sebagaimana di diusulkan Komisi Maekawa. Perusahaan-perusahaan yang berbasis-di, dalam negeri dalam keiretsu terregionalisasi ini mengeksport komponen berteknologi tinggi dan bernilai-tambah tinggi ke afiliasi-afiliasi mereka untuk dirakit menjadi produk akhir untuk konsumsi lokal, diekspor ke Jepang kembali, dan/atau diekspor ke Barat. Strategi korporasi seperti ini memungkinkan perusahaan induk di Jepang, memangkas biaya dan menjaga perolehan besarnya lewat investasi dalam inovasi teknologi selama mungkin, sehingga dapat mempertahankan monopoli Jepang dan keuntungan kopratifnya dalam industri-industri berteknologi tinggi. Banyak perusahaan lokal, pada kenyataannya, adalah para pemasok komponen milik Jepang memiliki kaitan dengan para anggota keiretsu di Jepang, yang telah membangun pabrik-pabrik untuk memasok cabang-cabang perusahaan induk di satu atau lebih ekonomi di kawasan ini.

Ekspansionisme korporasi Jepang ke seluruh Asia timur dan Asia Tenggara ini diiringi dengan suatu pergeseran penting kebijakan lagi negeri terhadap kawasan ini. Jepang sangat mengintensifkan keterlibatannya dan meningkatkan keragaman hubungannya dengan negara-negara tersebut. Kaisar Jepang dan satu demi satu perdana menteri Jepang melakukan kunjungan kenegaraan, dan Jepang bahkan menciptakan pos "duta besar untuk kerjasama Asia Pasifik." Bagaimanapun juga, perwujudan terpenting re-Asianisasi Jepang diketemukan di dalam peningkatan substansial Asistensi Pembangunan Resmi (Official Development Assistance - ODAN). Jepang, pada kenyataannya, menjadi donor terbesar bantuan ke kawasan ini. Antara, tahun 1991-1993,

Jepang mengalokasikan sekitar 35 persen (sekitar \$4,5 milyar) total bantuan dalam anggarannya ke enam negara di kawasan ini. Pihak Amerika mengalokasikan 2 persen bantuan mereka (sekitar \$342 juta) kepada dua negara di wilayah yang sama! Bantuan keuangan Jepang sebagian besar berbentuk pinjaman "lunak" dan biasanya ditujukan bagi proyek-proyek infrastruktur besar, yaitu bantuan bagi pembangunan infrastruktur yang akan mendukung industrialisasi dengan pimpinan Jepang di wilayah ini, memperkuat integrasi regional Asia di bawah kepemimpinan Jepang, dan, terlepas dari pengingkaran keras mereka, menganugerahkan hampir semua kontrak kepada perusahaan-perusahaan Jepang atau para partner korporasi Asia mereka. Dengan demikian, pemerintah Jepang telah menyusun ODAN dan serangkaian instrumen-instrumen kebijakan lainnya untuk mendorong kepentingan-kepentingan Jepang dan perusahaan-perusahaan Jepang di wilayah ini.

Peter Drucker berpendapat bahwa strategi Asia Jepang didasarkan pada dua pemikiran fundamental. Pemikiran pertama adalah bahwa keuntungan komparatif di negara-negara padat tenaga kerja sebagian besar telah berpindah menuju Asia Tenggara, membuat upaya mempertahankan industri-industri bernilai-tambah rendah Jepang merupakan penyia-nyiaan sumber daya produksi yang berharga. dan bahkan merugikan ekonomi industri Jepang yang lebih maju; dalam kondisi-kondisi inilah akan merupakan kesalahan alokasi sumber daya perusahaan dan nasional, menurut Drucker, bila manufaktur kerah biru tetap dikerjakan di Jepang. Pemikiran kedua -adalah bahwa kepemimpinan ekonomi di dunia berteknologi tinggi yang sedang bangkit pada milenium ketiga ini bergantung pada kemandirian daya pikir dan keunggulan teknologi, bukannya keuntungan-keuntungan biaya transisional seperti pekerja berupah rendah. Keuntungan komparatif atau kompetitif industri-industri maju dan bernilai-tambah tingkat dalam ekonomi modern didasarkan pada kepemimpinan teknologi dan ketrampilan organisasi. Jepang, dengan demikian, perlu menggunakan sumber-sumber dayanya yang langka (modal dan pekerja berketrampilan tinggi) untuk meningkatkan kemampuan teknologinya dengan terus-menerus menapak tangga teknologi.

Dengan mengikuti logika ini, perusahaan-perusahaan Jepang telah menanggalkan kegiatan perakitan atau manufaktur produk-produk padat karya di Jepang sendiri, dan memindahkan operasinya, ke cabang-cabang Asia-nya yang terkait erat dengan basis

industri asalnya di Jepang. Sebagai konsekuensinya, pekerja trampil dan sumber-sumber daya lain dikerahkan. Untuk menapak tangga industri/teknologi dan menghasilkan produk jadi dan komponen berteknologi lebih maju dan bernilai-tambah lebih tinggi, untuk than dirakit di cabang-cabang luar negerinya oleh para pekerja yang, berkecakupan lebih rendah dan berupah lebih murah di Asia Tenggara Akibatnya, pihak Jepang harus mengorganisasikan suatu kombinasi teknologi dan keahlian mereka sendiri dengan pekerja berupah,'," murah para tetangga. mereka agar dapat menangkap pasar bagian-bagian dunia lainnya. Dalam rumusan paling kasar, strategi ini berarti, makna bahwa, dalam pembagian, pekerja internasional yang disusun oleh perusahaan-perusahaan Jepang dengan dukungan pemerintahnya, Jepang akan menyediakan "otak" dan negara-negara Asia lainnya I akan menyediakan "otot."

Sebelum terjadinya krisis keuangan, jaringan yang ekstensif ini mengirimkan output mereka dalam proporsi yang semakin besar ke pasarpasar di wilayah tersebut. Pertumbuhan pesat" ekonomi-ekonomi ini membawa pada bertambahnya menengah yang makmur dengan selera yang tinggi terhadap barang-barang konsumen Jepang. Namun satu porsi signifikan barang-barang, yang diproduksi keiretsu terregionalisasi ini ditujukan untuk pasar Jepang sendiri, di mana produk-produk ini membantu memenuhi permintaan akibat meningkatnya konsumsi barang-barang manufaktur, impor. Meskipun perusahaan-perusahaan Amerika, Asia, dan Jepang jumlah kelas lainnya telah meningkatkan ekspor manufakturnya ke Jepang dan pola perdagangan Jepang menjadi lebih "normal" - yaitu, lebih seperti pola intraindustri negara-negara industri maju lainnya Jepang tetap saja memiliki pola tersendiri dengan tidak mengimpornya secara signifikan dari perusahaan-perusahaan non Jepang. Dan sebagian besar output jaringan produksi Asia ini tetap dikirim ke Amerika Serikat, Eropa Barat, dan ekonomi-ekonomi Barat lainnya. Ekspor tersebut menjadi sumber gesekan antara Amerika Serikat dan ekonomi-ekonomi di wilayah ini.

Jaringan-jaringan produksi yang berlokasi di seluruh wilayah ini telah membantu perusahaan-perusahaan Jepang memelihara pangsa pasar mereka di pasar-pasar Barat terlepas dari adanya apresiasi yen; jaringan-jaringan ini juga. memberikan suatu keuntungan kompetitif signifikan. dalam pertarungan ekonomi dunia yang semakin intensif. Perusahaan-perusahaan Jepang mampu mengeksploitasi keuntungan komparatif

tertentu dari ekonomi-ekonomi dimana mereka menjalankan operasi produksi atau perakitan, keuntungan-keuntungan seperti bahan mentah lokal, mata uang yang terdepresiasi, atau pekerja berupah rendah. Meski demikian, pekerja berupah rendah tidaklah menjadi faktor yang terlalu penting sebagaimana dianggap para pengkritiknya, karena perusahaan-perusahaan Jepang cenderung menggunakan teknik-teknik "produksi yang mudah dibentuk", sama dengan yang dikerjakan di Jepang sendiri dan menjadikan mereka pesaing-pesaing yang sangat tangguh. Jaringan-jaringan regional, bagaimanapun juga, memiliki keuntungan dengan terkonsentrasinya produksi dan perakitan produk atau komponen tertentu dalam pabrik-pabrik di seluruh wilayah, yang memungkinkan mereka meraih ekonomi skala dan berbagai efisiensi produksi lainnya.

Selanjutnya, barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat atau Eropa Barat dengan label seperti "Buatan Malaysia" atau "Buatan Thailand," ternyata banyak di dalamnya terkandung satu bagian substansial komponen-komponen bernilai-tambah tinggi buatan Jepang, dan pada kenyataannya, telah meningkatkan impor Jepang ke dalam Amerika Serikat dan Eropa Barat namun dapat menghindarkan reaksi-reaksi negatif yang ditimbulkannya. Terlebih lagi, fakta bahwa kebanyakan negara Asia memiliki mata uang yang bernilai terlalu rendah dan dipancang terhadap dollar merupakan bonus tambahan bagi perusahaan-perusahaan Jepang yang harus berurusan dengan mata uang yang bernilai terlalu tinggi di negaranya sendiri. Dengan cara-cara ini, strategi Asia Jepang ikut membantu perusahaan-perusahaan Jepang sendiri dalam menjaga kuatnya posisi persaingan mereka sekaligus membatasi ketakutan Jepang terhadap terjadinya deindustrialisasi.

Dasar pemikiran ideologis strategi Asia Jepang ditemukan dalam teori pembangunan ekonomi "angsa terbang" yang dikemukakan oleh ekonom Kaname Akamatsu di tahun 1930-an. Dalam model pembangunan ekonomi didorong oleh difusi seluruh kawasan dengan modal, teknologi, dan ketrampilan manajerial Jepang, ekonomi termaju laju di kawasan tersebut. Difusi ekonomi dan teknologi memungkinkan, ekonomi-ekonomi yang sedang menjalankan industrialisasi tersebut meningkatkan kualitas ekspor dan struktur industri mereka. Setelah, industrialisasi tercapai, mereka akan mengekspor barang-barang semakin canggih ke Jepang dan negara-negara lain. Teori ini menyangkan suatu pola kerjasama pembangunan ekonomi

dan Mite regional di Asia yang menguntungkan Jepang maupun ekonomiekonomi di kawasan ini.

Di akhir tahun 1970-an, Saburo Okata, yang kemudian menjabat Menteri Luar Negeri Jepang, mempopulerkan gagasan bahwa negara-negara Asia Timur perlu mengikuti pola angsa terbang. Perumusan kita (yang menjadi demikian populer di kalangan komentato I menempatkan Jepang sebagai angsa pemimpin dalam penerbangan regional ini; ia membimbing ke arah jalan menuju industrialisasi d pembangunan ekonomi. Negara-negara Asia lainnya, dari ekonomi Asia Timur Laut yang industrinya lebih maju hingga negara-negara berpenghasilan lebih rendah di Asia Tenggara, selanjutnya mengatur diri mereka dalam pola terbang sesuai dengan kekuatan ekonomi dan pembangunan teknologi masing-masing. Dari urutan terdepan, Jepang diikuti oleh ekonomi-ekonomi yang lebih maju seel. Taiwan, Korea, dan anggota-anggota ASEAN. Ketika ekonomi yang lebih maju kehilangan keuntungan komparatifnya dalam produk-produk tertentu, produksi barang tersebut dialihkan keansa" atau "beberapa angsa" lainnya yang berada tepat di belakangnya. Berhasilnya gelombang angsa-angsa dalam menjalankan industrialisasi ini akan memungkinkan mereka menangkap perolehan dari para pemimpinnya, dan suatu. saat, setiap ekonomi di kawasan tersebut akan terbangun. Pada akhirnya proses pengejaran teknologi ini akan mentransformasikan struktur vertikal pembagian regional pekerja menjadi struktur horisontal yang terdiri dari ekonomi-ekonomi yang setara dan mandiri.

Terlepas dari gambaran adanya tata ekonomi horizontal dan egaliter di wilayah tersebut dimana Jepang pada akhirnya hanya sebagai pihak pertama yang mencapai tingkatan yang akan dirasakan bersama mi, pengujian kasar menjelaskan bahwa kebijakan dan praktek Jepang sepenuhnya dimaksudkan untuk tetap menjadi angsa pemimpin. Elit politik dan bisnis Jepang percaya bahwa penting sekali bagi Jepang untuk tetap menjadi pusat manufaktur ekspor padat teknologi dan ekspor produk yang semakin canggih lainnya. Sebagaimana pendapat Hatch dan Yamamura, meningkatnya jiwa merkantilistik Jepang bermakna bahwa ia akan mencoba menjadi "pabrik dunia" dan tidak akan menjadi sebuah ekonomi jasa yang mengimpor barangbarang manufaktur (yaitu, barang-barang yang tidak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Jepang di dalam ataupun di luar negeri). Jepang telah mendorong ekonomi-ekonomi industri baru. Asia

Timur untuk mengekspor barang-barang manufaktur mereka ke Amerika Serikat dan Eropa Barat, bukannya ke Jepang, dan penting untuk dicatat bahwa baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan besar telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan dan praktek untuk mencegah difusi rahasia-rahasia industri terpenting dan pengetahuan teknologi Jepang ke negara-negara lain. Pada kenyataannya, negara-negara Asia lainnya secara sengt mengeluhkan penolakan Jepang untuk berbagi teknologi industrinya yang lebih maju.

Meski demikian, lewat investasi, kebijakan perdagangan, dan bantuan luar negeri, Jepang telah mentransfer rumus pertumbuhan yang didorong ekspor pasca perangnya ke Asia Timur, sebuah strategi pembangunan yang didasarkan pada pengejaran teknologi dan kebijakan industri-industri tahap dini (*infant industries*). Dan ekonomi-ekonomi Asia Timur melangsungkan pembangunan dengan mengadopsi industri-industri yang terbukti berhasil di Jepang dan Barat. Ekonomi ekonomi Asia Timur juga mengadopsi elemenelemen penting lain model ekonomi Jepang seperti peran aktif pemerintah dalam ekonomi. Demikian pula, dalam beberapa ekonomi, konglomeratkonglomerat. industri besar dibangun serupa dengan keiretsu Jepang, misalnya, chaebol Korea Selatan. Terlebih lagi, masyarakat-masyarakat ini telah memberi Jepang dan perusahaan-perusahaannya suatu peran kunci"; dalam industrialisasi mereka. Meskipun kecanggihan teknologi ekonomiekonomi ini telah meningkat, basis teknologi wilayah ini dan komponenkomponen berteknologi tinggi produk-produk manufaktumnyam,"...' sebagian besar tetap, berasal. dari Jepang. Sebagai contoh, terlepas dari keberhasilannya yang luar biasa, industri permobilan Korea Selatan tidak akan bertahan tanpa komponen-komponen kunci buatan Jepang. Hingga dan kecuali ekonomi-ekonomi ini menjadi lebih inovatif, per mereka dalam. ekonomi global akan tetap sebagai subordinat.

5.4. Kepemimpinan Regional Jepang

Ambisi kepemimpinan Jepang di Asia Pasifik mengalami kemunduran akibat terjadinya krisis keuangan Asia Timur. Reaksi awal. pemerintah Jepang terhadap krisis ini adalah bingung sehingga menerima kritik tajam dari dalam maupun luar wilayah. Walaupun mengungkapkan simpati atas masa-masa sulit yang di alam ekonomi-ekonomi terjangkit, pemerintah Jepang hanya berpangku tangan dan memberi tahu negara-negara

Asia lainnya bahwa Jepang tidak dapat memberikan suatu bantuan karena permasalahan ekonominya sendiri, namun demikian, pada akhirnya Jepang memberikan kontribusi keuangan yang substansial dalam beberapa upaya penyelamatan IMF; ia bahkan menjadi negara donor terbesar. Jepang juga tetap menjaga pemberian ODAN ke wilayah tersebut. Sebagai tambahan, sebagian besar karena kejengkelan terhadap Menteri Keuangan Amerika Serikat Rubin, Jepang pada musim gugur tahun 1997 mengusulkan pembentukan Dana Moneter Asia (Asia Monetary Fund) yang didukung oleh dana \$100 milyar dari Jepang (di mana Amerika Serikat tidak diikutsertakan) untuk membantu ekonomi-ekonomi yang bermasalah dapat mengelola hutang mereka. Meskipun inisiatif ini ditentang dengan kuatnya oleh Cina, Amerika Serikat, dan lain-lain, banyak pakar percaya bahwa usulan ini hendaknya dimodifikasi dan perlu dilanjutkan. (satu versi modifikasi yang diusulkan setahun berikutnya diterima secara lebih baik oleh Amerika Serikat). Bagaimanapun juga, kontribusi terpenting yang dapat Jepang berikan terhadap solusi permasalahan ekonomi wilayah ini adalah mempercepat pertumbuhan ekonominya sendiri sehingga dapat menyerap impor dari kawasan tersebut.

Kepemimpinan Jepang di dalam wilayah ini, dan bahkan di dalam ekonomi global, tidak akan berhasil. kecuali terdapat perbaikan besar dalam ekonomi mereka sendiri. Sejak ambruknya ekonomi gelembung di awal tahun 1990-an, Jepang menderita krisis keuangan parah yang telah menciutkan minat berinvestasi maupun berkonsumsi; orang memperkirakan. bahwa, di tahun 1998, sistem perbankan sendiri menanggung sekitar \$1 triliun pinjaman. macet. Setelah menderita akibat pertumbuhan. yang lambat hampir selama tahun 1990-an, dalam kuartal pertama tahun 1998 ekonomi Jepang tercebur ke dalam resesi yang serius, terburuk sejak Depresi Besar. Sahamsaham menukik secara tajam. Meskipun para pejabat Jepang, khususnya Menteri Keuangan yang sangat berkuasa, demikian lambat dalam mengakui adanya krisis, sangat jelas bagi para pengamat Amerika dan negara-negara lain bahwa ekonomi Jepang, khususnya sistem perbankannya, membutuhkan. perubahan. drastis. Administrasi Dinton bersikukuh bahwa Jepang harus mengejar kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif: Dalam. beberapa bulan berikutnya, kepentingan-kepentingan ekonomi Jepang yang berpengaruh, khususnya perusahaan-perusahaan besar, melahirkan. kembali gagasan bahwa suatu tindakan. radikal memang diperlukan. Meski demikian, Kementrian Keuangan tetap

demikian enggan. mengakui adanya krisis dan. menolak dengan kuat tekanan-tekanan. Amerika untuk melaksanakan reformasi dan perangsangan ekonomi Jepang yang mengalami kebuntuan. Para pakar Jepang, Amerika, dan negara-negara lain percaya bahwa Jepang harus menyerang permasalahan ekonomi yang begitu berbahaya ini pada tiga front luas. Diperlukan implementasi tindakan-tindakan ambisius untuk merangsang ekonomi. Sistem keuangan dan perbankan, yang menjadi penggerak utama ekonomi, juga harus direformasi. Dan suatu perbaikan menyeluruh terhadap birokrasi dan ekonomi perlu. dijalankan seandainya upaya apa pun yang dilakukan ingin. membuahkan. hasil.

Rangsangan Ekonomi

Administrasi Dinton, sebagian besar ekonom Amerika, dan. bahkan sebagian besar orang Jepang sendiri, percaya bahwa pemerintah Jepang harus berbuat lebih banyak lagi untuk merangsang ekonominya yang mengalami kebuntuan. Walaupun banyak pejabat pemerintah. Amerika. Serikat telah menekan Jepang untuk membuka ekonominya, bagi barang dan jasa Amerika, di akhir tahun 1990-an motif Amerika telah berubah. Selanjutnya Amerika Serikat mulai menekan. Jepang untuk mengimpor lebih banyak barang dari ekonomi-ekonomi Asia Timur. Tindakan seperti ini akan membantu ekonomi-ekonomi Asia, Timur dan. juga mengurangi tekanan-tekanan impor yang merangsang" terjadinya proteksionisme di Amerika Serikat. Meski demikian, pemerintah Jepang tetap enggan melakukan tindakan berarti dan sebaliknya: malah mencoba memperingan. penderitaan-nya. Kementerian. Keuangan, secara keras menolak penciptaan program pengeluaran besar-besaran, pemerintah karena pemerintah sendiri telah terjebak dalam dan menghadapi peningkatan biaya jaminan sosial akibat persatu penuaan penduduk. Meski demikian, antara Bulan Oktober tahun 190 dan akhir Bulan April tahun 1998, pemerintah benar-benar mengumumkan setengah lusin paket tindakan perangsang ekonomi. Tanggapan para ekonom Amerika dan Jepang sendiri adalah bahwa upaya-upaya ini hanya dapat sedikit menarik ekonomi keluar dari resesi, dan diperlukan suatu pendekatan yang lebih ambisius terhadap resesi Jepang. Dengan berpendapat bahwa Jepang berada dalam suatu perangkap likuiditas" (istilah ekonomi yang setara dengan "lubang hitam" astronomi di mana untuk lepas darinya sangatlah sulit), Krugman dalam serangkaian artikel di Bulan Mei dan. Juni 1998 dan di situs web miliknya membuat satu

usulan yang sangat kontroversial bahwa Bank of Japan perlu mengimplementasikan suatu program reinfeksi radikal dengan mencetak banyak uang, untuk mendorong konsumen dan bisnis Jepang mulai membelanjakan uangnya lagi. Usulan klasik model-Keynes Krugman untuk meningkatkan "permintaan efektif" dalam menghadapi ancaman infeksi dianggap konyol dan ditolak mentah-mentah oleh para pejabat Kementerian Keuangan, yang menjawab bahwa Krugman mengabaikan cara-cara kerja ekonomi Jepang. Agaknya, satu alasan penolakan resminya adalah bahwa tingkat infeksi yang lebih tinggi akan merugikan para pensiunan Jepang.

Setelah Perdana Menteri Keizo Obuchi mengemban kekuasaan di pertengahan tahun 1998, pemerintah Jepang mengumumkan sebuah program pengembalian energi ekonomi Jepang di pertengahan Bulan November; program ini dijuluki sebagai upaya penyelamatan "definitif." Paket rangsangan. senilai \$200 milyar, yang menyertakan. kombinasi pemotongan pajak, pinjaman, dan pengeluaran pemerintah, merupakan yang terbesar dalam sejarah Jepang. Meskipun banyak pakar meragukan. bahwa sekalipun paket rangsangan ini akan memberikan perbedanan. nyata, di awal musim panas tahun 1999 tandan-tandan menguatnya ekonomi kembali mulai tampak jelas.

Revitalisasi ekonomi dalam jangka panjang juga akan memerlukan reformasi sistem keuangan Jepang. Karena sistem perbankan merupakan pusat permasalahan keuangan Jepang, berapapun uang dan likuiditas yang disediakan pemerintah tidak akan berpengaruh, kecuali bank-bank mampu dan mau menyalurkan. dana-dana baru ke konsumen dan para investor hal yang belum bisa mereka. lakukan. Hingga reformasi perbankan diimplementasikan, bank-bank tidak akan berada pada posisi yang memungkinkannya menggunakan modal tambahan secara efektif. Sungguh, bank-bank Jepang telah berhenti memberikan pinjaman dengan. bebasnya dan di awal tahun 1999 mereka tidak mampu menyalurkan modal secara cukup.

5.5. Reformasi Sistem Perbankan dan Keuangan

Terlepas dari lamanya krisis keuangan berlangsung dan dampak negatifnya terhadap konsumsi dan investasi, Kementerian Keuangan dan pemerintah Jepang enggan melakukan tindakan perbaikan besar-besaran. Keragu-raguan ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa setiap solusi akan sangat membebani bank, deposan, dan/atau pada

akhirnya, pembayar pajak. Kementerian Keuangan juga enggan. mengakui kegagalannya sendiri (termasuk korupsi) menyangkut sistem perbankan karena itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Dalam sistem mereka yang didasarkan pada harmoni sosial dan perlindungan bagi para pecundang, pemerintah Jepang mengalami kesulitan untuk menuruti nasehat Amerika dengan cukup membiarkan bank-bank dan institusi-institusi keuanganlah, yang tidak dapat memenuhi kewajibannya gulung tikar; sebuah sistem dengan lebih sedikit bank namun lebih kuat, demikian para pakar Amerika menegaskan, akan memecahkan permasalahan tersebut.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Jepang dan Kementerian Keuangan telah mencoba beragam tindakan yang kurang tegas untuk menyelamatkan sistem perbankan dan keuangannya. Untunglah di Bulan Oktober 1998, setelah berbulan-bulan perdebatan di parlemen, pemerintah Obuchi mengambil tindakan menentukan dan' menciptakan satu struktur baru untuk menangani kegagalan dari serta menyusun satu mekanisme baru untuk merekapitalisasi bank-bank yang memiliki pinjaman macet besar. Satu elemen krusial sangat kontroversial dalam skema ini adalah penggunaan dana-dana, publik untuk menyelamatkan bank-bank bermasalah. Meskipun tindakan penting ini disambut baik oleh kebanyakan pengamat, para pengkritiknya mencatat bahwa ia gagal membuat praktek-praktek perbankan negara tersebut menjadi lebih transparan ketika ia tidak meminta bank-bank mengungkapkan posisi keuangannya terhadap publik. Masih perlu disimak apakah reformasi-reformasi ini akan memidani untuk merevitalisasi sistem perbankan Jepang yang sedang sakit.

5.6. Reformasi Institusional

Para pakar Jepang dan luar negeri percaya bahwa suatu reformasi, besar dalam ekonomi maupun birokrasi pemerintah Jepang adalah esensial bagi keberhasilan ekonomi riil karena produktivitas ekonomi keseluruhan (yang kontras dengan sektor ekspornya) cukup rendah dan karena keperluan untuk menyokong penduduk Jepang yang bertambah tua. Bahkan sektor ekspor sendiri dicirikan oleh adanya kelebihan kapasitas dan rendahnya batas keuntungan. Regulasi pemerintah dan cara-cara tradisional telah melumpuhkan inovasi dan jiwa keraswastaan. Bagaimanapun juga, para pendukung reformasi dari sepenuhnya cemas bahwa reformasi apa pun akan sangatlah sulit capai.

Sebagian karena kekuatan kepentingan-kepentingan domes yang mencari perlindungan, ekonomi Jepang adalah salah satu yang paling diregulasi di dunia. Penekanan pada harmoni sosial dan penjagaan para pecundang juga telah berkontribusi pada regulasi berlebihan ini. Banyak ekonom, percaya bahwa regulasi berlebihan melumpuhkan inisiatif dan menghambat kebebasan bergerak pekerja dan modal ke industri-industri baru yang lebih efisien, dan bahwa regulasi yang membebani ini sebagian besar bertanggung jawab atas rendahnya tingkat produktivitas yang seringkali ditemukan dalam sektor-sektor ekonomi non ekspor. Deregulasi ekonomi, sebagaimana dipercaya kebanyakan ekonom, akan merangsang kewiraswastaan dan meningkatkan produktivitas; ini juga akan menjadi satu langkah penting menuju pembukaan pasar Jepang terhadap, impor, dan selanjutnya akan meningkatkan efisiensi keseluruhan. Meski demikian, reformasi ekonomi yang benar-benar berarti akan menyertakan penutupan ribuan perusahaan dan menyebabkan ratusan ribu, orang Jepang kehilangan pekerjaannya; sehingga hampir dapat dipastikan, masyarakat dan kepentingan-kepentingan terkait akan sedapat mungkin menentang tindakan seperti ini. Terlebih lagi, karena deregulasi akan melemahkan kekuasaan Kementrian Keuangan dan birokrasi negara lainnya, lembaga-lembaga. ini sepertinya juga akan menentang adanya reformasi. Reformasi ekonomi Jepang -yang sebenarnya paling mungkin terjadi akanlah lambat dan terbatas. Kebanyakan ekonom dan pejabat publik Amerika percaya bahwa solusi permasalahan ekonomi Jepang adalah mentransformasi Jepang ke dalam ekonomi pasar tipe-Amerika. Bagaimanapun juga, orang jepang, sebagaimana orang Asia dan kebanyakan orang Eropa daratan, merasa takut dengan kemungkinan konsekuensi-konsekuensi ekonomi berorientasi-pasar gaya Amerika. Kebanyakan menolak "Anglo-Saxonisasi" ekonomi karena dianggap ancaman terhadap perdamaian sosial dan kemandirian ekonomi/politik. Masyarakat Jepang, sebagaimana mereka takutkan, akan tercabik.-cabik oleh kekejaman ekonomi seperti ini, toleransinya terhadap ketidakamanan ekonomi serta oleh banyaknya jumlah pecundang yang seringkali ditimbulkan oleh sistem semacam ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jepang secara tegas menolak perubahan model. ekonomi Amerika. Transformasi Jepang menjadi satu ekonomi gaya Barat akan menyertakan pergeseran fundanmental hubungan antar individu dan institusi-institusi sosial serta akan mengubah

jepang dari suatu masyarakat bercirikan kemajemukan. Orang sekali lagi harus menyimpulkan bahwa reformasi besar ekonomi Jepang seperti yang sulit terjadi.

5.7. Kebangkitan Cina Sebagai Kekuatan Ekonomi

Peranan masa depan ekonomi dan politik Cina di kawasan ini adalah satu dari isu-isu terpenting yang dihadapi Asia Timur dan, dalam jangka panjang, seluruh dunia. Laju pertumbuhan ekonomi Cina di tahun 1990-an sangat mencengangkan. Di Tahun 1992 dan 1993, Cina tumbuh sebesar 13 persen sebelum inflasi memaksa pemerintah menginjak rem. Diukur dari GNP keseluruhan, ekonomi di dunia, dan beberapa pihak memperkirakan, akan melewati Amerika Serikat di awal abad kedua puluh satu. Ketika ekonomi Cina tumbuh dan menjalankan industrialisasi, keberadaan ekonominya di dalam wilayah ini, dan di dalam ekonomi dunia pada umumnya, menjadi semakin menonjol. Mampu atau tidaknya Cina melanjutkan pertumbuhan pesatnya dan bagaimana ia akhirnya menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya akan penting tidak hanya bagi Asia Timur namun juga tempat-tempat lain.

Akibatnya masalah keuangan yang melilit ekonomi-ekonomi lain beserta terjadinya malaise ekonomi Jepang, banyak pengamat Amerika dan negara-negara lain percaya bahwa Cina telah menjadi kekuatan terkemuka di wilayah tersebut. Keberhasilan Cina sangat tergantung pada aksesnya terhadap modal dan teknologi asing, demikian pula pada aksesnya ke dalam pasar Amerika. Terlebih lagi, ekonomi industri Cina dalam batas-batas yang cukup luas merupakan ekonomi "berrongga." Satu porsi substansial surplus perdagangan Cina terhadap dunia dibangkitkan oleh perusahaan-perusahaan non Cina; para pengeksportir besar dari Cina banyak di antaranya adalah cabang-cabang MNC asing (Amerika, Jepang, dan Taiwan). Demikian pula, sebagian keberhasilan ekonomi Cina berkat jasa Hong Kong sebagai penyedia modal terbesar bagi Cina. Dinamisme ekonomi Cina sebagian diminyaki oleh FDI dan ekspor maupun oleh akumulasi modal domestik dan/atau berkembangnya pasar domestik.

Perusahaan-perusahaan asing, baik langsung ataupun tak langsung, memegang tiga perempat ekspor Cina. Perusahaan sepatu terbesar di Cina dan di dunia memiliki mal yang berasal dari Taiwan, didanai oleh Goldman Sachs, dan memproduksi sepatu Nike, Reebok, Adidas berdasarkan kontrak. Bisnis-bisnis asing dan pabrik-pabrik milik asing

meningkat, dan antara pertengahan tahun 1980-an dan 1990-an, ekspor Cina yang diakibatkan kehadiran perusahaan-perusahaan asing tumbuh secara dramatis. Cabangcabang perusahaan asing ini utamanya merupakan pabrik-pabrik pengolahan atau perakitan dalam industri berteknologi dan bernilai-tambah rendah, dan kebanyakan komponen produk-produk tersebut diimpor. Konsekuensinya, sebagian besar laba perusahaan menjadi milik negara-negara lain sementara Cina hanya memperoleh persentase yang relatif kecil berupa pajak dan upah. Sementara ekspor Jepang secara teknologi termasuk yang terunggul di dunia, ekspor Cina utamanya terdiri atas produk-produk seperti mainan, barang-barang elektronik murah, tekstil, dan alas kaki. Produk-produk ini biasanya dipasarkan dengan merek non Cina (Nike, Reebok, Sony). Meskipun Cina secara mantap terus menapak tangga teknologi dan nilai-tambah, sektor ekspor Cina sebagian besar tetap sebuah endang ekonomi dengan hanya sedikit yang melimpah ke dalam ekonomi Cina daratan yang demikian besar.

Peran masa depan ekonomi dan politik Cina di kawasan ini adalah sadari isu-isu terpenting yang dihadapi Asia Timur dan, dalam jangka panjang, seluruh dunia. Laju pertumbuhan ekonomi Cina di tahun 1990-an sangat mencengangkan. Di tahun 1992 dan 1993, Cina berubah sebesar 13 persen sebelum inflasi memaksa pemerintah menginjak rem. Diukur dari GNP keseluruhan, ekonomi Cina telah menial di kerja atau setidaknya ketiga - terbesar di dunia, dan beberapa memperkirakan, akan melewati Amerika Serikat di awal abad kedua puluh satu. Ketika ekonomi Cina tumbuh dan menjalankan industrialisasi, keberadaan ekonominya di dalam wilayah ini, dan di ekonomi dunia pada umumnya, menjadi semakin menonjol. Sebagai tambahan, "Cina yang lebih besar" (meningkatnya jahan ekonomi Cina daratan, Hong Kong, Taiwan dan komunitas-komunitas negeri Cina di Asia Tenggara) juga telah menjadi kekuatan ekonomi yang penting di seluruh wilayah. Kemampuan militer Cina telah berkembang, dan, dengan menurunnya signifikansi militer Rusia di Asia Timur, Cina mulai menampakkan diri sebagai kekuatan militer Asia yang dominan. Mampu atau tidaknya Cina melanjutkan perumbuhannya pesat dan bagaimana ia akhirnya menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya akan penting tidak hanya bagi Asia Timur namun juga tempat-tempat lain.

Akibat masalah keuangan yang melilit ekonomi-ekonomi lain beserta terjadinya malaise ekonomi Jepang, banyak pengamat Amerika dan negaranegara lain percaya bahwa Cina

telah menjadi kekuatan terkemuka di wilayah tersebut. Tentu saja, Industrialisasi pesat Cina yang mengesankan dan pertumbuhan ekspornya yang luar biasa mendukung pendapat bahwa Cina adalah "sebuah Jepang yang atau bahkan "super jepang.". Bagaimanapun juga, pencirian pembangunan ekonomi Cina ini harus dikualifikasi dalam cara-cara tertentu. Sebagai contoh, meskipun surplus perdagangan Cina dengan Amerika.

Terlepas dari keterbatasan pencapaian ekonomi Cina, tetangga tetangga. ASEAN terdekatnya memiliki cukup alasan untuk memandang negara ini sebagai tantangan ekonomi saat ini dan mungkin bagai ancaman militer di masa mendatang. Negara-negara ASEAN utamanya gerah dengan cepatnya Cina menjadi sebuah kekuatan, industri, khususnya dalam produk-produk berteknologi tinggi. Sebagai contoh, di tahun 1993 Cina memproduksi lebih banyak kendaraan daripada gabungan seluruh negaranegara ASEAN; ia juga menjadi produsen terbesar televisi warna di dunia. Wilayah pesisir selatan Cina mengancam daya saing biaya ASEAN dalam produk-produk seperti semikonduktor, peralatan audiovisual, dan kamera. Cina telah menggantikan Taiwan sebagai produsen komputer terbesar kedua wilayah ini. Para tetangga ASEAN Cina umumnya prihatin bahwa Cina telah menyerap FDI yang sebenarnya bisa menjadi milik ini mereka, dan kebangkitan industri Cina telah merangsang negara-negara ASEAN meningkatkan kerjasama ekonomi satu sama lain.

Sejak ekonomi Cina mengalami transisi dari ekonomi terpimpin beberapa waktu yang lalu menjadi ekonomi yang lebih bertipe-pasar at penilaian atas pencapaian Cina dan potensi yang dimilikinya sangat sulit dilakukan, bahkan tidak mungkin. Meskipun liberalisasi ekonomi telah cukup maju, di pertengahan tahun 1999 birokrasi negara tetap menjadi beban berat ekonomi. Terlebih lagi, sekitar setengah dari pabrik-pabrik Cina merupakan perusahaan negara (banyak di antaranya milik militer), dan banyak industri menerima subsidi murah dari pemerintah yang sangat kritis bagi kemampuan mereka untuk bertahan. Meskipun di tahun 1997 pemerintah mengumumkan rencana-rencana ambisius untuk memprivatisasi sektor publik yang demikian besar, pelaksanaan tugas ini akan sangatlah sulit secara politik karena begitu banyak perusahaan yang dimiliki oleh militer. Terlebih lagi, perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi sekarang ini adalah satu-satunya sumber jaminan ekonomi ratusan ribu karyawan yang sebenarnya tidak

layak kerja. Pengangguran skala luas dan ketidaksetaraan antar wilayah yang tinggi akan menampakkan ancaman serius bagi stabilitas politik Cina. Jika pekerja yang diberhentikan tidak dapat diserap oleh sektor swasta yang berkembang pesat, pengurangan sektor publik tak pelak lagi akan membawa pada ketegangan sosial dan krisis politik yang serius.

Pergeseran dari ekonomi yang dijalankan negara menjadi ekonomi swasta berorientasi-pasar akan menciptakan banyak pemenang namun juga banyak pecundang. Transformasi seperti ini dapat pula menyertakan suatu pergeseran mendansar dalam struktur kekuasaan Cina, dari para birokrat dan pejabat partai ke bisnis-bisnis swasta; bagai manapun, penting untuk dicatat bahwa di Cina, birokrat, pejabat partai, dan pelaku bisnis swasta mungkin adalah orang yang sama. Pada saat penulisan ini, belum dapat dipastikan apakah Cina dapat menjalankan transisi yang direncanakannya, namun sekarang ini ia tetap di antara ekonomi terpimpin masa lalu dan ekonomi pasar masa mendatang. Sebagaimana disarankan Hatch dan Yamamura, situasi ini telah menciptakan ketidakpastian menyakitkan yang merupakan gabungan sisi-sisi terburuk kedua sistem.

Cina telah menjadi sebuah ekonomi ganda dan diliputi oleh ancaman ketidaksetaraan yang begitu besar. Empat Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones) di sepanjang pesisir, di mana pertumbuhan ekonomi Cina terkonsentrasi, merupakan wilayah yang dinamis dan telah mengalami industrialisasi yang tinggi. Propinsi Guangdong (Kanton), misalnya, dengan hanya 6 persen dari keseluruhan populasi, menyumbang 21 persen pertumbuhan ekonomi Cina. Bagian terbesar ekonomi masih bertumpu pada pertanian yang dijalankan ratusan juta petani Cina di pedesaan. Meskipun Cina adalah negara ketiga yang paling makmur di dunia dalam pengertian GNP keseluruhan, pada basis perkapita ia tetap merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum negara ini memiliki kelas menengah yang cukup makmur, yang dan dapat memantapkan sebuah ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan yang didorong kebutuhan domestik. Lebih menakutkan lagi, ketidakmerataan pendapatan telah meningkat di antara kawasan-kawasan yang berbeda, antara penduduk pedesaan dan perkotaan, dan antara industri-industri yang menang dan yang kalah, dan pasti kesemuanya akan mendantang bahaya ketidakstabilan yang serius. Beijing harus bergulat dengan dilema bahwa, sementara berusaha membebaskan

pasar dari pembatasan-pembatasan birokratis yang menghambat tumbuhnya kemakmuran, pelanggaran kontrol politik yang menyertainya dapat membawa pada keretakan internal dan sebagaimana di Uni Soviet, bahkan menjatuhkan rezim Komunis.

Pemahaman peran masa depan Cina telah dibatasi oleh mitos tentang "Cina yang lebih besar." Banyak pengamat merasa khawatir bahwa etnik Cina kapitalis daratan, di Taiwan, dan di seluruh Asia Tenggara akan bergabung untuk membentuk suatu jaringan keuangan manufaktur yang akan menjadi kekuatan tangguh dan lawan sel bagi Jepang di wilayah tersebut. Ketakutan seperti ini telah memperburuk arti penting Cina yang lebih besar, sekalipun benar bahwa keterkaitan antara Cina daratan, Taiwan, dan komunitas-komunitas Cina di Asia Timur menjadi demikian penting bagi Cina dan keseluruhan wilayah. Taiwan dan komunitas-komunitas Cina di luar negeri misalnya, telah memasok banyak modal investasi, ahli ekonomi dan banyak jalur pemasaran yang telah meminyaki industrialisasi. Meski demikian, hubungan di antara komunitas-komunitas, umumnya bersifat khusus dan sebagian besar komersial. Perusahaan-perusahaan Cina dari luar negeri biasanya merupakan usaha kosial milik keluarga, yang utamanya berminat memperoleh laba-secara, cepat dan kurang memenuhi kemampuan organisasi demi menciptakan jaringan produksi regional serupa dengan yang ditempa oleh konglomerat-konglomerat besar Jepang. Terlebih lagi, hanya sedikit dari perusahaan-perusahaan ini yang menjadi penemu teknologi penting.

Dalam Bulan April 1999, Cina belum menjadi anggota WTO, dan aksesnya ke dalam pasar Amerika yang krusial tetap tergantung pada 'most favored national' statusnya sebagai "negara yang paling diminati" (most favored national), status ini harus diperbaharui setiap tahunnya oleh Kongres Amerika Serikat, dan persetujuannya biasanya tercapai melalui kontroversi sengit, satu situasi yang akan dan mungkin selalu demikian lemah, setidaknya hingga pemilihan umum Amerika Serikat berikutnya dari politik yang cukup menimbulkan masalah. Isu pelanggaran hak asasi manusia di Cina demikian hangat; banyak pihak di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang secara tulus memprihatinkan penolakan Cina untuk memberikan kebebasan sipil dan hak-hak politik kepada masyarakatnya. Sebagai tambahan atas isu kemanusiaan tersebut, isu awal dari sebuah administrasi baru. Prospek jangka panjang gabungannya Cina ke WTO dibayangi oleh sejumlah isu ekonomi dan isu lainnya seperti status keanggotaan Taiwan dalam WTO telah

menghalangi keanggotaan Cina. Juga belum jelas apakah Cina siap untuk menerima kewajiban sebagai anggota seperti keterbukaan tanpa pembatasan bagi perdagangan dan FDI serta- pengungkapan dan ekonomi seutuhnya. Di akhir tahun 1990-an, isu-isu keanggotaan Cina dalam WTO dan hubungan Cina dengan Amerika Serikat demikian diperumit oleh tuduhan bahwa Cina telah mencuri rahasia-rahasia militer Amerika Serikat dan oleh kecerobohan pemboman NATO terhadap kedutaan besar Cina di Beograd yang patut disayangkan.

Ketakutan terhadap Cina sebagai kekuatan ekonomi dan militer telah menjadi sebuah isu penting, namun keprihatinan seperti ini tidak perlu membuat kita menerima ramalan kiamat "benturan peradaban" Samuel Huntington. Para pemimpin politik, komunitas bisnis, dan serikat pekerja di sejumlah negara sangat mengkhawatirkan persaingan dari para pekerja berupah rendah Cina; para penentang keanggotaan Cina di WTO juga menuding bahwa perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Cina maupun perusahaan-perusahaan Cina menjalankan operasinya tanpa mempeduki standar-standar pekerja dan lingkungan. Banyak penentang yang merasa takut bahwa keanggotaan WTO akan semakin raempermurah ekspor Cina dan membanjiri pasar dunia, mengakibatkan terjadinya massal di Barat, dan semakin merusak lingkungan.

Beberapa pemimpin politik Amerika bahkan merasa takut bahwa keinginan perusahaan Amerika dan negara-negara lain (Boeing dan Loral, misalnya) untuk mendapatkan akses ke dalam pasar Cina yang dikendalikan pemerintah membuat perusahaan-perusahaan tersebut antara memasok teknologi bertujuan-ganda kepada Cina, yaitu memiliki arti penting secara komersial maupun militer, seperti desain pesawat terbang, komputer, dan satelit, yang kesemitanya sangat memperkuat potensi militer Cina. Para pengkritik lain menuding sikap Cina yang melanggar norma-norma komersial internasional seperti pembajakan intelektual, hambatan-hambatan impor yang tinggi, pelanggaran kesepakatan tekstil internasional dan kesepakatan lainnya, pembatasan kerjatangan orang asing, dan kegagalan untuk memberikan statistik ekonomi yang akurat. Lebih jauh lagi, Cina memiliki aturan-aturan kerahasiaan ketat dalam hal-hal yang bagi komunitas internasional dianggap sebagai informasi bisnis dan ekonomi yang wajar. Meskipun banyak keprihatinan di Barat dimotivasi oleh politik domestik, kepentingan-kepentingan ekonomi yang sempit, atau hanya seke kesalahan tafsir, catatan tentang Cina secara

keseluruhan telah munculkan keraguraguan atas kesiapan dan kemauan Cina ini mengemban tanggung jawab keanggotaan di dalam WTO dan menia anggota yang disambut baik dalam sistem ekonomi dunia. Meskipun, Cina tak diragukan lagi memang ditakdirkan menjadi kekuatan liter utama, peran ekonominya di wilayah ini dan di selalu tetap belum dapat dipastikan hingga terpecahkannya isu-isu di atas .

5.8. Kerja Sama Ekonomi Asia Pasific (APEC)

Suatu identitas Asia Pasifik dan kerangka kerja institusional perlahan-lahan mulai berkembang, dan beberapa organisasi on dibentuk pada tingkat swasta maupun antar pemerintah. Meski, upaya-upaya untuk mendapatkan sebuah struktur internasional Asia Pasifik multilateral yang resmi sebagaimana Uni Eropa dan TA menghadapi berbagai halangan yang sangat besar. Keragaman dan)"--lam wilayah ini, adanya konflik-konflik politik, dan persaingan sengit antar ekonomi telah memperumit kerjasama ekonomi dan politik Sebagai tambahan, kekuatan-kekuatan utama wilayah ini - Amerika", Serikat, Jepang, dan Cina - memiliki agendan ekonomi dan politik yang demikian berbedan. Sebagai contoh, sementara Amerika Serikat menginginkan segala hambatan perdagangan dan investasi di- wilayah, dihapuskan, negara-negara lain begitu enggan untuk membuka ekonomiekonomi mereka.

Di tahun 1989, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation - APEC) dibentuk dan pertemuan pertamanya diselenggarakan di Canberra, Australia. APEC bangkit dari inisiatif, Australia yang sebagian dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar wilayah Asia Pasifik dalam perundingan perdagangan Putaran Uruguay. Perjanjian Pasar Tunggal Eropa (tahun 1986) dan percepatan pergerakan integrasi Eropa yang lebih besar merupakan rangsangan penting terhadap inisiatif ini Jepang dengan kuatnya mendukung-,-7~,~ pembentukan APEC, sebagian untuk memperoleh kekuatan strategis, saat berhadapan dengan Uni Eropa pada Putaran Uruguay dan di saat bersamaan memiliki posisi cadangan seandainya perundingan Putaran Uruguay GATT gagal. Dalam satu dekade sejak pembentukan APEC, terdapat banyak upaya untuk memperkuat organisasi ini, namun APEC utamanya tetap sebuah forum diskusi antar pemerintah dari hampir semua negara di wilayah tersebut. Ketidacukupan pengembangan institusional wilayah ini ditandani oleh nama APEC

sendiri; karena negara-negara anggota tidak dapat mencapai kesepakatan bahkan menyangkut ciri dan organisasi, tidak terdapat istilah seperti "forum," "organisasi," atau "dewan" untuk melengkapi nama organisasi tersebut.

Para pendukung APEC menyodorkan alasan bahwa, berdasarkan luasnya wilayah, APEC hendaknya dan seharusnya memainkan satu peran besar dalam ekonomi dunia. Bagaimanapun juga, efektivitas organisasi dibatasi oleh tiadanya kepemimpinan yang kuat dan beragamnya budaya, kepentingan politik, dan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota. Kemajuannya juga terhalangi karena APEC terbagi-bagi ke dalam setidaknya dua kelompok yang bertentangan. Satu kelompok, dipimpin oleh Amerika Serikat, ingin meruntuhkan hambatan-hambatan perdagangan dan investasi; Amerika Serikat dan para pendukung utamanya (Australia, Kanada, dan Singapura) ingin membuat APEC menjadi sebuah institusi yang memiliki kekuatan pengikat untuk mencapai tujuan tersebut. Satu kelompok lain, yang terdiri dari negara-negara Asia Timur yang kurang maju dan dipimpin oleh Malaysia dan Cina, tetap merasa curiga terhadap tujuan perdagangan bebas APEC; mereka lebih menyukai sebuah organisasi tanpa ikatan tekad apa pun. Meskipun Jepang seringkali mengambil posisi yang lebih dekat dengan kelompok yang kedua, ia biasanya berusaha menghindarkan diri untuk tidak menyerang pihak lainnya. APEC akan tetap merupakan Pemain yang tidak diperhitungkan dalam wilayah ini dan dalam ekonomi global yang lebih besar kecuali permasalahan tadi terpecahkan dan dilakukan perubahan-perubahan fundamental di dalam organisasinya.

Kebanyakan negara Asia memiliki sikap yang sangat mendua menyangkut APEC. Cina memilih untuk berpartisipasi namun demikian curiga bahwa APEC mungkin mencampuri kepentingan-kepentingan mereka dengan menekankan pembukaan ekonomi mereka. Jepang memandang APEC utamanya sebagai jalan untuk meningkatkan posisi tawar Asia dalam perundingan-perundingan internasional dan untuk memastikan bahwa Amerika Serikat akan terus memainkan satu peran militer utama di Pasifik.

APEC juga mengamankan akses ekspor Asia ke dalam pasar Amerika, namun Jepang, Cina, dan negara-negara lain dengan kuatnya menentang gagasan bahwa APEC, bukannya WTO, hendaknya menjadi sebuah forum bagi perundingan perdagangan. Meskipun para anggota ASEAN mendukung APEC, mereka tetap menaruh curiga

adanya. suatu organisasi regional yang nantinya akan didominasi oleh Amerika Serikat ataupun Jepang. Ketakutan. atas dominasi Amerika atau dominasi "putih" telah mendorong Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengusulkan suatu blok politik Asia bersatu, Kaukus Ekonomi Asia Timur (East Asia Economic Caucus), yang tidak mengikutsertakan Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan "putih" lainnya.

Sikap Amerika terhadap APEC telah mendua dari sejak kiprah awal organisasi ini. Usulan Australia aslinya tidak menyertakan Amerika Serikat, namun kemudian Menteri Luar Negeri James Baker menuntut penertaannya. Administrasi Bush, seperti Jepang, percaya bahwa sebuah organisasi regional Asia Pasifik akan menjadi alat tawar dalam putaran Uruguay maupun sebagai posisi cadangan seandainya perundingan menemui jalan buntu. Demikian pula, APEC mungkin menyediakan satu jalan untuk meredakan Jepang dan pasar Asia Timur yang sedang bangkit untuk membuka ekonomi-ekonomi mereka barang-barang Amerika; lebih jauh lagi, keanggotaan APEC sesuai dengan kebijakan perdagangan multi jalur Amerika. Amerika Serikat menginginkan "masuk" sekalipun ia tidak memiliki rencana apa pun menyangkut organisasi ini. Meski demikian, situasi berubah, setidaknya untuk sementara, dengan hadirnya Administrasi Clinton dan kesadaran yang dimilikinya bahwa APEC mungkin dapat menjadi kendaraan untuk menurunkan hambatan-hambatan perdagangan di seluruh Asia Timur dan Pasifik.

Inisiatif utama Administrasi Clinton menyangkut APEC adalah pertemuan Seattle di tahun 1993, yang dianggap pencerminan tekad signifikan Amerika Serikat terhadap wilayah tersebut. Sementara Administrasi Amerika yang terdahulu lebih menyukai pendekatan bilateral terhadap negara-negara ini, pertemuan Seattle dimaksudkan sebagai pengakuan Amerika atas arti penting wilayah tersebut secara utuh dan awal pendekatan multilateral Amerika terhadapnya. Pengangkatan wilayah Asia Pasifik dalam kebijakan luar negeri Amerika ini ditandani oleh fakta. bahwa, sementara pertemuan APEC sebelumnya diselenggarakan di tingkat menteri luar negeri, pertemuan Seattle adalah pertemuan APEC pertama yang dihadiri delapan belas kepala negara. Presiden Clinton juga memberikan sinyal peningkatan minatnya terhadap Asia Timur dengan berbicara tentang "Komunitas Asia-Pasifik." Meskipun agendan yang disiapkan oleh sekelompok

pakar dari negara-negara. anggota, diketuai oleh Fred Bergsten, direktur Institute for Internasional Economics, Washington, menyatakan ambisi untuk mentransformasi APEC menjadi "sebuah forum perundingan daripada. sebuah bada konsultasi semata." Pertemuan tersebut didominasi oleh upaya. pimpinan Amerika untuk menempa posisi bersama dalam menghadapi Putaran Uruguay, dan sangatlah. jelas bahwa item utama. dalam agendan Presiden Dinton adalah para anggota. APEC dari Asia hendaknya menurunkan hambatan-hambatan perdagangannya bagi barang-barang Amerika. Pencapaian utama pertemuan tersebut adalah bahwa Meksiko dan Chili.diterima dalam organisasi dan tercapainya sebuah kesepakatan untuk menciptakan "masyarakat ekonomi Asia Pasifik."

Pertanyaan menyangkut penurunan hambatan-hambatan perdagangan di wilayah ini ditunda hingga pertemuan berikutnya yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia tahun 1994, di mana para anggota berikrar untuk mencapai "perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka" di tahun 2010 bagi para anggota APEC yang merupakan negara industri maju dan tahun 2020 bagi anggota lainnya. Pada pertemuan di Osaka tahun 1995, cetak biru liberalisasi perdagangan dan investasi disepakati bersama, namun pencapaian-pencapaian lain dalam pertemuan tersebut hanyalah sekerjanya. Patut dicatat bahwa Presiden Dinton, sebagian karena. kejengkelannya terhadap tuan rumah Jepang, memilih untuk tetap tinggal di Washington akibat adanya krisis anggaran. Dalam pertemuan Bulan November 1996 di Subic Bay, Filipina, Amerika Serikat berhasil menekan para anggota APEC untuk mendukung Kesepakatan Teknologi Informasi (Information Teditology Agreemeid) yang disponsori Amerika. Pada pertemuan tahun 1997 di Vancouver, yang berlangsung dalam hari-hari at kris, keuangan Asia Timur, organisasi tersebut mendukung upaya penyelamatan negara-negara yang tertimpa. krisis oleh IMF yang disponsori Amerika, dan sekali lagi menyatakan dukungannya terhadap perdagangan bebas. Meski demikian, peristiwa. paling menarik dunia pertemuan ini adalah usulan Jepang bagi adanya. Dana Moneter Asia untuk mendampingi ekonomi-ekonomi Asia yang sedang dilanda, masalah, sebuah dana yang tidak menyertakan Amerika. Serikat. Dengan menekankan keutamaan IMF dalam. urusan-urusan keuangan, Amerika Serikat menampik inisiatif Jepang tersebut. Pertemuan tahun 1998 di Kuala Lumpur, Malaysia, hanya dapat digambarkan sebagai bencana. Pernyataan kontroversial

dari Wakil Presiden Albert Gore (menggantikan Presiden Dinton), di mana ia menyerang pemerintah tuan rumah dan sebagainya. mengundang kemarahan masyarakat, telah mengacak-acak kepatutan sikap dan mungkin sangat merusak efektivitas organisasi yang ala kadarnya ini.

Terlepas dari retorika Administrasi Dinton menyangkut arti penting APEC, sikapnya yang sejati telah dirangkum sedemikian baiknya oleh seorang mantan pejabat administrasi tersebut. Dalam menanggapi pertanyaan tentang pemikiran Presiden terhadap Asia, pejabat ini menyatakan bahwa Presiden memikirkan Asia sehari sebelum ia dijadwalkan mengunjungi wilayah tersebut. Kepentingan utama Administrasi dalam APEC adalah menggunakannya sebagai kendaraan untuk membuka ekonomi-ekonomi wilayah tersebut bagi ekspor dan investasi Amerika. Amerika Serikat sepertinya akan menentang APEC atau organisasi Asia Pasifik lainnya yang tidak dapat ia kendalikan atau setidaknya mencegah agar tidak membuat tindakan-tindakan. yang dinilai berlawanan dengan kepentingan Amerika.

RANGKUMAN

Di awal abad kedua puluh satu, wilayah Asia Pasifik masih berada. dalam kekacauan ekonomi, Asia Timur hanya. Sedikit bangkit dari krisis ekonomi yang demikian parah, dan Jepang tetap mengalami resesi yang serius. Namun wilayah ini kaya. dengan fundamental-fundamental ekonomi seperti kesempurnaan tenaga kerja dan bertimbunnya tabungan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jepang akan terus memimpin dunia dalam sejumlah teknologi penting dan sektor-sektor industri berteknologi tinggi. Permasalahan wilayah ini utamanya. bersifat politik. Satu negara. yang dapat memimpin wilayah ini, Jepang, berada. dalam kebuntuan politik dan tidak mampu membuat inisiatif ekonomi dan/atau. politik yang dapat mengangkat wilayah tersebut keluar dari permasalahan ekonomi yang diderita. Meski demikian, terlepas dari bertimbunnya masalah yang dihadapi, wilayah ini perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya.

PENUTUP

Tes Formatif

Jawablah soal-soal di bawah ini !

1. Jelaskan dampak yang mendasar dari salah satu strategi Asia Jepang dalam perusahaan-perusahaan multinasional !
2. Jelaskan dua pendekatan utama dalam kelompok bisnis pada umumnya !

UMPAN BALIK

Setelah menjawab soal-soal di atas, cocokkanlah dengan kunci jawaban tes formatif yang ada di bagian akhir. Hitunglah jumlah jawaban yang benar kemudian gunakan rumus tingkat penguasaan, sebagai berikut :

(Jumlah jawaban yang benar)

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{—————}}{2} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan yang dicapai adalah :

80 % - 100 % = Baik sekali

70 % - 79 % = Baik

60 % - 69 % = Cukup

< 60 % = Kurang

TINDAK LANJUT

Bila belum mencapai penguasaan 80 %, maka harus mempelajari kembali kegiatan belajar terutama bagian yang belum dikuasai, agar dapat menyelesaikan soal di atas. Jika telah dapat mencapai 80 % penguasaan, maka dapat melanjutkan ke pokok bahasan yang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gilpin., and Gilpin, J.M., 2002. Tantangan Kapitalisme Global. Ekonomi Dunia Abad ke-21. Penerjemah : Munandar, H., dan Priatna, D., PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal 219 - 250
2. Kojima, K., 1979. Japanese Direct Foreign Investment : A Model of Multinational Business Operations. Charles E. Truth Company. Tokyo. Hal 306 - 311

BAB VI.
POTENSI PAPUA SEBAGAI JALUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL
INDONESIA DENGAN KAWASAN PASIFIK

Materi pada bab VI ini dibahas Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan wilayah Indonesia memiliki posisi yang strategis. Utamanya Papua sebagai jalur perdagangan internasional. Posisi geografis dan potensi sumber daya di dalamnya menjadi modal besar bagi Papua sebagai jalur perdagangan internasional yang akan menghubungkan jalur perdagangan Indonesia dengan kawasan Pasifik.

Dalam perspektif geopolitik, konektivitas jalur komunikasi menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan pengaruh Indonesia dalam hubungan perdagangan di kawasan Pasifik. Posisi Papua yang berbatasan langsung dengan negara- negara Pasifik, dinilai memiliki potensi strategis yang dapat menjadi pintu masuk perdagangan Indonesia-Pasifik.

Kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik, melalui konektivitas jalur perdagangan Papua Pasifik dinilai akan menjadi bagian penting dalam manuver geopolitik Indonesia di tengah persaingan kekuatan besar di kawasan Pasifik.

6.1. Potensi Papua.

Abbas, *et al.* (2021), dalam tulisannya di Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial Volume 6 No. 2 halaman 130-144, menyatakan Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic countries) yang berada diantara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan wilayah kepulauan Indonesia memiliki potensi besar sebagai jalur perdagangan internasional, termasuk dalam hal ini adalah wilayah Papua yang berpotensi sebagai jalur perdagangan internasional Indonesia dengan kawasan Pasifik.

Optimalisasi jalur perdagangan yang masih sangat minim di wilayah Indonesia bagian timur, dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Pada tahun 2018 nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara Pasifik mencapai USD 10,67 miliar, bagi Indonesia kawasan Pasifik merupakan salah satu kawasan strategis bagi perdagangan Indonesia.

Hal ini tidak terlepas dari adanya negara-negara kawasan Pasifik yang berpotensi menjadi mitra strategis bagi perdagangan Indonesia di kawasan Pasifik, diantaranya Australia, Papua New Guinea, Fiji, Selandia Baru, dan Timor Leste (Kemendag, 2019). Potensi ini membuat Indonesia harus dapat mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan Kawasan Pasifik.

Kawasan Pasifik dinilai menjadi kawasan potensial bagi tujuan perdagangan Indonesia. Meskipun nilai perdagangan Indonesia dengan kawasan Pasifik dinilai masih belum sebesar perdagangan Indonesia dengan kawasan lain, seperti nilai perdagangan Indonesia dengan ASEAN yang mencapai US\$ 26,77 miliar pada tahun 2017 (Kemendag dalam Katadata.co.id, 2017).

Sedangkan total nilai perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik di tahun 2018 mencapai US\$ 10,67 miliar yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai US\$ 10,37 miliar (Kemendag, 2019). Dalam implementasi manuver diplomasi ekonomi, Indonesia harus aktif dalam melakukan penetrasi perdagangan dengan pasar alternatif sebagai bagian dari strategi dalam menghadapi persaingan perdagangan dunia (Hutabarat 2018).

Intensitas hubungan diplomatik yang dibangun oleh Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik menjadi bagian penting bagi Indonesia untuk meningkatkan konektivitas perdagangan Indonesia Timur dengan kawasan Pasifik. Hal ini tidak terlepas dari adanya kepentingan Indonesia untuk dapat meningkatkan nilai perdagangan dengan negara-negara pasifik (Kementerian Perdagangan RI, 2019).

Optimalisasi perdagangan dengan kawasan Pasifik dinilai dapat dilakukan melalui optimalisasi konektivitas jalur perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur, terutama wilayah Papua yang dinilai memiliki potensi besar bagi jalur perdagangan Indonesia dengan Kawasan Pasifik. Hal ini tidak terlepas dari adanya hubungan sejarah yang dimiliki oleh Papua yang menjadi jalur perdagangan internasional pada abad ke-14 dan abad ke-17, yang telah menjadi koridor maritim Indonesia.

Papua telah memiliki sejarah panjang sebagai jalur perdagangan Nusantara. Pada sektor kekayaan sumber daya alam, Papua dinilai memiliki potensi besar yang harus dapat dioptimalisasikan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan komoditas perdagangan internasional, melalui wilayah Papua (Mahmud, 2014).

Dalam pandangan yang sama juga dijelaskan oleh Wuri Handoko (2010) dalam artikelnya yang berjudul “Gerak Niaga Maluku-Papua Zona Ekonomi dan Kekuasaan Islam”. Artikel tersebut memberikan penjelasan mengenai hubungan sejarah perdagangan kepulauan Maluku dan Papua yang menjadi salah satu jalur strategis bagi perdagangan rempah-rempah dan hal ini memiliki implikasi yang luas terhadap konektivitas zona-zona perekonomian strategis antara wilayah Papua dan Maluku yang menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Secara posisi geografis,

Papua yang berbatasan langsung dengan kawasan Pasifik dan Asia memiliki potensi besar bagi jalur perdagangan yang dapat menghubungkan kedua kawasan tersebut. Papua yang memiliki kedekatan geografis dengan negara-negara kawasan Pasifik, seperti Australia, Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji hingga Selandia Baru dinilai menjadi potensi besar bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan penetrasi pasarnya di Kawasan Pasifik.

Dalam pandangan geopolitik, meningkatnya kehadiran negara-negara besar, seperti China, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat dalam percaturan geopolitik kawasan Pasifik, telah menjadikan kawasan ini sebagai salah satu arena strategis dalam persaingan geopolitik global.

Isu-isu permasalahan Papua yang tidak dapat terlepas dari adanya pengaruh kekuatan asing, dinilai telah menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan kehadiran mereka di wilayah Papua, salah satunya dengan membuka jalur perdagangan internasional melalui Papua.

Papua dinilai memiliki potensi sumber daya besar untuk menjadi jalur perdagangan internasional di kawasan Pasifik. Hal inilah yang menjadikan Papua dinilai akan menjadi arena penting bagi percaturan geopolitik Indonesia di kawasan Pasifik. Dalam pandangan geopolitik Ermaya Suradinata (2001), mendefinisikan geopolitik sebagai kemampuan suatu bangsa dalam melihat potensi dan kekuatan yang dimilikinya untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Jakub Gyrgiel. Dalam pandangannya, Gyrgiel menjelaskan bahwa dalam manuver geopolitik suatu negara harus dapat meningkatkan

kapasitas kekuatannya dalam mengontrol kekuatan mereka terhadap potensi sumber daya dan jalur komunikasi yang dimiliki oleh wilayah-wilayah strategis. Kekuatan sumber daya dan jalur komunikasi dinilai akan menjadi sebuah elemen penting oleh suatu negara untuk bersaing dan mempengaruhi kekuatan lain di dalamnya (Grygiel, 2006: 25-27).

Kemampuan negara dalam mengontrol sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi dan jalur komunikasi dinilai akan meningkatkan kapasitas kekuatan untuk mendominasi persaingan geopolitik global dan menjadi keuntungan bagi suatu negara, baik secara politik, ekonomi, maupun militer (Grygiel, 2006: 31).

Hal inilah yang membuat suatu negara dinilai harus dapat memiliki kemampuan untuk membangun kekuatan jalur komunikasi yang dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur seperti, rel kereta api, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya yang dapat meningkatkan konektivitas dengan kawasan tersebut (Grygiel, 2006: 29-31).

Melalui pemaparan geopolitik yang dikemukakan oleh Jakub Grygiel ini, penulis Abbas, et al. (2021), menggunakan pandangan geopolitik Grygiel untuk menganalisis posisi geografis wilayah Papua yang dapat dijadikan sebagai arena persaingan geopolitik Indonesia di kawasan Pasifik.

Hasilnya adalah Dalam hubungan perdagangan dikawasan Pasifik, Indonesia telah memiliki beberapa mitra penting dikawasan Pasifik, diantaranya *hubungan Indonesia-Australia*. Menurut Abbas, et al. (2021), Australia merupakan mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia di kawasan Pasifik.

Pada tahun 2018 total perdagangan antara Indonesia dan Australia mencapai US\$ 8,6 juta yang menurun di tahun 2019 dengan total US\$ 7,8 juta. Pada nilai ekspor Indonesia di tahun 2018 mencapai angka US\$ 2,3 juta, sedangkan nilai impor Indonesia ke Australia mencapai nilai US\$ 5,5 juta.

Indonesia memiliki potensi ekspor ke Australia berupa kendaraan bermotor yang nilainya mencapai US\$ 201,6 juta, produk kertas rumah tangga dengan nilai mencapai US\$ 39,5, hingga kertas koran dan percetakan yang nilainya mencapai US\$ 40,6 juta. Sedangkan Australia memiliki potensi ekspor biji gandum dengan nilai mencapai US\$ 1 miliar dan ekspor sapi Australia yang mencapai US\$ 236 juta (Arfandi & Hertanti, 2019). Dalam hubungan perdagangan, Australia membutuhkan Indonesia sebagai pasar bagi komoditas pertanian dan peternakan (Setyawati & Agussalim, 2015).

Hubungan Indonesia-Papua New Guinea; menurut Abbas, et al. (2021), hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Papua New Guinea telah terjalin sejak tahun 1975, Papua New Guinea merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia di kawasan Pasifik. Secara letak geografis, Papua New Guinea yang berbatasan langsung dengan Papua (Indonesia) memiliki kedekatan hubungan politik dan ekonomi, termasuk dalam bidang perdagangan (Farneubun, 2016). Dalam neraca perdagangan Indonesia-Papua New Guinea di tahun 2019 tercatat surplus perdagangan Indonesia sebesar US\$ 93 ribu dari komoditas non-migas.

Hubungan Indonesia-Selandia Baru; menurut Abbas, et al. (2021), hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Selandia Baru dimulai sejak tahun 1958. Kedua negara memiliki hubungan strategis dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan. Selandia Baru merupakan mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia di kawasan Pasifik setelah Australia.

Dalam hubungan perdagangan ekspor utama Indonesia ke Selandia Baru dalam bentuk komoditas kelapa sawit, karet, produk kehutanan, kertas, dan komoditas perkebunan lainnya. Sedangkan ekspor utama Selandia Baru ke Indonesia dalam bentuk komoditas susu bubuk, mentega, keju, daging, dan produk-produk olahan makanan.

Hubungan Indonesia-Vanuatu, menurut Abbas, et al. (2021), dapat dikatakan berjalan dengan sangat minim. Dimana nilai perdagangan kedua negara hanya mencapai US\$ 4 ribu pada tahun 2019 dengan nilai surplus perdagangan Indonesia dengan Vanuatu sekitar US\$ 3 ribu.

Namun hubungan politik dan perdagangan kedua negara menjadi terhambat akibat sikap politik Vanuatu yang sering kali dianggap mengancam posisi kedaulatan Indonesia, terutama mengenai permasalahan HAM Papua (Fadhilah, 2019).

Hubungan perdagangan Indonesia di kawasan Pasifik bukan hanya dibangun dengan negara-negara tersebut, melainkan bervariasi. Seperti Fiji dengan nilai perdagangan kedua negara menjadi terhambat akibat sikap politik Vanuatu yang sering kali dianggap mengancam posisi kedaulatan Indonesia, terutama mengenai permasalahan HAM Papua (Fadhilah, 2019).

Hubungan perdagangan Indonesia di kawasan Pasifik bukan hanya dibangun dengan negara-negara tersebut, melainkan bervariasi. Seperti Fiji dengan nilai perdagangan mencapai US\$ 27 ribu dan Timor Leste dengan nilai perdagangan mencapai US\$ 217 ribu di tahun 2019.



Gambar I. Alur Laut Kepulauan Indonesia
 Sumber: (<https://1001indonesia.net/alur-laut-kepulauan-indonesia/>)

Berdasarkan letak geografis, Papua yang berada di wilayah Indonesia Timur memiliki posisi strategis di kawasan Pasifik. Secara posisi geografis Papua yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di utara dan Laut Arafura di selatan yang menjadi jalur lintas perairan menuju Australia, sedangkan wilayah sebelah timur Papua berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan sebelah barat berbatasan meliputi wilayah Papua, seperti Skouw, Arso, Waris, Senggi, Kiwirok Timur hingga wilayah Merauke yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan Papua New Guinea, seperti Wutungm Bewani, Imonda, hingga wilayah Mando (Timisela, 2015).

Letak geografis Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dinilai akan menjadikan sebuah potensi besar untuk menjadi pintu masuk perdagangan rute darat dari kawasan Pasifik menuju Indonesia, begitu juga sebaliknya.

Letak geografis Papua bukan hanya memiliki potensi perdagangan pada rute darat, melainkan memiliki potensi strategis bagi jalur perdagangan Indonesia-Pasifik pada rute perairan

internasional. Hal ini tidak terlepas dari adanya posisi geografis Papua yang berada di dalam garis strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Indonesia merupakan negara kepulauan pertama yang telah menetapkan rute pelayaran internasional mereka melalui pembentukan tiga jalur ALKI berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Tiga jalur utama tersebut: ALKI I menjadi jalur perairan dan pelayaran yang meliputi Laut Jawa, Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut China Selatan yang dapat menjadi jalur perdagangan dengan Laut Banda (BPS, 2020).

Posisi geografis Papua pada wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea telah menjadi sebuah jalur perdagangan lintas negara yang internasional yang terhubung dengan kawasan Laut China Selatan, Afrika, dan Samudra Hindia (Hutagalung, 2017). ALKI II menjadi jalur pelayaran dan perairan yang meliputi wilayah Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut Lombok yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara dan Australia, sedangkan pada ALKI III terbagi atas beberapa rute yang meliputi ALKI III A yang menghubungkan jalur perairan Samudra Pasifik, Selat Maluku, Selat Seram, Laut Banda yang terhubung dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional Australia dan Filipina (Hutagalung, 2017).

Rute berikutnya adalah ALKI III B yang menghubungkan jalur perairan dan perdagangan Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Banda, dan Laut Maluku yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional Australia, Selandia Baru, dan Samudra Pasifik. Sedangkan rute ALKI III C akan menjadi penghubung jalur pelayaran dan perdagangan Laut Maluku, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu yang akan terhubung dengan jalur perdagangan internasional Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (Hutagalung, 2017).

Melalui penjabaran rute ALKI dengan skema rute diatas dapat dikatakan bahwa wilayah geografis Papua berada diantara rute ALKI III A-C yang menjadi bagian dari rute perdagangan internasional Samudra Pasifik, Samudra Hindia dan Australia melalui perairan Indonesia. Hal inilah menjadikan posisi geografis Papua yang berbatasan langsung dengan Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafuru dinilai sangat strategis untuk menjadi pintu masuk bagi perdagangan Indonesia bagian Timur, terutama menuju kawasan Selandia Baru dan Australia melalui rute perairan Laut Arafuru.

6.2. Potensi Komoditas Perdagangan Internasional Papua

Dalam hubungan perdagangan Indonesia-Pasifik, Papua menjadi salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi nilai perdagangan Indonesia-Pasifik yang mencapai US\$ 10,67 miliar di tahun 2018, yang meningkat sebesar 3,05% dibandingkan tahun sebelumnya (Kemendag, 2019).

Papua memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang dapat diekspor ke wilayah Pasifik, seperti Karet, Kakao, Kelapa Sawit, Pertambangan, Kopi hingga komoditas Perikanan. Komoditas ini dapat dijadikan komoditas strategis wilayah Papua (Jeratpapua.org, 2016).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Papua terus mengalami surplus perdagangan dengan nilai ekspor mencapai US\$ 2.007,52 juta dan nilai impor mencapai US\$ 746,72 juta di tahun 2015, secara perdagangan nasional Papua menyumbang sebesar 1,34% dari total nilai ekspor Indonesia tahun 2015 (BPS, 2016).

Peningkatan nilai komoditas perdagangan Papua juga semakin meningkat pada tahun 2017 dengan nilai mencapai US\$ 2.460,78 juta dan nilai impor mencapai US\$ 446,6 juta (BPS, 2018). Berdasarkan data BPS pada tahun 2017, Papua memiliki beberapa komoditas strategis yang di ekspor dalam perdagangan internasional.

Dalam konteks perdagangan internasional Indonesia-Pasifik, pangsa ekspor Papua masih didominasi di pasar Papua New Guinea dengan nilai ekspor mencapai US\$ 47,91 juta dan Australia mencapai US\$ 0,21 juta pada tahun 2015 (BPS, 2016). Hingga tahun 2017 dalam sektor perdagangan internasional, Asia Pasifik masih menjadi pangsa utama dalam perdagangan internasional komoditas Papua berdasarkan data-data tersebut, dinilai bahwa wilayah Papua memiliki komoditas-komoditas strategis yang dapat masuk ke dalam pasar internasional di sejumlah kawasan. Meskipun dalam hubungan perdagangan Papua dengan kawasan Pasifik masih dinilai sangat rendah.

Melihat potensi komoditas strategis wilayah Papua dinilai menjadi sebuah potensi besar bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan Kawasan Pasifik, terutama melalui wilayah Papua yang secara geografis memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional Indonesia-Pasifik. Besarnya potensi perdagangan internasional yang dimiliki oleh Papua bagi Indonesia, membuat pemerintah Indonesia dinilai harus dapat menyiapkan

langkah-langkah strategis untuk dapat mengembangkan potensi wilayah Papua sebagai jalur perdagangan internasional Indonesia- Pasifik.

6.3. Strategi Membangun Jalur Perdagangan Internasional Papua Melalui Pendekatan Geopolitik

Percaturan politik internasional pada abad ke-21 tidak dapat terlepas pada persaingan dalam memperebutkan sumber daya ekonomi (economic resources). Ditengah persaingan kekuatan besar dalam konstelasi geopolitik global, membuat Indonesia dinilai harus dapat meningkatkan integrasi teritorialnya termasuk dalam mengamankan jalur-jalur perdagangan strategis.

Jalur perdagangan internasional yang mencakup kekuatan sumber daya didalamnya menjadi sebuah aset penting yang harus diperhatikan oleh Indonesia di tengah persaingan konstelasi politik internasional. Namun dalam memandang posisi geografis suatu negara dalam konteks persaingan sumber daya ekonomi (economic resources), suatu negara harus memiliki pandangan geopolitik yang luas untuk meningkatkan bargaining position.

Dinamika wilayah Papua dan kawasan di sekitarnya tidak dapat terlepas dari adanya persaingan manuver geopolitik kekuatan negara-negara besar. Hal inilah yang membuat Indonesia harus dapat melakukan pendekatan geopolitik dalam membangun potensi sumber daya di kawasan Papua.

Geopolitik dalam pandangan Grygiel menjelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan power capability dan pengaruh suatu negara terhadap dinamika percaturan politik internasional, suatu negara harus dapat terlebih dahulu membangun jalur komunikasi meliputi pembangunan jalur kereta api, pelabuhan internasional, dan infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas terhadap suatu kawasan strategis dan akses sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk sumber daya ekonomi (Grygiel, 2006: 25-26).

Konektivitas wilayah Papua dinilai menjadi sebuah kunci utama dalam membuka jalur perdagangan internasional yang dapat meningkatkan kehadiran Indonesia dalam persaingan geopolitik kawasan Pasifik. Kawasan Pasifik menjadi kawasan strategis yang memiliki arti penting bagi Indonesia, hal ini tidak terlepas dari adanya posisi geografis kawasan Pasifik yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Secara letak geografis Kawasan Pasifik, terutama kawasan Pasifik Selatan yang berbatasan langsung dengan Indonesia membuat Indonesia harus dapat membangun hubungan dengan penuh strategi. Hal ini tidak terlepas dari adanya keterlibatan negara-negara Pasifik Selatan yang berusaha menaruh pengaruh politik mereka terhadap wilayah Papua (Rianda *et al.*, 2017). Hal inilah yang membuat Indonesia, sejak tahun 2013 mulai mengorientasikan pendekatan yang lebih aktif terhadap kawasan Pasifik dengan membuka hubungan diplomatic dengan seluruh negara-negara Pasifik (Satriawan, 2016).

Kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik dinilai membutuhkan sebuah pintu masuk strategis yang dapat meningkatkan konektivitas hubungan Indonesia-Pasifik, terutama menyangkut hubungan perdagangan dan geopolitik Indonesia di kawasan Pasifik Wilayah daratan geografis Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea, memiliki posisi yang strategis bagi jalur perdagangan internasional Indonesia- Pasifik melalui rute darat yang dapat menjadi pintu masuk bagi perdagangan Kawasan Pasifik dengan Asia Tenggara.

Hal inilah yang membuat wilayah Papua membutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalur lintas negara, jalur kereta api, dan pipa-pipa energi yang dapat meningkatkan konektivitas jalur perdagangan dengan kawasan Pasifik, khususnya dengan Papua New Guinea. Koridor ekonomi wilayah Papua yang akan terintegrasi dengan koridor perekonomian Maluku dinilai akan menjadi pintu masuk perdagangan Indonesia kekawasan Pasifik, khususnya Papua New Guinea pada rute perdagangan darat.

Dalam pandangan Farneubun (2016) Papua memiliki peranan strategis dalam mengintegrasikan kepentingan politik dan ekonomi Indonesia dengan Papua New Guinea. Sehingga hal inilah yang membuat koridor ekonomi kawasan Papua dinilai sangat diperlukan dalam mempercepat konektivitas dan integrasi kawasan antara Indonesia dengan kawasan Pasifik.

Dalam rute perdagangan Papua, konektivitas wilayah Sorong hingga ke wilayah Jayapuramdan Merauke menjadi pintu masuk bagi peningkatan perdagangan Indonesia-Pasifik. Secara posisi geografis, kawasan Sorong (Papua) berada diantara jalur perdagangan internasional Samudra Pasifik dan Australia Konektivitas perdagangan Indonesia dan Pasifik yang terhubung dengan wilayah perairan membuat pendekatan konektivitas perdagangan Indonesia-Pasifik, dinilai harus dapat dibangun melalui pembangunan rute pelayaran internasional, termasuk melalui perairan Papua.

Secara historis wilayah perairan Papua-Maluku merupakan rute pelayaran internasional bagi perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara. Hal inilah yang membuat wilayah perairan Papua-Maluku menjadi wilayah economic zone di kawasan timur Indonesia (Handoko, 2010). Hal ini semakin diperkuat dengan posisi geografis Papua, terutama pada beberapa titik strategis, seperti Sorong, Merauke, dan Jayapura sebagai titik strategis yang menjadi penghubung perdagangan Indonesia dengan kawasan Pasifik.

Wilayah Sorong (Papua) yang berada di garis perdagangan Australia dan Samudra Pasifik juga memiliki potensi besar menjadikan kota Sorong sebagai pintu masuk perdagangan internasional Australia-Samudra Pasifik dan Indonesia-Pasifik. Manuver geopolitik Indonesia dalam gagasan Poros Maritim Dunia (PMD), seharusnya dapat mendorong peranan aktif Indonesia dalam meningkatkan konektivitas perdagangan maritim, terutama di wilayah Indonesia bagian timur khususnya Papua.

Strategi konektivitas jalur perdagangan maritim Papua dapat dibangun dengan konsep “Spoke and Hub”. Strategi Hub adalah dengan menjadikan kota Sorong, Jayapura, dan Merauke sebagai kota pelabuhan utama yang dapat menghubungkan perdagangan domestik dan internasional. Sedangkan strategi Spoke menjadikan kota Timika, Nabire, Kaimana, Wasior, Fak-Fak, Serui, Biak dan Manokwari sebagai Pelabuhan pendukung dalam rute pelayaran dan perdagangan Papua (Natalia & Agus, 2016).

PENUTUP

Tes Formatif

Jawablah soal-soal di bawah ini !

1. Jelaskan jalur-jalur potensi perdagangan Papua !
2. Jelaskan factor-faktor hambatan !

UMPAN BALIK

Setelah menjawab soal-soal di atas, cocokkanlah dengan kunci jawaban tes formatif yang ada di bagian akhir. Hitunglah jumlah jawaban yang benar kemudian gunakan rumus tingkat penguasaan, sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{(\text{Jumlah jawaban yang benar})}{2} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan yang dicapai adalah :

- 80 % - 100 % = Baik sekali
- 70 % - 79 % = Baik
- 60 % - 69 % = Cukup
- < 60 % = Kurang

TINDAK LANJUT

Bila belum mencapai penguasaan 80 %, maka harus mempelajari kembali kegiatan belajar terutama bagian yang belum dikuasai, agar dapat menyelesaikan soal di atas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abbas, Rusdi J., Muhamad Firmansyah., Frisca Lampita. 2021. Potensi Papua Sebagai Jalur Perdagangan Internasional Indonesia dengan Kawasan Pasifik. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 6 No. 2 Halaman 130-144.

TENTANG PENULIS

Penulis bernama : Dr. Ir. Jolanda Kitsia Juliana Kalangi, MS
Surel : jolandakalangi@unsrat.ac.id

Pengalaman Ilmiah:

- 2016. Development Of Agribusiness For Farming Of Native Chicken In The Subdistrict Of South Kotamobagu
- 2018 Empowerment For The Group Of Cattle Farmer In The Village Of Pinabetengan Tompaso Minahasa Regency North Province Indonesia.
- 2019 Cooperative Farming Concept Business Development Strategy Model of Native Chickens in Province North Sulawesi Indonesia
- 2020 Cooperative Farming Concept as Business Development Strategy Model of Native Chickens in Province North Sulawesi Indonesia
- 2022 Analysis of Strategy for Local Beef Cattle Competitiveness Development in North Sulawesi